



APAPUN
GAYA MEREKA,
TETAP SAJA
MEREKA
BURUH....

John
Tanjung
2011.

...
sudah lama ya sejak mula
Kau aku tahu
berapa harga lengan dan otot Kau aku
Kau tahu berapa upahmu
Kau tahu
jika mesin-mesin berhenti
Kau tahu berapa harga tenagamu
...

petikan dari puisi Wiji Thukul

" B u k a n K a t a B a r u "



ANDITO SUWIGNYO

BURUH BERGERAK

Membangun
Kesadaran Kelas

FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG

● **Buruh Bergerak:**
Membangun Kesadaran Kelas
(Edisi Revisi)

Penulis: Andito
Penyunting: Tia Mboeik, Andi Hakim
Pewajah Sampul: ejacreative14@gmail.com
Penata Letak: www.budipayiwan.co.id

Cetakan II (Edisi Revisi), Januari 2012
Penerbit: **Friedrich Ebert Stiftung**
Kantor Perwakilan Indonesia
Jl. Kemang Selatan II, No.2A - Jakarta 12730/ Indonesia
www.fes.or.id
Cetakan I: Trade Union Care Center (TUCC), September 2008

Tebal: 192 Halaman
ISBN: 978-602-8866-04-0
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
Copyright © 2008, Andito

*Buku ini tidak untuk diperjual belikan, dilarang mengcopy / memperbanyak isi
dari buku ini tanpa seizin Penerbit*

• S a m b u t a n F E S

Kelas buruh Indonesia belum mencapai kemandiriannya. Ia lahir dan terbentuk bukan karena peralihan dari masyarakat feodal ke industrial. Disini ikatan primordial khas masyarakat agraris demikian kental pada etnisitas, keagamaan dan kelompok. Dalam kondisi demikian, tidaklah heran bahwa partai buruh tidak mendapat suara signifikan dalam Pemilu di Indonesia.

Selain itu, program pemberdayaan kelas buruh masih terpaku pada hal pragmatis dan teknis seperti pengembangan minat untuk membuat serikat pekerja, penguatan kemampuan berorganisasi disertai pembelajaran tentang hukum perburuhan. Program demikian tentunya bermanfaat bagi buruh, tapi sama sekali tidak cukup. Penguatan suatu gerakan butuh kesadaran yang mengikat rasa solidaritas, dan untuknya buruh butuh ideologi.

Kajian ideologi jarang disajikan dalam pelatihan buruh. Dalam banyak kasus, kajian ideologi bahkan sering disepelekan. Kalaupun dipelajari, berkuat pada materi sejarah semata. Dalam praktiknya, kursi pimpinan sering hanya dikuasai

oleh segelintir kaum elit, dan selebihnya anggota dijadikan objek mobilisasi semata. Tidak heran, banyak pihak memandang gerakan buruh tidak berideologi.

Berangkat dari kondisi demikian, Friedrich Ebert-Stiftung menyambut baik diterbitkannya *Buruh Bergerak*. Awalnya naskah ini merupakan materi pelatihan yang diadakan oleh Trade Union Care Center, sebuah lembaga perburuhan di Aceh yang melakukan pemberdayaan buruh dengan cara yang khas.

Sebagaimana umumnya naskah-naskah ideologis, buku ini tidak dipenuhi data rumit namun lebih banyak panduan refleksi. Misi buku ini hanya satu, membangun kesadaran kelas. Dengannya kelas buruh diharapkan mampu bergerak solid dan sistemik, tapi tidak instan dan anarkis.

Selamat membaca! []

Jakarta, September 2008

Erwin Schweishelm

Presiden Direktur Friedrich Ebert-Stiftung
Kantor perwakilan untuk Indonesia dan Timorleste

- Sambutan Penerbit

Cetakan I

Ada beberapa pertanyaan kritis di benak kita ketika berbicara kondisi perburuhan di Indonesia, diantaranya: Mengapa gerakan buruh di Indonesia tidak sekuat gerakan buruh di Eropa, Amerika Latin, Jepang atau Korea? Ketika berbicara kondisi gerakan sosial di Indonesia, apakah peranan kaum buruh dalam Reformasi 1998? Kemana dan dimana kaum buruh dalam proses reformasi di Indonesia?

Reformasi telah berjalan sepuluh tahun. Gerakan buruh telah memiliki ruang bebas untuk mengekspresikan perjuangannya. Tetapi tetap saja belum ada perkembangan dan peran yang signifikan dalam dinamika perjalanan bangsa ini. Pertanyaannya, mengapa potensi besar buruh Indonesia tidak menjadikan mereka sebagai kekuatan yang diperhitungkan?

Salah satu faktor yang memperlemah gerakan buruh di Indonesia adalah represi rezim Suharto. Ia berhasil menggubri dan menghancurkan nilai-nilai dasar perjuangan kaum

buruh. Ketiadaan nilai-nilai dasar perjuangan telah membuat gerakan buruh Indonesia menjadi pragmatis, terfragmentasi, stagnan dan mudah dikooptasi.

Ketiadaan dasar gerakan yang jelas membuat buruh Indonesia tidak punya cita-cita dan gagasan besar. Ibarat orang hidup tanpa ruh dan jiwa. Gerakan buruh mengalami involusi, bergerak ke dalam yang mengakibatkan konflik internal yang kronis. Antaraktivis saling hantam dan sikut di internal organisasi.

Buku yang sedang anda pegang ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya cita-cita besar atau ideologi bagi sebuah gerakan. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa musuh besar perjuangan kita ternyata ada dalam mental dan pola pikir kita. Kapitalisme sulit dikalahkan, karena kita juga bermental kapitalis, dan secara tidak sadar, kita berpartisipasi aktif dalam sistem tersebut.

Buku ini merupakan kumpulan materi Basic Leadership Training dan Intermediate Leadership Training, diselenggarakan oleh TUCC dengan dukungan FES pada periode 2007-2008 di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelatihan tersebut mendapat sambutan yang sangat baik dari para peserta.

Kami berharap buku ini memberi manfaat bagi rekonstruksi gerakan buruh Indonesia. Melalui gerakan ideologis akan tercipta masyarakat ideologis dan akhirnya negara ideologis. Dengan mengusung ideologi universal, semoga kaum buruh bisa membawa kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk dunia.[]

Muhamad Rusdi

Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia
Acting Director Trade Union Care Center (TUCC)

• P e n g a n t a r

Edisi Revisi

Lebih satu tahun lalu, FES meminta saya untuk merevisi buku ini. Pada awalnya saya menolak. Menurut saya, semua buah pemikiran dalam buku, termasuk Buruh Bergerak, adalah catatan masa lalu. Bagaimanapun kualitasnya, memang demikian kenyataannya.

Namun setelah saya buka-buka lagi lembaran buku tersebut, saya menyadari bahwa memang sebaiknya buku ini direvisi karena beberapa alasan yang cukup mendasar.

Alasan pertama, memperjelas sasaran pembaca buku ini. Buruh Bergerak pada awalnya merupakan himpunan materi pelatihan perburuhan yang diselenggarakan oleh Trade Union Care Center di Aceh dimana pesertanya bisa dibedakan antara buruh level menengah-bawah dan menengah-atas. Kaum buruh menengah-bawah menerima besaran upah sedikit diatas UMP dan KHL yang memaksanya untuk hidup sederhana dengan gaya hidup standar. Sedangkan buruh menengah-atas, yang lebih senang disebut “karyawan”, menerima upah beberapa kali diatas UMP sehingga sanggup

memilih alternatif gaya hidup. Untuk kelompok buruh yang pertama, perubahan kebijakan perusahaan, sekecil apapun, berdampak secara langsung pada kondisi hidup mereka. Nah, buku ini diperuntukkan bagi kelompok pertama, pekerja kerah biru atau mereka yang berupah pas-pasan.

Alasan kedua, gaya bahasa lisan mendominasi sebagian besar naskah buku cetakan pertama. Ada frase yang kontekstual dalam forum pelatihan namun kurang pas ketika dialihkan dalam bentuk tulisan, sehingga menyisakan ruang terlalu luas untuk multitafsir. Karena itu, perubahan bagan dan penambahan ilustrasi diharapkan memudahkan pembaca dalam memaknai pesan dalam setiap bab.

Alasan ketiga, penjelasan beberapa konsep pada cetakan pertama dipertajam untuk memudahkan dalam aplikasinya didalam kehidupan tiap pribadi.

Perombakan yang dilakukan dalam buku cetakan kedua ini cukup kasat mata karena memuat data-data baru, namun hal ini tidak mengubah substansi naskah terdahulu. Jika pada akhirnya revisi ini mungkin juga membutuhkan sebuah revisi, menurut saya ini lumrah karena setiap pemikiran masa lalu selalu berhadapan dengan realitas hari ini.

Jakarta, November 2011

Penulis

Andito Suwignyo

DAFTAR ISI

5	Sambutan FES
7	Sambutan Penerbit Cetakan I
9	Pengantar Edisi Revisi
11	Daftar Isi
15	Pendahuluan

25	Bab 1: Kerangka Berpikir
26	Memilih Ideologi
30	Konsep – Sikap – Aksi
32	Deideologisasi
34	Ego dan Individualita
36	Fungsi Epistemologi

43	Bab 2: Nestapa Buruh
44	Warga Kelas Dua
49	Buruh dan Pekerjaan
51	Krisis Pendapatan
56	Memilih Miskin
58	Nasib Buruh Migran
60	Pengawasan yang Lemah
61	Buruh "Yang Lain"

67	Bab 3: Buruh Terhegemoni
71	Hegemoni Moral
74	Hegemoni Bahasa
76	Hegemoni Sosial
79	Hegemoni Budaya
82	Hegemoni Politik
84	Menggilir Hegemoni?
86	Bebas hegemoni

93	Bab 4: Buruh Borjuis
95	Efektif dan Efisien
100	Kapitalis Alamiah
102	Kemerdekaan dan Kebebasan

109	Bab 5: Nilai Lebih Buruh
110	Kepemilikan Pribadi dan Ekonomi Kota
113	Kelahiran Kaum Feodal
115	Kelahiran Kaum Borjuis
117	Paradoks Industri
119	Posisi Buruh
123	Etika Weberian
124	Menolak Kapitalisme
126	Sistem Alternatif

135	Bab 6: Kesadaran Buruh
139	Kesadaran Ideologi
141	Kesadaran Sosial
142	Kesadaran Gender
145	Kesadaran Politik

151	Bab 7: "Membunuh" Kelas
	Buruh
153	Kelas dalam Sistem Produksi
154	Kontraksi Kelas Buruh
160	Kemandirian Kelas
162	Memulai Pendidikan

169	Bab 8: Unionisme
170	Merdeka Ala Bung Karno
171	Apa yang Harus Dilakukan?
177	Landasan Konstitusional
178	Mengorganisir Diri
183	Pengorbanan
186	Tujuan Transenden

189	Daftar Pustaka
192	Tentang Penulis

PENDAHULUAN

“Knowing others is wisdom,
knowing yourself is enlightenment”

Mengenal orang lain adalah kebijaksanaan,
mengenal diri sendiri adalah pencerahan

Lao Tzu (600-531 SM)

Sudah berapa lama kita bekerja?
Apa saja yang telah kita dapatkan?
Apakah pekerjaan kita memberi makna bagi diri, keluarga, dan
lingkungan kita?
Apakah kita menyadari diri kita sebagai buruh?

Pertanyaan-pertanyaan ini lazim diungkapkan oleh kita yang merasakan kesenjangan antara penghasilan, kebutuhan hidup dan gaya hidup yang ingin dicapai. Kita tidak membicarakan posisi kita sebagai buruh kerah putih (*white collar worker*) hanya karena bekerja profesional didalam kantor dengan titel akademik tertentu. Kita juga tidak

1. http://thinkexist.com/quotation/knowing_others_is_wisdom-knowing_yourself_is/148363.html. 25 Mei 2011, 15:31 WIB.

berbicara tentang buruh kerah biru (*blue collar worker*) yang mengedepankan ketrampilan. Tiap bulan kita dihantui oleh kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sedangkan upah yang kita terima tidak mencukupi. Padahal kita telah bekerja keras. Prestasi dan komitmen kita pada perusahaan juga tidak mengecewakan.

Bila merujuk pada teori Abraham Maslow², kondisi kerja semacam ini belum keluar dari cangkang kebutuhan dasar (*basic needs*) di level dua, yaitu *security of employment*. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, bebas dari rasa takut dan cemas dan sebagainya yang tentu saja terkait dengan statusnya sebagai pekerja. Apabila *safety needs* ini tidak terpenuhi dalam waktu relatif lama, maka perilaku pekerja tentang dunianya bisa berkembang ke arah yang negatif, yaitu meta patologi seperti sikap apatis (karena nasib yang tidak kunjung berubah), bosan (potensi diri tidak berkembang karena rutinitas pekerjaan), putus asa (tidak punya alternatif pekerjaan), kehilangan rasa humor lagi (karena stres setiap hari), terasing (dengan alat produksinya), mementingkan diri sendiri (tidak peduli dengan pekerja lain yang bernasib sama), dan sebagainya. Perilaku khas pekerja yang berupah pas-pasan.

Kondisitersebut tidak dirasakan oleh mereka yang berupah besar, yang selisihnya berlipat-lipat dibandingkan pekerja di

-
2. Abraham Maslow (1908 - 1970) adalah pelopor aliran psikologi humanistik yang terkenal dengan teorinya tentang hirarki kebutuhan manusia. Aliran psikologi ini dikenal juga sebagai "mazhab ketiga" disamping Freudisme dan behaviorisme. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang berhirarki, mulai dari kebutuhan yang paling rendah (fisiologis), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, hingga kebutuhan untuk aktualisasi diri. Empat kebutuhan pertama merupakan kebutuhan untuk bertahan.

level bawah. Mereka mampu menyisihkan penghasilan mereka sekian persen untuk investasi dan mencapai *passive income*. Kita sebut mereka borjuis kecil. Uang bekerja untuk mereka, bukan mereka bekerja untuk uang. Mereka bisa melakukan apa pun, di mana pun, kapan pun, dengan biaya berapa pun. Untuk semua kepentingan pribadi tersebut, seringkali mereka memanfaatkan jabatannya sebagai manajemen atau direksi perusahaan. Namun konkretnya, siapakah yang menjalankan roda perusahaan ini? Mereka adalah buruh perusahaan yang ketar ketir memikirkan masa depan.

Bagi buruh level bawah, sulit mencari sistem yang mendukung kepentingan mereka. Bila ekonomi perusahaan membaik, mereka belum tentu kena cipratannya. Namun, bila ekonomi perusahaan memburuk, mereka sudah pasti berisiko tinggi dirasionalisasi alias dipecah atau diubah statusnya dari karyawan tetap menjadi pegawai kontrak.

Ketika badai krisis ekonomi menerjang, apakah perusahaan besar ikut kolaps? Tidak. Tepatnya, belum tentu. Manajemen tinggal merumahkan buruh, memotong upah, atau memindahkan perusahaan ke lokasi lain yang menyediakan tenaga kerja murah.

Kita lahir, tinggal, dan bekerja di negeri yang terkenal makmur dan sejahtera, *gemah ripah loh jinawi*. Negeri kita dijuluki Zamrud Khatulistiwa, surga dunia yang sesungguhnya. Kandungan ikan, tani, kebun, dan tambang yang melimpah ruah. Konon, Nusantara adalah Kota Atlantis sebagaimana yang pernah ditulis filosof Yunani, Plato (427 – 347 SM). Tapi buruh tidak sumringah mendengar semua kisah tersebut. Kenyataan pada masa kini, Nusantara yang kini disebut Indonesia, menampilkan pemandangan ekstrem: orang kaya yang semakin kaya dan orang kebanyakan yang menjadi miskin dan dimiskinkan. Kelas buruh pada kelompok kedua. Uniknyanya kedua kelas ini berjalan "secara harmonis", seolah-

olah tidak bersentuhan, tidak saling ganggu. Kelas pertama sibuk antri *launching* apartemen baru, shopping ke negeri jiran, atau nonton konser musik senilai satu bulan Upah Minimum Propinsi. Diluar perhelatan tersebut, orang-orang kebanyakan antri di halte busway, makan di warung nasi emperan jalan, dan berbagi bilik kontrakan di gang sempit.

Kebun, sawah, dan pemukiman warga tersingkir ke pinggiran kota, berganti *cluster* perumahan elit berhias padang golf mini, mal, apartemen, dan bangunan superblok. Semua berdiri gagah dengan view rumah-rumah kumuh dan sungai yang bau menghitam.

Tiada lagi lahan terbuka yang gratis tempat orang merasakan kesejukan pepohonan dan menghirup udara segar. Air tanah habis tersedot untuk pembangunan gedung. Pohon-pohon besar diganti bunga-bunga dalam pot demi memperindah tampilan gedung. Tidak peduli, ketiadaan resapan air membuat permukaan tanah turun setiap tahun.

Pertentangan kelas tidak otomatis berakhir dengan revolusi. Kaum kapitalis selalu punya cara untuk mempermak wajah tamaknya dengan wajah lugu tanpa dosa. Mereka menyediakan berbagai sarana hiburan bagi kaum proletar. Setiap hari televisi menayangkan konser musik *lipsync*, program *reality show* dengan objek kaum papa, dan ajang pencarian bakat. Sinetron dengan aktor/aktris ganteng, cantik, putih dengan wajah blasteran siap membius penonton dari kesumpekan hidup.

Ibukota semakin sesak. Ruas jalan tidak bertambah. Tapi sedan-sedan mewah bersliweran dengan riangnya, berpapasan mesra dengan kaum miskin kota (*urban poor*) yang berserakan di sudut-sudut jalan. Semua maklum. Sudah ada pembagian tugas antarwarga: yang kaya silakan menghirup udara berpendingin, yang miskin silakan menghirup asap knalpot.

Di negeri seperti inilah kita hidup, tinggal dan bekerja.

Kita adalah buruh. Mungkin kedua orangtua kita pegawai negeri sipil. Tapi tidak banyak dari kita yang mengikuti jejak mereka. Mungkin karena upah PNS yang kecil, meskipun ada iming-iming uang pensiun. Mungkin karena kita tidak punya uang pelicin.

Kita pilihkan pendidikan untuk anak kita cukup di Sekolah Dasar Negeri. Biayanya murah. Tentu dengan mutu rendah karena anggaran pembangunan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan disunat habis-habisan oleh oknum Departemen Pendidikan Nasional. Menyontek massal dilembagakan untuk mengejar kelulusan Ujian Akhir Nasional. Guru mengajar dengan stres karena asap dapur tidak tertutupi oleh upah honorernya.

Berbeda dengan bos kita, manajer atau pemilik perusahaan. Mereka sadar, pendidikan adalah investasi paling penting. Mereka masukkan anak-anak mereka ke sekolah plus atau internasional. Biayanya mahal (tapi tidak seberapa dengan penghasilan mereka), tapi mutu dan fasilitasnya baik. Guru-gurunya pun (nampak) sejahtera, meskipun upahnya hanya sedikit diatas UMP. Tidak heran anak bos lebih unggul dari anak karyawan.

Seusai lulus, anak-anak bos mencari magister dan doktor di perguruan tinggi luar negeri. Pulang ke Indonesia, mereka magang pada perusahaan koleganya. Belasan tahun kemudian, anak-anak karyawan bekerja di perusahaan anak-anak bos. Kita tidak tahu apakah ini takdir atau pilihan. Kita hanya berupaya nasib anak-anak kita tidak seburuk orangtuanya.

Sebagai warganegara yang baik, setiap bulan kita merelakan negara memotong upah kita atas nama pajak. Barang-barang belanjaan istri/suami dan jajanan anak-anak pun terkena pajak. Hasil pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur di negeri ini, membayar upah pegawai negeri,

membiayai pejabat dan anggota parlemen "studi banding" ke luar negeri. Sisanya disimpan di bank-bank pemerintah dan diinvestasikan dalam bisnis patungan negara dan perusahaan. Sebagian perusahaan tersebut dikelola oleh bos kita.

Kita tidak bisa tidur puas dan semauanya karena dibayangi jam kerja. Saat kita bangun tidur, anak kita sudah pergi ke sekolah. Saat kita tiba di rumah, anak kita sudah tidur lelap. Praktis, waktu eksklusif untuk keluarga hanya hari Sabtu dan Minggu. Kenyataan yang aneh. Kita tinggal satu rumah bersama keluarga namun tidak ada kesempatan dan waktu yang cukup untuk saling tatap muka dan bercengkrama.

Air yang kita gunakan sehari-hari untuk mandi, minum dan cuci, disedot dan difertilisasi dari negeri kita sendiri, kini dikelola oleh perusahaan asing. Dulu perusahaan air minum ini milik negara. Konon, alasan privatisasi adalah efisiensi. Tentu saja negara juga butuh uang tunai. Dengan masuknya saham swasta, seharusnya, harga dan pelayanan akan lebih baik dan kompetitif.

Kenyataannya, tarif air selalu merangkak naik dengan kualitas tak memadai. Kadang kenaikan tarif ini dilakukan semena-mena dan tanpa sosialisasi kepada masyarakat pelanggan. Kita tidak tahu bagaimana cara berpikir dan berhitungnya rezim ini. Mereka hanya berpikir untuk memprivatisasi sebanyak mungkin BUMN/BUMD. Mungkin karena *success fee* atau kepemilikan saham gratis dibalik transaksi besar tersebut. Nah, perusahaan asing biasanya bermitra dengan perusahaan lokal. Siapakah pemilik perusahaan lokal tersebut? Bos kita.

Kita sarapan sambil menonton televisi. Dulu kita tidak bisa sarapan sambil melihat tayangan sadis. Mendengar cerita menjijikkan saja perut kita mual. Tapi televisi punya logika lain. Selama laku dijual, program apa pun akan ditayangkan. Alasannya klasik: tuntutan dan selera pasar. Kini kita terbiasa

menonton tayangan sadis saat sarapan dan makan siang. Siapakah pemilik saham televisi swasta? Bos kita.

Mengapa kita melakoni semua ini? Karena kita buruh.

Mengapa kita mau bekerja kepada orang lain? Karena kita tidak bisa bisnis.

Mengapa kita tidak bisa usaha sendiri? Karena kita tidak memiliki kesempatan untuk mengisi waktu guna mengasah minat dan bakat, kurang modal dan daya untuk merencanakan masa depan. Mengapa kita tidak punya modal? Karena upah kita tidak cukup untuk investasi.

Bagi mereka yang melihat kondisi ini sebagai takdir, mereka akan memaksa pengendalian dirinya. Orang-orang ini akan menyalahkan sikap tidak bersyukur, menyalahkan ketidakberdayaan sebagai sebuah dosa. Sikap seperti ini justru vonis kematian bagi individu, karena segala motivasi untuk berkembang dan membentuk nasib dipatahkan sebelum tumbuh.

Yang justru lebih krusial adalah mencari tahu apakah itu yang mendesain sistem penindasan manusia atas manusia.

Kita tidak memaki kaum kaya dan berpunya. Kaya dan miskin itu sesuatu yang relatif dan dinamis. Orang kaya tidak otomatis jahat dan orang miskin tidak otomatis benar dan harus dibela. Namun kita wajib tahu apa penyebab sesungguhnya dari sistem yang tidak adil ini. Mengapa penindasan selalu menimpa kelas buruh, bukan pengusaha? Mengapa ada orang yang bisa hidup mewah tanpa bekerja keras? Tentu bukan sekadar karena mereka "bekerja cerdas". Mengapa ada orang yang selalu bekerja keras tapi tidak pernah sejahtera? Kita merasakan suatu sistem penghisapan, eksploitasi, dan penindasan di sekeliling kita. Dada kita terasa sesak oleh sistem ini. Sistem apakah, yang manakah?

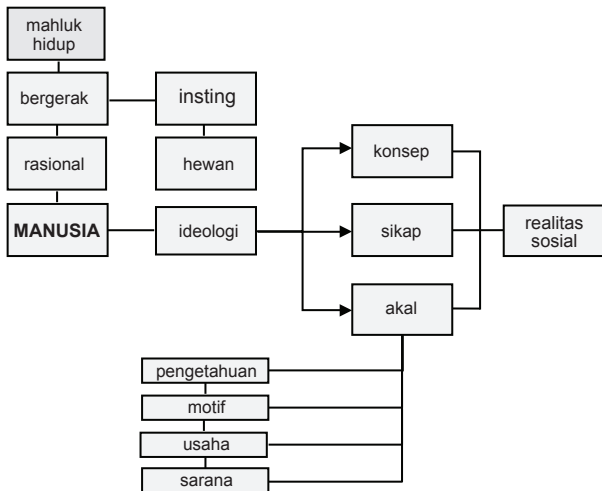
Kita harus cari tahu bersama-sama![]



Ideologi berfungsi mengkonstruksi masalah manusia dan menawarkan pemecahan terbaik dalam praktiknya. Masalah tidak mesti kasat mata, seperti masalah keuangan atau masalah keluarga. Ia juga bisa berada di luar lingkungan sosial kita, melampaui dunia material kita.



BAB I : KERANGKA BERPIKIR



KERANGKA BERPIKIR

Kenapa harus takut pada matahari?
Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya
Kenapa harus takut pada malam hari
Nyalakan api dalam hati usir segala kalamnya

(Iwan Fals, Anthoq Klobot, dan Yoyik Lembayung, "Serenade", 1985)

Perbedaan mendasar manusia dengan hewan adalah manusia diberi akal untuk memahami dan memberi makna dari apa yang dikerjakannya. Sedangkan hewan mencari makan dengan cara instingtif, yaitu dorongan rasa lapar. Apabila rasa lapar itu terpenuhi maka ia menjadi senang dan terpuaskan. Pengalaman instingtif ini yang membuat hewan hidup cuma untuk makan. Anjing, kuda, sapi, senang diberi makan setelah mereka bekerja tapi pola hidup hewan-hewan itu tidak pernah berubah, persis seperti pola hidup nenek moyangnya ratusan tahun yang lalu. Anjing tidak pernah belajar dari sejarah bagaimana memenuhi kebutuhan jika hal-hal tak

terduga terjadi pada dirinya. Anjing tidak punya rencana dan program hidup jika ia dicampakkan ke jalan setelah dianggap tidak lagi berguna oleh majikannya.

Hanya manusia yang punya kesadaran sejarah. Seorang buruh senang mendapat uang sebagai upah kerjanya tapi ia tidak menghabiskan upah hanya untuk makan sepuasnya. Buruh punya tujuan jangka panjang dari sekadar bisa makan tiap bulan. Tantangan hidup manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Dulu dengan menjadi buruh di ladang, seorang petani bisa membuat rumah dan menyekolahkan anak ke kota. Sekarang kondisinya berbeda, inflasi menyebabkan semua barang yang dua puluh tahun lalu pada hari ini harganya melonjak hampir empat puluh lipat. Jumlah tenaga buruh bertambah berlipat kali daripada kebutuhan industri, sehingga soal mencari makan, di tingkat buruh sendiri kita akan saling sikut dan bersaing mendapatkan pekerjaan.

Memilih Ideologi

"Ideology... is indispensable in any society if men are to be formed, transformed and equipped to respond to the demands of their conditions of existence."

ideologi... sangat diperlukan oleh masyarakat mana pun, ketika mereka hendak membentuk, mengubah, dan melengkapi diri dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan hidupnya."

(Louis Althusser, 1918 – 1990)¹

Manusia belajar dari sejarah untuk memperbarui dan menyempurnakan hidupnya. Untuk menghadapi tantangan hidup hari ini dan didepan, dan demi menuju penghidupan yang lebih baik, kita membutuhkan perencanaan dan pro-

1 <http://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1964/marxism-humanism.html>, 1 Juni 2011, 10:45 wib

gram. Kita sebut gagasan, harapan, dan perbuatan menuju kondisi yang diinginkan ini sebagai ideologi atau cara pandang dan aksi.

Menurut Mazhab Frankfurt,² ideologi adalah struktur pengetahuan yang punya solusi terhadap problem konkret yang dihadapinya. Ideologi menawarkan suatu perubahan melalui proses pemikiran formal dan normatif. Ada lagi yang menyebut ideologi sebagai cara pandang komprehensif tentang segala sesuatu secara umum dan filosofis. Dalam pandangan Jorge Larrain,³ ideologi merujuk pada sistem pendapat, nilai, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kepentingan kelas atau golongan tertentu yang cara berpikrinya mungkin berbeda-beda. Tidak jarang perbedaan ideologi ini menciptakan persaingan dan bahkan pertentangan. Dengan demikian, ideologi, apabila ditransformasikan oleh kelas yang dominan kepada kelas yang terdominasi, ia akan menjadi inti gerakan politik.

Menurut Louis Althusser, ideologi merupakan representasi dari hubungan imajiner individu terhadap keberadaan materialnya. Ideologi tersebut dibentuk oleh Ideology State Apparatus (ISA) yang sudah tersebar dalam berbagai struktur sosial masyarakat sebagaimana basis ekonomi seperti agama, lembaga pendidikan, media massa, dll. termasuk lingkungan dan aktivitas keseharian kita. Ideologi yang kita anut bukanlah representasi dari realitas yang sebenarnya, melainkan hasil menghubung-hubungkan antara realitas dengan persepsi

2. Mazhab Frankfurt dilekatkan kepada sekelompok filsuf yang berafiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Tahun 1930 dianggap sebagai tahun kelahiran Mazhab Frankfurt, yaitu ketika Max Horkheimer diangkat sebagai direktur lembaga tersebut.
3. Jorge Larrain adalah profesor sosiologi pada Alberto Hurtado University, Santiago, dan Birmingham University, Inggris. Buku-bukunya antara lain: *Identity and Modernity in Latin America* (Polity, 2000) and *Identidad Chile* (LOM, 2001).

dirinya mengenai realitas tersebut dalam bentuk "kesadaran palsu".

Jadi, ideologi bertumpu pada pengetahuan. Setiap manusia mempunyai pengetahuan, setidaknya pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah dirinya dan dirinya pasti bukan selain dirinya.⁴ Pengetahuan identitas ini juga disebut kesadaran. Alhasil manusia adalah makhluk berpengetahuan dan berkesadaran.

Ideologi berfungsi mengkonstruksi masalah manusia dan menawarkan pemecahan terbaik dalam praktiknya. Masalah tidak mesti kasat mata, seperti masalah keuangan atau masalah keluarga. Ia juga bisa berada diluar lingkungan sosial kita, melampaui dunia material kita. Hal-hal berkaitan dengan keyakinan, agama, kesadaran akan hak dan kewajiban adalah bagian dari masalah-masalah tak kasat mata.

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sadar atau tidak, setuju atau menolak, sesungguhnya setiap manusia berideologi, apa pun profesinya; supir, presiden, pelacur, pemulung, menteri, nelayan, polisi, atau petani. Meskipun kadang-kadang mereka tidak menyadarinya atau bahkan menyangkalnya dengan mengatakan, "Saya tidak suka ideologi", "ideologi melulu soal politik", atau "ideologi tidak bisa menyelesaikan problem hidup saya dan saya lebih suka yang riil dan konkret didepan mata!" Alih-alih mengabaikan ideologi, sikap menolak ideologi adalah ideologi atau cara pandang

-
4. Kita sebut pengetahuan primordial ini sebagai prinsip identitas. Prinsip ini diambil dari logika Aristoteles yang dikenal sebagai *Prima Principia*, yang terdiri dari tiga aturan: 1) *Principium identitatis*, prinsip identitas biasa dilambangkan $A = A$, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, 2) *Principium non contradictoris*, biasa dilambangkan $A \neq$ bukan A, sesuatu tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri, dan 3) *Principium exclusi tertii*, prinsip menolak jalan tengah/kompromi, bahwa sesuatu tidak mungkin memiliki dua identitas sekaligus dalam satu dimensi.

ideal itu sendiri. Meski yang dimaksudnya, cara pandang saya berbeda dengan cara pandang orang lain.

Ungkapan lain yang sering kita dengar seperti; “Saya bosan dengan partai A, golongan B. Saya netral saja tidak mau ikut-ikutan ideologi satu golongan.” Dari pernyataan ini kita paham bahwa ketika seorang memilih untuk tidak ikut satu aliran pemikiran tertentu, sebenarnya ia memilih satu sikap lainnya. Ketika ia menolak sebuah aliran, ia tanpa sadar memilih aliran lainnya. Tidak ada orang yang bebas dari ideologi. Tidak ada orang yang bebas untuk tidak memilih atau berkehendak. *Tidak memilih* pun adalah sebuah *pilihan*.

Sikap lemah terhadap cara pandang ini menjerumuskan kaum buruh kepada kepasrahan atau keikhlasan hidup yang semu. Seolah-olah mereka tidak punya hak lagi untuk memperjuangkan nasibnya, karena ada anggapan bahwa bisa menjadi buruh saja sudah merupakan suatu berkah.

Alam pikiran buruh pada umumnya relatif sederhana, yaitu menuntaskan pekerjaan dalam satu bulan dan menerima upah berupa uang pada akhir bulan. Sebagai salah satu kelompok masyarakat menengah bawah, buruh merupakan profesi yang cukup aman dan membanggakan, apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit. Aman dalam arti pendapatannya tiap bulan jelas dan berjangka panjang. Membanggakan dalam arti statusnya sebagai “orang kantoran” atau “kerja di PT” cukup prestisius sebab tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Memiliki barang elektronik/perkakas rumah tangga baru bukan monopoli orang kaya. Bagi buruh, setiap tanggal muda, semua harga barang di toko/mal terasa murah. Bagi yang upahnya pas-pasan pun tidak mengapa, mereka juga masih bisa bergaya seperti kelas menengah kebanyakan, cukup dengan sedikit menurunkan standar hidup menjadi sedikit

lebih sederhana. Mereka kumpulkan kepingan logam dari sisa upah tiap bulan untuk mudik menengok kampung halamannya pada hari raya keagamaan. Buruh hanya menanggung beban pribadi, tidak menanggung risiko sebesar perusahaan bila gulung tikar.

Konsepsi ini perlu kita ubah. Buruh itu *profesi* pilihan kita, apapun dalihnya. Sehingga, setiap individu buruh, pengurus buruh, atau pemodal, mestilah berideologi. Dengan ideologi buruh dipahami hak-hak dan kewajibannya didalam sistem masyarakat. Buruh dikembalikan kesadarannya akan nilai-nilai lebih dirinya baik itu dalam relasi ekonomi dengan pihak korporasi, politik dengan negara, dan sesama buruh sendiri. Buruh tidak boleh lupa bahwa nilai kemanusiaannya ditentukan oleh seberapa besar kesadaran mereka dalam menentukan posisi dalam hubungan-hubungan ini.

Konsep Sikap Aksi

Ideologi mempunyai tiga struktur: gagasan, sikap, dan tindakan. Gagasan muncul setelah indera menyingkap suatu realitas yang kita sebut sebagai pengetahuan. Kita menolak pengetahuan yang meragukan karena hanya akan membuat gagasan yang tumpul. Tentu saja tingkatan verifikasi tiap orang bergantung kepada nalarnya masing-masing. Perolehan atas suatu gagasan bergantung pada sejauh mana kesadaran kita, yaitu respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Hewan mampu menyingkap suatu realitas dengan inderanya dengan penuh kesadaran instingtif, namun ia tidak mampu melahirkan sebuah gagasan, baik konseptual maupun aksional. Ayam memahami kebutuhannya akan makan, tapi ia tidak bisa mengkonsep soal menyimpan gabah.

Gagasan yang terstruktur tentang suatu hal disebut konsep. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsep adalah

gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami kategori atau kelas dari suatu entitas. Sebuah konsep yang utuh hakikatnya merupakan himpunan gagasan yang terverifikasi oleh akal rasional kita. Kumpulan konsep yang terakumulasi sejenis dan terstruktur kita namakan ilmu pengetahuan.

Pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu hal kita sebut keyakinan. Struktur keyakinan akan bergerak dinamis sesuai dengan pengujian-kritik kita tiap saat. Semakin benar dan tak terbantahkan komponen premis-premisnya, maka keyakinan kita pada sesuatu itu semakin kuat. Kalangan lain membahasakan keyakinan semacam ini sebagai (awal) keimanan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang yakin, yang beriman, apapun bentuk, konstruksi, dan tujuan transendennya. Keyakinan manusia senantiasa berkembang dari suatu objek pengetahuan yang terbatas menuju yang tidak terbatas. Bagi penganut rasionalisme, akal diklaim mampu menjangkau alam-alam abstrak, hingga pengenalan kepada gagasan tentang Yang Mahaesa, Yang Mahasempurna.

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Biasanya, sikap penerimaan atau penolakan disampaikan melalui pernyataan atau perubahan mimik atau tubuh.

Sedangkan aksi atau tindakan merupakan suatu proses aktivitas fisik untuk mencapai tujuan. Sebuah aksi yang disengaja mengandung empat unsur, yaitu: pengetahuan, motivasi, kehendak dan kemampuan. Bila salah satu unsur ini dilepaskan, maka kita tidak bisa menyebutnya tindakan yang disengaja. Tindakan tanpa pengetahuan pasti bergerak se-

cara instingtif (seperti orang yang mengigau). Tindakan tanpa motivasi pasti tak bertujuan (seperti orang yang berjalan tak tentu arah). Tindakan tanpa kehendak pasti terpaksa (seperti dipaksa minum oleh orang lain dengan kondisi fisik tak berdaya). Tindakan tanpa kemampuan pasti khayalan (misalnya ingin terbang ke bulan tanpa alat).

Deideologisasi

Hubungan buruh dengan ideologinya akan tampak pada bagaimana keterikatan diri buruh terhadap majikan dan alat produksinya. Buruh yang tidak sadar kelas hanya menjadikan ototnya sebagai alat gadai untuk menerima upah. Buruh yang tidak paham pentingnya kedudukan mereka dalam lini industri hanya berpandangan sempit dan sederhana saja, yaitu bahwa ia bekerja sekadar dapat uang makan dan bisa hidup. Bilamana ia dihadapkan pada pilihan buruk, misalnya kecelakaan kerja, maka hubungannya dengan alat produk satu-satu miliknya dan satu-satunya yang dihargai majikan tidak lagi berfaedah bagi dirinya.

Buruh tanpa ideologi adalah buruh yang rapuh, dan rentan tercampak dalam kubangan kemelaratan. Tetapi ada kalanya buruh dilemahkan ideologinya dengan godaan-godaan material seperti sekadar gizi dalam bentuk makanan tambahan atau upah dengan syarat buruh tersebut masuk dalam sistem industrialnya. Akibatnya buruh berpandangan bahwa ideologi kelasnya sebatas upah. Dipikirkannya upah adalah alat negosiasi yang paling hebat dengan pihak industri. Padahal upah sekadar alat tukar antara kerja buruh dengan target produksi. Tetap saja perlindungan-perlindungan mendasar terhadap alat produksinya, sekali lagi, sama sekali diabaikan pihak korporasi.

Proses deideologisasi ini mempersempit wawasan

pengetahuan buruh. Ia dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang terus menerus, namun pengetahuan ini tidak disertai oleh kemerdekaan untuk memilih dan kesadaran untuk menilai. Pemahaman nilai diri ini dipatok oleh "majikan" dalam bentuk upah. Buruh dipandang tidak berbeda dengan mesin, bila rusak tinggal diganti.

Sering kita temukan buruh-buruh tersebut merasa menjadi "diri yang utuh" setelah ia mempunyai pekerjaan. Rupanya nasib baik sebagai buruh dirasakan sudah mampu menempatkan profesinya ke dalam tingkat sosial tertentu. Namun hakikatnya ia dipilhkan (diperintahkan) oleh pihak lain (majikan) untuk melakukan pekerjaan tertentu. Buruh memang memilih untuk bekerja, namun penilaian atas pekerjaan dan nilai dirinya diserahkan sepenuhnya kepada majikan. Pada titik ini kesadarannya lepas dari apa yang ia kerjakan. Ia belum tentu sesuai dengan apa yang ia kerjakan.

Semakin lama proses produksi ini dijalankan, semakin lemah pula kesadaran dan daya buruh terhadap dirinya. Sebagaimana halnya mesin, buruh mengalami proses demekanisasi, menjadi lemah dan sampai suatu titik ia dianggap tidak lagi produktif dan harus dicampakkan. Akibatnya fatal: impian dan program hidupnya hanya sebatas impian dan tinggal nasib saja.

Jika deideologisasi ini terus terjadi maka buruh mengalami involusi kembali sebagai hewan. Berbakti pada korporasi dengan harapan sekadar mendapat makan, meski dia tahu suatu ketika tenaganya tidak lagi diperlukan, ia harus menerima nasib dicampakkan. Akibatnya seluruh karakter unik kemanusiaannya dicerabut atas nama upah dan kelangsungan produksi. Demi mendapatkan sedikit kesempatan maka buruh menciutkan diri dihadapan majikan, melepaskan hak-hak dasarnya. Keadaan inilah yang

memunculkan hierarki, strata, kelas antara majikan dan buruh, antara si kaya dan si miskin, yang membuat buruh semakin "berhutang budi" karena diberi pekerjaan. Ia tidak menyadari kenyataan lain: bahwa majikan tanpa buruh mustahil menjalankan roda produksi. Tanpa buruh, produksi tidak akan berjalan, tanpa buruh majikan bukanlah majikan. Lewat perspektif inilah sebenarnya baik majikan maupun buruh saling membutuhkan, dan saling menghormati. Satu pihak tidak lebih kuat atau lebih lemah dari pihak lainnya.

Buruh yang tidak menyadari bahwa kedudukan seimbang (adil) dan setara (fair) di hadapan majikan akan terperangkap sistem dan menjadi mesin produksi. Buruh yang bekerja tanpa didahului oleh kesadaran tentang proses verifikasi relasi majikan-buruh laksana kerbau dicucuk hidungnya. Ia sudah puas dengan upah yang diterima. Ia tidak menanyakan hak-hak lainnya yang sebetulnya harus diberikan majikan kepadanya.

Sebaliknya, buruh ideologis yang selalu menajamkan ideologinya dengan cara memverifikasi pengetahuan terus-menerus akan menemukan kesadaran akan kelas sosialnya. Semakin besar medan kesadarannya, semakin luas pemahamannya tentang relasi produksi yang ia jalani. Eksistensinya tidak dikungkung oleh jenis pekerjaan atau upah tertentu. Baginya, pekerjaan hanyalah alat, bisa berganti atau berubah. Posisi majikan tidak lebih dari mitra produksi. Besok bisa saja buruh menjadi majikan. Adalah pembodohan yang mengatakan bahwa nasib buruh tidak dapat diubah, dan buruh selamanya hanya boleh jadi orang upahan.

Ego dan Individualita

Bagaimana proses deideologisasi ini bisa begitu mudah

terjadi di tengah kaum buruh? Ada hal-hal penting dalam diri kita namun kita abaikan karena miskonsepsi atau kebingungan terhadap objek lain. Hal ini adalah ego. Ego adalah kesadaran individu tentang dirinya sendiri. Asumsi kita tentang kata ini biasanya merujuk pada sesuatu yang negatif, kita terstigma bahwa orang yang memiliki ego adalah orang yang mementingkan diri sendiri (egois). Namun benarkah egois itu sendiri hal yang negatif?

Orang yang egois adalah orang yang cinta pada dirinya sendiri. Ia selalu dinamis karena ingin menutupi kekurangan atau ketidaksempurnaannya terhadap kebutuhan fisiologis dan keselamatan atau perlindungan (*safety needs*). Buruh perlu merasa aman dalam menjalankan pekerjaannya. Ego inilah yang mendorong ia merindukan semacam perlindungan yang lebih baik dari sekadar upah kerja dari para majikan, karena ia menyadari akibat satu-dua hal bisa saja ia kehilangan alat produksinya sehingga ia kehilangan kesempatan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pada saat yang sama, perilaku egois tersebut juga bermakna adil apabila individu lain juga merasakan hal yang sama pada posisinya yang berbeda. Oleh karena itu konsep ego atau cinta diri ini sebetulnya berlaku universal, dimana tidak hanya buruh tetapi semua orang termasuk majikan perlu menghargai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebelum mereka mengedepankan egonya. Kesadaran ini menciptakan apa yang kita kenal dengan nama *individualita*, yaitu kesadaran bahwa setiap orang harus bekerja benar agar dapat penghargaan, dan dengan bekerja sama maka setiap individu akan mampu menghasilkan produk atau keuntungan yang lebih besar bagi semua pihak.

Perlu dibedakan dengan tegas antara individualita dengan individualisme. Individualita mengarahkan kita kepada

kesadaran akan hak dan kewajiban dalam konteks yang adil dan seimbang sementara individualisme adalah sikap egoistik, mau menang sendiri, dan mengharapkan keuntungan pribadi meski individu-individu lainnya mati tertindas. Sikap individualisme yang muncul dari dalam diri buruh sendiri yang menjerumuskan mereka kepada ideologi sempit; "asal saya dapat upah dan bukan saya yang dipecat". Pandangan ini yang menekan posisi buruh ke tempat yang paling rendah dan tanpa daya tawar di hadapan korporasi.

Dengan demikian, ego yang dipenuhi kesadaran individualitas akan membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan bersama. Ini karena ego tadi mendatangkan kesadaran bahwa selain kepentingan dirinya sendiri maka hak-hak orang lain juga harus dilindungi. Cara pandang ini akan membawa kesadaran kita sebagai individu-individu universal, setara hak dan kewajibannya. Sebaliknya, ego yang dipenuhi individualisme atau kesadaran "aku yang parsial" atau yang penting saya senang, hanya akan mengembangkan nalar kejahatan dan kezaliman terhadap dirinya dan juga individu-individu yang lainnya.

Fungsi Epistemologi

Secara instan, bab ini memang tidak berdampak terhadap hidup buruh secara langsung. Namun yang harus disadari buruh adalah bahwa hubungan industrial bukanlah sekadar aktivitas bekerja, bukan sekadar memperoleh upah dalam bentuk materi belaka. Harus dimunculkan kesadaran bahwa ada sistem yang congkak dan individualistik yang mencengkram buruh sedemikian rupa sehingga, dalam suatu proses dan kondisi tertentu, *mindset* buruh hanya terpaku pada proses mekanis tanpa kemungkinan membangun potensi kemanusiaannya lebih jauh. Disinilah pentingnya kita mem-

pelajari epistemologi perburuhan.⁵

Dengan mempelajari epistemologi, buruh diharapkan mempunyai alat untuk mencari/mengkonfirmasi suatu (teori) kebenaran dari segala fenomena industrial yang ada. Ia mempunyai inspirasi dan pedoman hidup. Ia tidak bersikap pasif atau netral terhadap pandangan ideologi lain. Ia tidak menjadi individu yang terpisah dan/atau teralienasi dengan alat produksi dan alam sosial di sekitarnya. Dan yang utama, ekspresi cinta-diri buruh akan termanifestasi dalam tindakan kolektif karena alasan sederhana: tidak ada cinta diri yang bisa diaktualkan oleh satu individu saja.

Buruh tidak akan bergerak tanpa sebuah perhitungan yang matang. Pergerakan untuk mengubah sistem industrial demi menyeimbangkan relasi kuasa antara pemilik modal dan pekerjanya. Pada saat yang lain, pergerakan ini bisa menjadi lingkaran ritus kekerasan sehingga diktator proletariat adalah bentuk lain dari kapitalisme proletar.

Alasan terjadinya demonstrasi perburuhan dapat menghimpun beragam jawaban. Seorang buruh pendemo beralasan ia sudah lelah hidup miskin. Bila demonstrasi tersebut berhasil sehingga upah buruh dinaikkan, ia akan membeli gadget baru. Buruh yang lain *nyeletuk* santai, lebih baik turun ke jalan daripada bengong di pabrik. Sesekali *refreshing*. Siapa tahu bisa disorot televisi. Ada lagi buruh yang bergerak karena tidak enak hati atau dipaksa turun bersama rekan-rekan buruh lainnya. Semua ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akibatnya kerap kita lihat aksi solidaritas hanya menjadi ekspresi saling membela kepentingan masing-

5. Epistemologi (dari bahasa Yunani, *episteme* [pengetahuan] dan *logos* [kata/pembicaraan/ilmu]), atau Teori Pengetahuan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Topik ini membahas apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan.

masing. Aksi demonstrasi bisa sama, tapi kepedulian dan pemahaman atas suatu masalah perburuhan berbeda-beda. Mengutip ucapan Mohammad Hatta (1933), "Agitasi dan propaganda adalah mudah, tapi setelahnya mau apa?"

Dengan demikian, aksi solidaritas menandakan aktualisasi dari cinta diri yang secara kolektif perlu dibentengi dengan pengetahuan dan pemahaman. Tindakan manusia tidak bernilai apa-apa bila tidak mempunyai struktur dan sistematika ideologi yang jelas dan argumentatif. Aksi tanpa pengetahuan adalah konyol, pengetahuan tanpa aksi adalah absurd. Sehingga, mau tidak mau, diterima atau ditolak, pengetahuan epistemologis yang didalamnya dihimpun cara pandang, sikap, dan aksi membuat motivasi gerakan buruh akan terbedakan kualitas dan hasilnya.[]

RINGKASAN:

1. Manusia termasuk didalamnya buruh adalah makhluk sejarah. Melalui sejarah ia belajar memahami masa lalu, menggunakannya bagi masa sekarang dan mengantisipasi masa depan menuju kondisi yang diinginkan. Proses ini yang menjaga kesadaran kita untuk terus memperbarui dan menyempurnakan hidupnya.
2. Setiap manusia termasuk di dalamnya buruh pasti dan mesti berideologi, yaitu cara pandang, sikap, dan dasar bagi tindakan setiap manusia tentang hal-hal baik yang diambil berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (humaniora) atau nilai-nilai yang lebih universal dan luhur (holistik). Terlepas apakah ia menyadari dan memahami ideologi tersebut secara teori atau tidak.
3. Dasar nilai kemanusiaan adalah bahwa praktik pemenuhan kebutuhan dasar bernilai baik dan bermakna adil apabila individu lain juga merasakan hal yang sama. Epistemologi bagi buruh berfungsi sebagai alat untuk mencari/mengkonfirmasi suatu kebenaran dari segala fenomena yang ada dan juga inspirasi dan pedoman hidup.

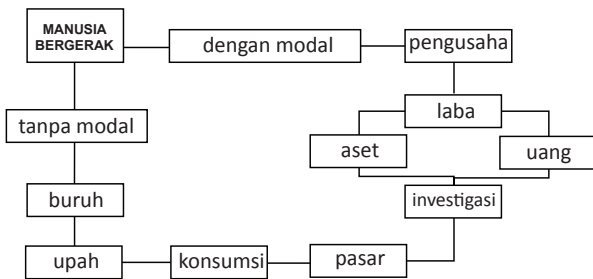




Waktu produktif buruh habis di pabrik dan kantor hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja. Mereka pulang ke rumah dengan tenaga sisa dan tidak punya waktu untuk mengembangkan diri. Usia mereka menua tanpa peningkatan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai.



BAB 2: NESTAPA BURUH



NESTAPA BURUH

Derap langkah dan keringat kuli pembuat jalan
Dengan pengki di tangan kiri pacul di pundak kanan
Dengus nafasnya terdengar keras bagai suara kereta
Keringat mereka menyengat aroma penderitaan
Berjalan gontai perlahan berbaris bagai tentara yang kalah perang

(Iwan Fals, "Kuli Jalan", 1987)

Pada pidato hari kemerdekaan 1963 Soekarno berkata, "Apabila kita tidak segera kembali ke jalan revolusi, maka kelak sejarah akan mencatat: disana, diantara Benua Asia dan Benua Australia, diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, ada bangsa yang mula-mula mencoba untuk hidup sebagai bangsa, tetapi akhirnya menjadi kuli di antara bangsa-bangsa, kembali menjadi *een natie van koelies, en een koe-lie onder de naties* (bangsa yang terdiri atas kuli dan menjadi

kuli diantara bangsa-bangsa”¹

Mari kita simak kalimat pertama *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), “Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama”.. Apakah semua manusia benar-benar merdeka? Bagi buruh, tidak. Sejak seseorang buruh menandatangani selebar kontrak kerja, saat itulah kemerdekaannya terampas, sehingga ia tidak mempunyai hak dan martabat yang sama dihadapan majikan.

Anda boleh saja menilai diri sendiri setinggi-tingginya, tetapi itu tidak akan bermanfaat kecuali disetujui majikan. Hal ini berlaku bagi siapa pun yang menganggap dirinya buruh kaum kerah biru, baik yang bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan sampai buruh kantoran. Pun anda seorang sarjana dan lulusan sekolah terkemuka luar negeri yang pandai berkoar dengan segala ilmu yang anda miliki, sejauh pemahaman anda tidak menyentuh kesadaran, maka anda hanyalah alat, sama dengan alat-alat lain yang dipakai sesuai kebutuhan perusahaan. Alih-alih menonjolkan eksistensi keilmuan atau keahlian diri, semua kelebihan itu *out of context* dan menempatkan anda tetap sebagai warga kelas dua di mata majikan.

Warga kelas Dua

Posisi buruh sudah nahas sejak ia menyandang istilah “buruh”, yaitu semua orang yang menerima suatu perintah untuk melakukan suatu pekerjaan pada waktu tertentu dengan imbalan upah berupa uang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, buruh dikenal sebagai “koelie”. Keberadaan kuli ini membesar saat pembukaan lahan perkebunan tembakau di Deli dan Langkat, Sumatera Timur, demi memenuhi ke-

1. Soekarno, “*Genta Suara Revolusi Indonesia [Gesuri]*”, 17 Agustus 1963.

butuhan Eropa. Efek dari paham ekonomi liberal pada 1863 di Eropa membuka jalan bagi modal-modal ventura ke Hindia dan bermain di sektor pertanian dan perkebunan selain perdagangan. Dibukanya perkebunan-perkebunan raksasa ini diikuti dengan kedatangan arus budak perkebunan yang banyak diambil dari Cina juga pulau Jawa. Demi “melindungi kuli” dan “menyenangkan investor”, pada 1880 pemerintah kolonial mengeluarkan ordonansi (*Koeli Ordonantie*) dan *penal sanction* yang mengatur perkuliaan tenaga kerja murah, memberikan perlindungan investasi untuk perusahaan dalam bentuk kontrak kerja, termasuk ancaman kerugian usaha yang dibebankan kepada kuli yang ketahuan melarikan diri atau dinilai mandor bekerja buruk. Kuli yang banyak didatangkan dari Jawa ini kemudian dikenal dengan sebutan *Djakon*, Jawa Kontrak.

Alih-alih melindungi buruh perkebunan, aturan tersebut memiliki lebih banyak rongga untuk menindas kuli. Rakyat dibujuk untuk berprofesi sebagai kuli, aparat desa sebagai calo tenaga kerja, dan birokrat Hindia Belanda melakukan korupsi besar-besaran baik melalui aturan maupun pengadaan buruh perkebunan. Praktik ini tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan sistemik birokrasi lokal yaitu para kepala desa atau pembesar melalui pembagian kerja warganya di perkebunan-perkebunan milik kolonial. Sudah jelas keuntungan lebih banyak dinikmati kaum pangeran dan para raja.²

Sistem perburuhan yang berlangsung pada awalnya menjanjikan banyak harapan kesejahteraan ternyata tidak mengeluarkan kuli itu dari lingkaran setan kemiskinan. Minimnya bayaran dan besarnya pungutan dari tuan tanah atau mandor, menyebabkan kuli terjerat dengan sistem “makan gaji”. Pendapatannya habis diawal tanggal gajian, sehingga mereka

2 JC Van Leur, “*Indonesia Trade and Society*”, Bandung: W. Van Hoeve, 1955, hal. 281.

dipaksa berhutang oleh tauke yang kemudian meminta pemotongan gaji langsung dari perusahaan. Bisa dikatakan, setiap bulan hutang ini bertambah terus-menerus. Akibatnya para Djakon ini turun-temurun hidup sebagai kuli di tanah Sumatera.³

Sebagai bangsa terjajah, kelas buruh di Indonesia adalah efek domino dari transformasi industri negara-negara kolonial. Saat rempah-rempah diburu dalam perdagangan dunia, ribuan rakyat kita ditarik sebagai buruh kontrak perkebunan dan gula. Ketika industri baja mulai berkembang, muncullah buruh pos dan kereta api. Demikian seterusnya ke sektor-sektor lain yang ditanami modal asing. Bagaimanapun, maraknya investasi di suatu wilayah, tetap saja tidak ada *trickle-down effect* atau keuntungan yang diturunkan bagi kelas buruh. Keringat buruh terkuras untuk peningkatan produksi, namun belum tentu berimbas ke kesejahteraan mereka.

Sistem oligarki, bersatunya penguasa dan pengusaha, tentu saja, menyulitkan buruh mendapatkan perlakuan yang adil. Ketidaksetaraan dalam kepemilikan alat produksi melemahkan posisi tawar buruh dalam setiap perundingan. Misalnya pada kasus buruh perkebunan, atau jahit yang dikenal istilah *famili kap* (familie schap, kerjasama dengan keluarga), dimana buruh membawa keluarga ke perkebunan membantu memotong tandan dan mengumpulkan buah

3 Istilah “buruh” mulai memiliki makna ideologis seiring dengan pergolakan buruh industri dan kaum tani di akhir abad 19. Buruh tidak lagi menganggap profesinya sebagai takdir. Ia merupakan desain sosial yang dipertahankan dengan segala daya oleh pemilik modal. Pada edisi 3 Juni 1929, *Fadjar Asia* menulis: “Zaman ini... dinamakan zaman tua, zaman *fulus*, zaman pertengkaran antara kaum buruh dengan majikan, zaman perjuangan si lemah dan si kuat, yang masing-masing menuntut hak-haknya. Ada yang berlebihan hak, ada yang kekurangan hak, sehingga keadaan dalam pergaulan hidup ini adalah terjungkir-balik.” *Fadjar Asia* adalah surat kabar harian yang dirintis oleh HOS Tjokroaminoto dan Agus Salim sebagai media perjuangan bangsa Indonesia.

yang jatuh. Ada pula membawa pekerjaan jahit ke rumah, mempekerjakan istri dan anak memasang payet atau kancing demi mengejar target pekerjaan di pabrik. Sebagai balasan dari kerja keroyokan begini, buruh mendapat premi, tambahan uang. Meski tahu kalau premi tersebut tidak layak bila dipadankan dengan tenaga kerja tambahan yang bekerja, buruh tidak punya pilihan dengan tawaran dari perusahaan. Jika kurang dari target maka gaji dipotong tapi jika melampaui target, premi dibayar alakadarnya.⁴

Pengusaha melupakan fakta terpenting bahwa buruh itu juga manusia, makhluk yang hidup pada siang hari. Bekerja pada malam hari dan tidur saat siang hari mengganggu bioritme harian dan rentan terkena berbagai penyakit. Buruh yang bekerja malam sering merasakan depresi, mual, gangguan lambung, sakit perut, diare dan hilang nafsu makan. Namun, tidak pernah ada kompensasi saat mereka diharuskan kerja lembur pada malam hari.⁵

Wajar saja buruh bereaksi keras karena hak-hak normatifnya tidak dipenuhi. Wajar saja buruh frustrasi karena semua pintu dialog tertutup kecuali untuk kemenangan

-
- 4 International Agency for Research on Cancer (IARC) telah memasukkan poin mengenai bekerja pada malam hari kedalam daftar pekerjaan berisiko kanker (16/3/2009). Hasil pengamatan terhadap 14.000 buruh selama 10 tahun mengungkapkan bahwa mereka yang bekerja dengan jam kerja fleksibel lebih banyak menderita kanker prostat dibanding mereka yang bekerja dengan jam kerja standar. Sedangkan perempuan yang bekerja pada malam hari setidaknya selama enam bulan lamanya berisiko tinggi mengidap kanker payudara. Buruh yang sering lembur malam hari juga berisiko tinggi terkena penyakit jantung. <http://www.ecancermedicalscience.com/news-insider-news.asp?itemId=460>
 - 5 UU 13/2003 memberikan syarat khusus untuk pekerja perempuan. Pasal 76 UU 13/2003 Ayat 1 menyatakan, "Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00." Pelaksanaannya dijabarkan pada Ayat 3 dan 4.

pengusaha. Menyikapi hal ini, buruh melirik aksi demonstrasi sebagai salah satu alat penekan yang sah. Bila gagal, maka cara yang lebih keras dilakukan, mulai aksi *slow down*, mengendurkan kerja, hingga aksi mogok kerja. Kerusakan yang dilakukan pekerja PT Drydock Naninda di Tanjung Uncang, Batam (pukul 08:30 WIB, 22/4/10) merupakan akumulasi kekecewaan terhadap minimnya kesejahteraan buruh akibat praktik outsourcing yang berlapis-lapis. Ribuan buruh pelabuhan mengamuk dengan membakar kantor, mess, dan kendaraan operasional kantor mereka. Mereka menyaksikan pekerja asing, terbanyak asal India, dibayar minimal sepuluh kali lipat dari pekerja lokal. Mereka dipaksa bekerja di hari libur dengan hitungan upah reguler dan upah lembur dihitung menjadi upah pada hari biasa.

Ironisnya, dalam kacamata pemerintah, segala tindakan suatu kelompok yang menghambat salah satu dari trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, maka layak disebut makar! Pemerintah melupakan poin pertama dari trilogi pembangunan yaitu pemerataan ekonomi. Demi meraih "pertumbuhan" dan "stabilitas", malah pemerintah mengorbankan "pemerataan".

Rezim memberikan konotasi negatif terhadap aksi buruh. Karena buruh protes tanpa melalui koridor versi perusahaan (dan beking aparat yang dibayar, pemerintah terkait yang bisa disogok), maka buruh dianggap memakai bahasa "kekerasan", setiap usaha non-dialog yang memobilisasi massa. Apalagi hingga benar-benar menimbulkan kerusakan. Tindakan ini dinilai menyerupai gerakan kiri. Di Indonesia, setiap yang kiri pasti dicap komunis, dan otomatis ateis dan anti Pancasila. Dengan stigmatisasi ini, Orde Baru mengalienasi kaum buruh dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Rezim Soeharto mereproduksi isu bahwa setiap aksi massa buruh pasti bikin

macet jalan raya, hanya untuk kepentingan pribadi, gerakan anti Tuhan, dan tentu saja merusak iklim investasi.

Buruh dan Pekerjaan

Kita sadar, nasib buruh lebih dekat ke buntung daripada untung. Buruh sudah lama ditekan, diperas, dikebiri, dan ditindas sampai usia produktifnya habis dilahap perusahaan. Setelah ia melemah dan menua, ia dianggap ampas, dibuang dan dilupakan oleh perusahaan. Bila statusnya pekerja organik, mungkin ada sedikit uang pesangon sebagai penghargaan atas masa baktinya selama ini. Tapi dengan kebutuhan hidup yang terus naik, tanpa jaminan sosial yang memadai, uang tersebut tidak berarti banyak. Satu buah penyakit dapat membuatnya langsung jatuh miskin. Bila ia pekerja kontrak, sudah jelas, nasib apes mengiringinya hingga ke liang lahat.

Buruh tidak punya masa depan yang jelas karena rekeningnya nol. Gaji yang kita terima amblas dalam belasan hari. Tengah bulan, kita antri kasbon ke bagian keuangan atau pinjam uang di koperasi. Sebagian lain memanfaatkan kartu kredit atau pinjaman tanpa agunan untuk kebutuhan konsumsi, yang bunganya apabila dicicil dengan pembayaran minimum pun tidak akan lunas dalam tiga puluh tahun. Buruh laksana pekerjaan determinan, sekadar mengisi waktu hingga ajal menjemput kita. Profesi ini memang tidak membanggakan.

Dengan asumsi bahwa buruh tidak menanggung semua risiko usaha, persaingan usaha yang meningkat tajam, dan bahan baku yang langka dan mahal, pengusaha berhitung rasional untuk memperkerjakan buruh tanpa harus mengangkatnya sebagai karyawan tetap/permanen/organik. Buruh di-kontrak selama dua tahun. Bila kinerjanya memuaskan, buruh itu akan dikontrak kembali untuk satu tahun berikutnya.

Perusahaan memberi kesempatan kepada buruh kontrak untuk bekerja di lokasi lain dan upah yang lebih baik. Tak jarang perusahaan memanggilnya kembali karena performa yang baik. Nominal upah sesuai isi kontrak yang angkanya, biasanya, tidak berbeda jauh dengan isi kontrak pertama, kecuali mengikuti standar inflasi. Perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai tunjangan yang membebani biaya produksi. Selain perekrutan langsung (*direct contract*) pengusaha juga memborongkan pekerjaan tersebut kepada perusahaan penyedia tenaga kerja (*outsourcing*).⁶ Dengan masa kerja yang terbatas, perusahaan membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang lazimnya mereka berikan kepada buruh organik berupa pelatihan, tunjangan tetap/tidak tetap, fasilitas, dan lain-lain.

Pada relasi kerja yang lebih personal, kadangkala buruh bekerja tanpa surat kontrak kerja. Cukup percaya lisan pengusaha. Mereka bekerja belasan hingga puluhan tahun tanpa status yang jelas. Setiap komplain atau usulan tinggal dibicarakan secara pribadi, tanpa memperhatikan apakah bahasan tersebut bagian dari hak-hak normatif atau tidak. Sistem perburuhan yang ganjil ini menjadikan buruh sebagai budak yang upahnya merupakan refleksi kebaikan hati majikan, bukan kewajiban.

Bagi pengusaha, sudah selayaknya buruh berterima kasih kepada mereka karena buruh masih bisa hidup minimal untuk

6 Pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) hanya boleh untuk lima bagian saja, yaitu security, cleaning service, driver, catering, dan jasa penunjang pertambangan dan tidak boleh untuk proses inti produksi atau kegiatan utama perusahaan (*core business*). Pada praktiknya, *outsourcing* hanya memindahkan pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan pekerjaan yang sama selama puluhan tahun. Untuk menghindari tuntutan hukum, nama perusahaan dan manajemen diubah berkali-kali namun dengan pemilik modal yang sama.

menghasilkan kerja maksimal. Bandingkan dengan banyaknya pengangguran diluar pabrik yang susah mencari makan. Perusahaan memaksa buruh memberi penilaian normatif, “Masih untung kita bisa bekerja di perusahaan ini.” Pada saat yang sama perusahaan minta buruh menilai mereka secara proporsional, “Sudah selayaknya kita bekerja keras karena perusahaan telah menggaji kita.”

Efek psikologis penerima upah terhadap pemberi upah/pengusaha adalah hutang budi, ketergantungan. Efek ini semakin menjerat ketika pengusaha masih terkait hubungan keluarga dengan buruh tersebut, atau titipan dari mitra kerja. Sehingga menguatlah stigma bahwa “pekerjaan” adalah kebutuhan sepihak buruh saja. Buruh tidak menyadari bahwa perusahaan pun butuh buruh agar mesin produksi berjalan. Hubungan yang intensif dengan landasan kerancuan berpikir (*logic fallacy*) mengondisikan kesungkunan penerima upah untuk mengkritik sistem dan perlakuan dari pemberi upah. Semakin dekat hubungan personal antara pengusaha dengan buruhnya, maka buruh semakin tidak nyaman untuk meminta “penyesuaian upah”.

Krisis Pendapatan

Pengusaha menanggung untung berlipat ganda dengan memperkerjakan buruh. Ia hanya membayar upah berdasarkan kemampuan buruh memproduksi. Dengan bermacam alasan, tidak ada upah yang benar-benar layak. Upah bukan lagi legitimasi legal atas hubungan industrial, bukan lagi semata-mata penghargaan atas nilai kerja seorang manusia beradab, melainkan menjadi ukuran dari daya tahan hidup seseorang terhadap harga kebutuhan pokok. Upah sudah berubah menjadi alat hegemoni pemilik modal terhadap kelas buruh. Kita tidak pernah mendengar perusahaan memberikan

upah yang layak demi kesejahteraan buruh. Tetapi kita selalu mendengar perusahaan mengutak-atik upah buruh sedemikian rupa agar nilainya sama atau tidak berbeda jauh dengan upah minimum yang diputuskan pemerintah.

Bahkan situasi dimana upah tidak lagi sesuai dengan beban kerja, maka penerima upah tidak otomatis bisa menyampaikan aspirasi kenaikan upah. Alih-alih menyampaikan aspirasi, buruh cenderung berharap “kepekaan hati” majikan tentang inflasi yang membuat upah sekarang tidak mencukupi kebutuhan pokok. Bila pengusaha “tidak berkenan” dengan aspirasi kenaikan upah dengan alasan ongkos produksi yang mahal dan persaingan bisnis yang ketat, maka buruhlah yang seyogyanya menyesuaikan diri dengan keadaan perusahaan.

Bayangkan, dengan upah yang ala kadarnya, berapa sisa uang yang mereka bawa untuk keluarga di rumah, orangtua di kampung, atau adik-adik mereka yang masih sekolah? Bayangkan pendidikan dan nutrisi macam apa yang mereka berikan kepada anak-anak mereka? Baiklah, buruh harus giat mencari tambahan. Kapan dan berapa banyak waktu yang harus mereka sisihkan? Waktu produktif mereka habis di pabrik dan kantor hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja. Mereka pulang ke rumah dengan tenaga sisa dan tidak punya waktu untuk mengembangkan diri. Usia mereka menua tanpa peningkatan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai. Lalu, dengan cara bagaimana mereka menaikkan penghasilan untuk memperbaiki kualitas hidup?

Buruh tidak punya kreativitas karena setiap hari hanya mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja. Bila mereka dialihkan untuk mengerjakan bidang lain, itu berkat kejelian majikan dalam melihat potensi pegawainya. Penambahan beban kerja tidak berarti peningkatan penghasilan sang buruh. Tidak ada *reward*, tidak ada apresiasi. Dengan bahasa penuh

kesantunan, majikan berdalih bahwa pekerjaan *multi-tasking* merupakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas buruh yang bersangkutan. Kata majikan, "Jika anda bekerja lebih cepat daripada karyawan lainnya, maka beban kerja anda sebenarnya memang masih kurang. Jika anda tidak bekerja dengan cepat, maka anda pasti tidak rajin." Majikan tidak pernah mengungkap fakta lain bahwa perusahaan telah menghemat biaya tenaga kerja baru sehingga keuntungan perusahaan berlipat ganda.

Dengan fleksibilitas kerja, motivasi buruh untuk berkarya sirna. Pikirannya penuh dengan problem dapur, pendidikan anak dan kesehatan sehari-hari. Mau makmur belum tentu karena upah tidak mencukupi. Mau susah, ya sudah pasti. Hartinya juga tidak tenang karena setiap saat ia selalu dihantui oleh tuntutan target produksi. Akibatnya mental buruh rusak. Buruh bekerja seperti pegawai negeri, datang ke kantor sekadar memenuhi kewajiban agar gajinya tidak dipotong.

Bagaimana halnya dengan pengusaha? Kapital mereka demikian cepat berkembang, bunga berbunga. Kenaikan BBM mereka siasati dengan menaikkan harga jual produk. Kenaikan upah minimum mereka siasati dengan memberikan beban tambahan kepada pekerjanya sehingga kenaikan upah tertutupi dengan peningkatan produksi diluar pekerjaan utama dengan premi murah. Apabila dirasakan masih berat, mereka sudah siap memecat buruh atau memindahkan pabrik ke luar negeri. Bila pengusaha tidak membutuhkan buruh lagi, buruh dipersilakan pindah kerja ke tempat lain. Manajemen berkilah, "Kami hanya mampu menggaji anda sebesar itu. Bila tidak setuju, anda dapat mencari pekerjaan lain yang lebih bagus dan menarik. Tentu keahlian anda akan sangat berguna di tempat itu."

Bila aktivitas buruh mengganggu stabilitas perusahaan

karena suka memprotes kebijakan pengusaha, manajemen tidak segan-segan memecat atau membuat buruh itu tidak betah dan mengundurkan diri. Perusahaan tidak perlu membayar pesangon. Nyatanya, tidak semua buruh berani pindah kerja karena sungguh sulit mencari pekerjaan. Apalagi sumber pendapatan mereka hanya dari perusahaan tersebut. Diluar kantor, ratusan hingga ribuan sarjana pengangguran sudah antri, siap bekerja dengan upah lebih murah. Semakin besar tekanan perusahaan, buruh semakin takut dan depresi. Mereka ingin protes tapi mereka butuh pula solusi riil agar dapur terus *ngebul*. Buruh sadar, aksi perlawanan akan memunculkan dua kemungkinan, berita baik atau berita buruk. Berita baiknya, tuntutan buruh dipenuhi dan perusahaan peduli terhadap kesejahteraan buruh. Berita buruknya, tuntutan buruh ditolak mentah-mentah dan manajemen segera mengeluarkan Surat Peringatan dan skenario PHK.

Lihatlah nasib buruh yang dipecat manajemen. Apakah yang buruh dapat perbuat? Uang simpati atau duka mungkin mengalir dari kantong-kantong rekan sekerjanya pada bulan-bulan pertama. Tapi solidaritas ini tidak berlangsung lama. Buruh sudah sulit menutupi kebutuhan hidupnya selama sebulan. Apalagi memberi donasi kepada rekan-rekannya yang bernasib apes. Mereka hanya mampu memberi satu sumbangan yang "konsisten": doa dan kata-kata simpati. Bukankah itu pula yang diajarkan kaum "agamawan" ketika melihat ada jemaatnya terzalimi?

Perusahaan selalu mengelak pertanggungjawaban atas kerusakan jiwa dan tubuh pekerjanya. Seolah-olah hubungan industrial hanya terjadi selama proses produksi berlangsung. Padahal buruh baru mulai merasakan kerusakan jasmani dan syarafnya bertahun-tahun kemudian, setelah ia lama tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Bagi pekerja yang cukup

sadar kelas, mereka menganggapnya sebagai bagian dari cobaan hidup. Sebagian buruh yang tidak kuat melawan sistem ini memilih bunuh diri.

Samsung Electronics kehilangan dua orang pekerjanya karena bunuh diri dalam waktu yang berurutan, cuma terpaut 8 hari. Kim Ju-hyeon mengakhiri hidupnya sesaat sebelum masuk kerja kembali dengan cara melompat dari lantai 13 asramanya setelah 373 hari ia bergabung dengan Samsung Electronics di Asan, Provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan (3/1/11). Sebelumnya, ia rehat dari pekerjaannya karena merasa stres dan depresi. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja Samsung yang lain juga tewas di tempat yang sama, dengan melompat dari lantai 18 asramanya (11/1/11). Sama seperti Kim, dia juga absen kerja cukup lama karena sakit.

Di Jepang, keluarga korban dapat menuntut perusahaan yang menyebabkan pekerjanya bunuh diri akibat stres karena terlalu banyak bekerja, atau mati kelelahan (*karoshi*). Tidak hanya itu, bunuh diri pekerja juga dipicu oleh hinaan atasannya dihadapan rekan-rekannya yang mengatakan ia mengambil jam kerja yang seharusnya tidak ia ambil. Belum lama ini, pengadilan memutuskan Mazda bersalah dan mendenda 800.000 poundsterling atau sekitar Rp11 miliar kepada orang tua dari pekerjanya yang bunuh diri akibat stres karena beban kerja yang berat (3/3/11).

Alih-alih memperbaiki hubungan industrial agar lebih manusiawi, perusahaan sering mengambil jalan pintas dengan mengganti pekerja manusia dengan mesin. Karena mendapat sorotan tajam dari berbagai media dan lembaga hak asasi manusia karena banyak pekerja bunuh diri, perusahaan perakitan iPhone dan iPad Apple di China, Foxconn Technology Group, berencana menggunakan satu juta robot dalam tiga tahun ke depan, dari sepuluh ribu yang sudah ada (3/8/11).

Robot sangat menghemat tenaga kerja, tidak mengeluh setelah bekerja berjam-jam, tidak butuh makanan atau pakaian, tidur, oksigen dan tidak mungkin bunuh diri. Sedangkan pemacu bunuh diri pekerja Foxconn disebabkan oleh buruknya kondisi kerja, upah murah, dan lembur paksa.

Memilih Miskin

Praktik perburuhan yang menindas menumpulkan daya cipta buruh. Keringnya kreasi adalah awal dari kemiskinan material. Kemiskinan sejati adalah kemiskinan mental. Namun mungkin saja berawal dari kemiskinan material. Sampai-sampai Aristoteles berkata bahwa kemiskinan adalah orangtua dari revolusi dan kriminalitas. Orang miskin cenderung kalap dan mengambil jalan pintas. Tuhan pun bisa hilang ketika buruh tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Sehingga, kata Euripedes, kemiskinan akan mendorong manusia menjadi pengikut iblis.

Dengan melihat kondisi buruh di atas, kita memilah beberapa alasan atau penyebab kemiskinan mereka. *Pertama*, alasan lingkungan. Mengapa mereka menjadi buruh? Karena tanah di daerah mereka tidak subur, iklimnya kurang cocok untuk bertani karena air yang langka, dan tidak ada kegiatan produktif yang bisa menghasilkan uang. Akhirnya mereka hijrah ke kota dengan bekal pendidikan formal yang rendah dan ketrampilan seadanya. Hasilnya, tetap miskin.

Kedua, alasan individual, atau patologis. Buruh miskin karena hanya mengejar status dan kepastian gaji, meskipun minim namun rutin dan pasti. Dengan harga kebutuhan yang semakin tinggi namun penghasilan kecil, mereka selalu gali lubang tutup lubang.

Ketiga, alasan keluarga. Buruh yang miskin sebenarnya sudah tidak betah dengan lingkungan kerja. Mereka ingin

pindah kerja. Tapi orangtua dan istri melarang karena ragu dengan kepastian nasib mereka di masa datang. Buruh itu mungkin punya tabungan untuk biaya mengadu nasib di daerah lain. Namun keluarga besar lebih senang buruh itu selalu berkumpul dengan mereka. Istilahnya, “Mangan ora mangan ngumpul.” Tidak masalah kita miskin, yang penting kita hidup bersama. Ungkapan agama “Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan” diplesetkan menjadi “Tolong-menolonglah kamu dalam kemiskinan”.

Keempat, penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari. Buruh miskin hidup bersama-sama dengan komunitas buruh yang juga miskin. Satu sama lain saling bantu untuk berhutang. Kemiskinan bukan aib, melainkan seni hidup. Mereka saling menguatkan dalam kemiskinan. Alam bawah sadar mereka menyimpan kebencian terhadap setiap buruh yang ekonominya menanjak sendirian. Lalu meluncurlah segala gosip murahan bahwa keberhasilan ekonomi buruh tersebut pasti hasil dari praktik-praktik tak terpuji yang melanggar hukum dan agama.

Kelima, alasan agensi. Buruh berkata, upah mereka sebenarnya cukup untuk membayar kredit rumah, kendaraan bermotor, sekolah anak-anak, dan bertamasya keluar kota. Namun situasi sosial politik yang tidak stabil membuat harga-harga melambung tinggi tapi upah tidak bertambah. Atau peraturan pemerintah yang menaikkan pajak secara semena-mena.

Keenam, penyebab struktural. Kebijakan dan praktik ekonomi sebuah negara berdampak secara signifikan kepada negara lain. Dikatakan buruh di Indonesia ini sebenarnya hampir layak, hingga sistem ekonomi global yang tidak adil membuat buruh miskin mendadak. Sistem perdagangan bebas memis-

kinkan petani karena harga produk pertanian dan perkebunan rusak dengan kedatangan produk pertanian impor. Rezim pengupahan yang memisahkan buruh dengan hasil produksinya merupakan bagian dari penyebab struktural.

Sebab-sebab kemiskinan tersebut diatas dirasakan oleh buruh. Sebagian bertahan, sebagian lagi mencari nafkah ke luar negeri.

Nasib Buruh Migran

“Kami telah mengambil langkah-langkah institusional, administratif dan hukum, untuk melindungi dan memberdayakan pekerja migran kita.”

(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 14 Juni 2011)

“Ruyati dihukum pancung di Mekah pada Sabtu siang, 18 Juni 2011.” (www.alriyadh.com)

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di Konferensi ILO menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Asia pertama yang meratifikasi semua Konvensi ILO yang fundamental (14/6/2011). Presiden Yudhoyono juga mengajak negara lain untuk tidak hanya meratifikasi semua Konvensi ILO tapi juga mengimplementasikannya.

Dengan anggaran penyusunan pidato kenegaraan sebesar Rp1,473 miliar untuk tahun 2011, diluar gaji staf ahli kepresidenan, kita percaya bahwa semua pidato Presiden pasti berkualitas. Namun, retorika politik tanpa tindakan nyata yang pro pekerja hanya akan menuai cemooh karena tidak sesuai dengan fakta-fakta selama ini.

Tidak sampai satu minggu setelah pidato tersebut, TKI kita dipancung di Saudi Arabia. Puluhan TKI lainnya sedang menunggu giliran dipancung. Belum lagi mereka yang disetrika, dipukul, diperkosa, dilecehkan secara seksual, dll. Sejak

dulu pemerintah kita dikenal lembek dalam hal negosiasi upah dan pembelaan terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. PBB menetapkan 18 Desember sebagai Hari Buruh Migran Internasional pada tahun 1990. Tapi tidak ada imbasnya bagi buruh migran asal Indonesia.

Kondisi pekerja kita di dalam negeri tidak otomatis mengembirakan. Presiden boleh berucap, “Para PRT yang bekerja di dalam negara mereka sendiri, juga harus diberi perlindungan yang sama.” Dua hari kemudian, Metro Malam memberitakan, dua pembantu rumah tangga di Medan dianiaya polisi wanita berpangkat Komisaris Polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumut (16/6/2011). Keduanya sering diinjak, dijambak, dan diborgol. Selama bekerja, mereka tak pernah dibayar. Polda Sumut pun tidak melakukan tindakan apapun.

Dengan kondisi diatas, janganlah kita bertanya bagaimana nasib UU No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) dan ratifikasi konvensi PBB mengenai perlindungan hak-hak buruh migran dan keluarganya. Isi UU No 39/2004 tidak cukup berpihak kepada buruh migran karena memposisikan buruh migran sebagai pekerja profesional yang bermigrasi secara sukarela. Padahal mereka terpaksa ke luar negeri karena tak bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak dapat hidup sejahtera di negeri sendiri. BI mencatat, hingga September 2010, jumlah buruh migran Indonesia 427,681 orang. Ironisnya, 67,24 persen korban perdagangan manusia (*trafficking*) direkrut oleh PPTKIS/PJTKI resmi.

Pidato Presiden sangat menginspirasi peserta Konferensi ILO. Diakhir pidatonya, Presiden berkata, “*Let us work together, to bring about the best possible conditions for the workers of the world. Let us join hands, to make this a new era of social justice.*” Empat hari kemudian, Ruyati dipancing.

Pengawasan yang lemah

Setiap hari, perampasan hak-hak dasar pekerja terjadi di hampir semua sektor. Mereka ditindas bukan karena praktik UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, melainkan pengusaha tidak mau melaksanakan undang-undang tersebut secara murni dan konsekuen. Kaum pekerja berharap Disnakertrans di wilayah terkait dapat melindungi mereka dari perlakuan sewenang-wenang pengusaha. Harapan ini tidak asal-asalan. Praktik pengawasan sesungguhnya diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Pasal 178 Ayat 2 UU No 13/2003.

Isu ketenagakerjaan memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sedikit masalah kecil di pabrik Indonesia dapat membuat produk-produk mereka tidak bisa dijual di luar negeri. Perusahaan tidak mudah lagi menutup rapat-rapat praktik busuk mereka. Informasi terbuka lebar berkat teknologi komunikasi dan kesadaran pekerja untuk mengorganisir mulai meningkat. Apabila penindasan terhadap pekerja tersiar seantero jagad, urusan jadi semakin repot. Bukan saja citra jelek menimpa negara yang bersangkutan, namun juga bisa mengancam investasi dan perdagangan internasional. Lembaga HAM dan federasi serikat pekerja internasional tidak akan tinggal diam. Pemerintah sadar betul bahwa isu-isu ketenagakerjaan dan keselamatan kerja sering dijadikan senjata menyudutkan produk-produk dari negara tertentu dalam perdagangan internasional. Sayangnya, tidak ada *political will* untuk membela nasib buruh. Selain itu, minimnya sarana, sumberdaya tenaga pengawas dan anggaran membuat penyelewengan perusahaan-perusahaan tidak dapat dicegah.

Akhirnya, pengawasan ketenagakerjaan hanya seperti pemadam kebakaran, hanya beraksi setelah penyelewengan

tidak bisa disembunyikan lagi, setelah terekspos media, setelah pekerja mulai protes dengan aksi-aksi massa. Padahal, surat pengaduan yang ditujukan kepada Disnakertrans dan kewajiban mereka untuk melaporkan pengawasan secara berkala, seharusnya sudah cukup menjadi sinyal agar lembaga ini proaktif dalam menjalankan tugasnya. Sayangnya, pengawasan selalu datang terlambat.

Buruh "Yang Lain"

Semua keluhan diatas tidak dirasakan oleh buruh yang lain, yang lebih senang menyebut diri "karyawan". Upah mereka saat pertama kali kerja sudah beberapa kali lipat diatas upah minimum regional. Mereka berpandangan positif, sangat menikmati hidup, selalu punya waktu untuk *refreshing* dan bersenang-senang. Berkat pertemanan yang luas melalui jejaring sosial, mereka giat membangun usaha bersama, mulai dari *trading*, tambang, perkebunan, properti, garmen hingga kuliner. Intinya, mereka membangun perusahaan mandiri dan membuka lapangan kerja tanpa mengganggu kebutuhan dapur mereka secara signifikan. Mereka buruh di suatu tempat, dan menjadi pengusaha di tempat lain.

Dunia kerja dan lingkungan pergaulan yang berbeda membuat lapisan buruh ini sulit memahami jalan pikiran buruh kebanyakan. Mereka heran, mengapa buruh (kerah biru) selalu berteriak-teriak menuntut ini itu? Bukankah Tuhan akan melimpahkan rezeki kepada mereka yang bekerja tekun dan penuh kesabaran? Bagi mereka, buruh tertindas bukan hanya dikarenakan orang lain, melainkan juga *mental block* buruh itu sendiri. "Itulah buah dari pendidikan dan skill minim yang mereka miliki" demikian sering dikatakan.⁷

⁷ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2010, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 7,14 % atau 8,3 juta orang dari total angkatan kerja 116,5 juta orang. Mayoritas pekerja

Dunia kerja adalah dunia penuh kompetisi. Perusahaan bukan lembaga sosial. Kita tidak mampu menyenangkan semua orang dengan mengorbankan laba dan masa depan perusahaan. Apalagi bila keributan ini disebabkan tuntutan segelintir buruh yang nilainya "tidak seberapa". Manajemen mudah mengganti buruh yang *mbalelo*. Berkas lamaran kerja sudah menumpuk di meja manajer HRD saban hari.

Mengapa buruh selalu berteriak-teriak menuntut ini itu? Sekarang buruh bekerja rata-rata 40 jam per minggu. Kondisinya jauh lebih baik dibandingkan masa lalu yang mana buruh bekerja di atas 10 jam per hari. Nah, kurang apa lagi? Mengapa kita tidak menerima nasib ini dengan hati lapang? Alih-alih menyuarakan ketidakadilan dalam praktik perburuhan, apakah aksi protes buruh merupakan ekspresi kedenggian terhadap kalangan mapan, ataukah ekspresi ketidakmampuan pada diri buruh sendiri? Apakah ini karena kita bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa?[]

di Indonesia adalah tamatan Sekolah Dasar sebesar 54,5 juta orang atau 50,38 %. Sedangkan pengangguran terbesar berasal dari tamatan perguruan tinggi, yaitu diploma (3 juta orang) dan sarjana (5,2 juta orang).

RINGKASAN:

1. Kelas buruh muncul sebagai efek dari perkembangan industri manufaktur dan perkebunan berskala besar. Buruh berpikir dalam bingkai perusahaan sehingga posisinya selalu lemah dan dependen. Jumlah buruh yang banyak tidak berpengaruh karena pola pikirnya selalu diarahkan menjadi personal.
2. Secara sistematis buruh dipisahkan dari komunitas masyarakat lain, dimulai dengan pemaknaan negatif istilah buruh, status kerja, praktik pengupahan, dan sistem perburuhan lainnya. Akibatnya, buruh cenderung miskin dan dimiskinkan.



APAPUN
GAYA MEREKA,
TETAP SAJA
MEREKA
BURUH....

John
Tanjung
2011.



Hegemoni budaya lahir karena mengakomodir dorongan-dorongan dimana selalu saja ada sekelompok manusia yang ingin menguasai manusia lain dan berupaya mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Mereka tidak membiarkan hak istimewa dan kapital mereka beralih kepada kelompok lain; lupa mereka pun buruh.



BAB 3 : BURUH TERHEGEMONI



BURUH TERHEGEMONI

Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs
La terre n'appartient qu'aux hommes
L'oisif ira loger ailleurs
Combien de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours.

Buruh, Tani, Kita semua
Himpunan Kaum Pekerja
Dunia milik kita
Penindasan akan enyah
Sudah banyak daging kita mereka makan
Bila gagal dan burung bangkai ini lenyap
Maka sejak hari ini matahari bersinar selamanya

(Internationale)¹

1. *Internationale* (*L'Internationale* dalam bahasa Perancis) adalah lagu paling terkenal dari kaum sosialis, komunis, sosial-demokratis dan anarkis. Kata-kata Prancis yang asli ditulis oleh Eugène Pottier (1816-1887) pada Juni 1871. Pierre De Geyter (1848-1932) menggubah puisi ini menjadi sebuah lagu pada tahun 1888 dan dipublikasikan pertama kali pada Juli 1888. Lagu ini telah diterjemahkan ke banyak bahasa dan dinyanyikan secara tradisional dengan tangan diangkat dalam memberi hormat kepalan tinju.

antonio Gramsci (1891 – 1937) filsuf Italia penggagas konsep hegemoni mengatakan, supremasi kelompok atau kelas sosial muncul dengan dua cara, yaitu: penindasan (koersif) serta kepemimpinan intelektual dan moral. Tujuannya, menaikkan posisi tawar sekaligus melemahkan perlawanan dan gugatan dari pihak struktur rendah. Hegemoni bisa dijalankan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun; tidak dimonopoli oleh satu kekuatan melainkan bergradasi dan menyebar ke struktur sosial lain.

Dengan suatu cara tertentu, pengusaha menilai diri mereka sendiri benar, wajar, dan sakral. Ia bekerjasama dengan penguasa yang memanfaatkan rantai birokrasi untuk mengendurkan perlawanan sekaligus menyedot energi masyarakat. Mereka tidak peduli berapa inefisiensi biaya akibat birokrasi yang panjang, asalkan tercipta stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu *conditio sine qua none*, syarat utama berjalannya industri. Untuk mereduksi perlawanan, selain menakut-nakuti gerakan buruh sebagai gerakan komunis dan anti pembangunan, pengusaha membangun sentra-sentra kegiatan dan komunitas, dimana aspirasi buruh tersalurkan dan akhirnya teredam dengan sendirinya.

Perusahaan menilai dirinya sebagai simbol kedaulatan sosial tertinggi, induk semang bagi segenap masyarakat secara langsung maupun tidak. Banyak masyarakat rela bekerja keras agar anak-anaknya dapat sekolah tinggi. Tujuan utamanya, dapat pekerjaan di perusahaan tersebut. Status keluarga seolah-olah meningkat apabila ada anggota keluarga mereka bekerja di sana. Perusahaan pun menganggap telah cukup memberikan bantuan kepada masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (program sosial perusahaan), yang tentu saja bersifat karikatif, sporadis, parsial, tidak berkelanjutan,

dan bahkan tidak memberdayakan apalagi meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitarnya.² Praktik hegemoni telah membiaskan wajah tunggal perusahaan yang murni berorientasi profit semata menjadi lembaga sosial kemanusiaan.

Serikat buruh di perusahaan dianggap cukup sebagai penampung aspirasi. Benar, jika pengurusnya aktif dan punya visi membangunkan kesadaran dan ekonomi buruh. Namun pada praktiknya, serikat hanyalah tempat *kongkow* segelintir elit buruh yang menghambur-hamburkan iuran anggota dengan tujuan yang tidak jelas, atau menjadikan posisinya di serikat sebagai *bargaining* dengan manajemen untuk mendapatkan promosi jabatan lebih cepat.

Amatilah demonstrasi buruh. Kalangan awam melihatnya sebagai perlawanan kaum sosialis untuk merebut hak-haknya, tetapi alam bawah sadar buruh pelaku demonstrasi itu mungkin berkata lain. Demonstrasi tiada lain ekspresi kebingungan, semacam krisis identitas dari sekelompok buruh. Ia ikut demo bukan karena pemahaman tentang hak-haknya yang harus diperjuangkan, tetapi lebih karena tidak enak hati kepada rekan-rekannya, ingin masuk televisi, ingin keluar dari rutinitas kerja, atau menuruti saja arahan pengurus organisasi. Alih-alih bereaksi negatif dan melakukan

- 2 Bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan kepada organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang dan sekitar lokasi perusahaan. CSR pada tataran ini hanya sekadar *do good* dan *to look good*, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori "perusahaan impresif", yang lebih mementingkan "tebar pesona" (promosi) ketimbang "tebar karya" (pemberdayaan). Kini banyak perusahaan melakukan pendekatan community development karena punya efek memberdayakan dan keberlanjutan yang lebih konkret. Prinsip-prinsip good corporate governance, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan program. Lihat Chairil N Siregar, "Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia", dalam *Sosioteknologi*, Edisi 12 Tahun 6/Desember 2007, hal. 285.

tindakan-tindakan intimidatif, pengusaha menggunakan aksi demonstrasi pekerjanya sebagai alat pencitraan bahwa perusahaan sangat akomodatif dan toleran terhadap aspirasi buruh. Lebih buruk lagi, buruh tidak menyadari demonya dipakai perusahaan sebagai perpanjangan tangan untuk menuntut pemerintah menurunkan pajak bahan baku demi menambah keuntungan, atau melepaskan kewajiban perusahaan untuk membayar iuran jaminan sosial.

Sedemikian rumitnya jejaring hegemoni dalam tingkat praktik. Di hadapan pengusaha, buruh objek hegemoni; di hadapan pengguna jalan, buruh pelaku hegemoni dan pembuat kemacetan. Di tengah-tengah keluarga, buruh dihegemoni atau menghegemoni istri-suaminya dengan menuntut ini dan itu. Di pasar, buruh dihegemoni pedagang yang memainkan timbangan karena katanya harga menjadi mahal akibat aksi demo buruh. Di pasar pula, pedagang dihegemoni petugas satpol pamongpraja dan preman lokal untuk sewa lahan. Sementara anggota satpol PP dan preman dihegemoni komandannya untuk membayar setoran. Atasannya pun dipaksa membiayai pendidikan anak-anak mereka ke perguruan tinggi bonafid dengan tujuan agar dapat bekerja di perusahaan besar. Perusahaan menyogok parlemen, penguasa dan aparat untuk memastikan kelangsungan usahanya. Lingkaran hegemoni seakan-akan menciptakan banyak penguasa. Tetapi pusat hegemoni dunia tetap berada pada kapitalisme yang mewujud dalam sosok perusahaan besar.

George Orwell menceritakan dengan menarik kerentanan penyelewengan kekuasaan akibat pergantian hegemoni dalam novel satirnya "*Animal Farm*" (1945). Hewan-hewan di peternakan melakukan kudeta karena menolak penindasan manusia yang kerap menyiksa dan memaksa hewan bekerja keras. Pemicunya adalah indoktrinasi Mayor Tua, seekor babi,

yang mendambakan dunia tanpa kelas. Lalu babi lainnya memimpin pemberontakan para hewan melawan manusia. Awalnya peternakan tanpa manusia berjalan dengan lancar, namun kemudian sesama babi bersaing mengambil kepemimpinan. Atas nama kepentingan kelompok kawanan babi memperoleh banyak hak istimewa dan mengontrol anggota peternakan lainnya dengan aturan kerja yang lebih ketat melalui peraturan tunggal, "Semua Hewan Adalah Sama, Tetapi Beberapa Binatang Adalah Lebih Sama Daripada Yang Lain".

Penggambaran tokoh-tokoh manusia dan hewan dalam novel ini sebenarnya mengkritik totalitarianisme. Orwell menyoroti tradisi penumbangan rezim oleh kaum tertindas yang ternyata hanya menghasilkan para penindas baru. Setiap aksi dan perubahan yang dikerjakan oleh buruh tanpa kesadaran dan pengetahuan hanya mengantarkan para babi (simbol binatang rakus) naik sebagai pemimpin dan meraih untung dengan mempraktikkan kembali hegemoni borjuasi manusia dalam sosok rezim diktator proletariat yang jauh lebih menyengsarakan.

Hegemoni Moral

"... When you find yourself having to make a difficult moral choice, your choice comes intuitively. One person automatically resorts to violence, another automatically resists violence. In the larger scheme this doesn't mark the difference between good and bad. It marks the stages of evolution that consciousness has always gone through and will continue to."

...Ketika anda dihadapkan pada sebuah pilihan moral yang sulit, pilihan anda muncul secara intuitif: apakah memilih kekerasan ataukah melawan kekerasan. Dalam tataran yang lebih luas, hal ini tidak menandai perbedaan antara baik dan buruk. Ia menandai tahapan-tahapan evolusi bahwa kesadaran senantiasa menembus dan terus berlanjut. (Deepak Chopra, *The Amoralty of the Free Market*)³

3 http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/deepak_chopra/2008/05/greed_as_higher_morality_the_g.html. 30 Mei 2011, 14:01 WIB.

Sebenarnya sudah ada dalam mentalitas kaum buruh tentang hak-hak mereka yang direnggut. Setelah berinteraksi sekian lama dengan masalah ketenagakerjaan, pilihan kita muncul secara intuitif: apakah berdamai dengan kekerasan ataukah melawan kekerasan.

Namun bagaimana kita akan bergerak melawan sistem yang hegemonik bila cara berpikir kita telah tersesatkan. Ketidakmampuan kita untuk berpikir epistemik menghasilkan kesimpulan yang melompat, "Mau bilang apa, sudah nasib orang kecil." Secara salah kaprah kita menggunakan alasan-alasan keagamaan sebagai pembenaran terhadap fakta tragis ini. Kita beralih, bila waktunya tiba, *toh* perlawanan akan muncul dengan sendirinya. Sistem ini adalah bagian dari takdir buruh, ajang untuk berlomba-lomba dalam kesabaran. Sistem ini bukan untuk dilawan, karena Tuhan telah menyiapkan ganjaran di akhirat untuk setiap perbuatan dan kesabaran manusia di dunia ini.

Kita lupa, perlawanan itu tidak hadir tiba-tiba, tidak kebetulan atau tanpa rencana.

Mereka berbicara tentang ujian Tuhan dan hikmah dibalik peristiwa, tapi sedikit dari agamawan yang berpikiran perubahan seperti Haji Misbah Pekalongan (1919) yang menggerakkan buruh batik untuk menentang pemerasan tenaga buruh atas nama persaingan harga. Sekarang ini sulit mencari agamawan yang memperjuangkan nasib buruh dan mendidik mereka untuk mengambil kembali hak-hak mereka yang dirampas pengusaha.

Ketertindasan, didesain sedemikian rupa sebagai takdir inheren buruh. "Buruh" dan "tertindas" merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, harus diterima dalam satu paket. Sayangnya para akademisi, politisi, juga pemuka agama membiarkan sesat pikir ini karena keawaman mereka terhadap

dunia perburuhan dan teori-teori sosial. Mereka memahami banyak hal tapi mereka bukan subjek buruh itu sendiri. Mereka memandang dunia perburuhan dari atas menara gading, berjarak dan tidak langsung mengalami. Mereka, menurut Gramsci, adalah orang-orang yang tidak mengorganik, tidak berakar dan dipupuk bersama objek yang mereka bicarakan.

Alih-alih menarik tangan buruh dari kubangan penindasan, kaum cerdik pandai itu memberi petunjuk tentang indahnya kebersamaan (bersama pengusaha), indahnya hidup sederhana (dengan gaji yang minim), dan indahnya kesabaran (ditindas terus menerus). Perusahaan berhasil membangun sistem industrial dengan sokongan kaum intelektual dan agamawan sehingga buruh tidak sadar tentang diri dan kelasnya.

Sejak pertama kali masuk kerja, pada diri buruh telah ditanamkan rasa hutang budi kepada perusahaan. Rasa syukur buruh diwujudkan dalam bentuk pengabaian atas hak-hak normatifnya. Segala bentuk aturan dimaknai sebagai konsekuensi yang mesti diterima dan dijalani. Alasan lazimnya, "... masih untung saya diterima bekerja di tempat ini." Tidak ada pelanggaran perusahaan semua kekeliruan dari buruh. Setiap saat buruh dituntut untuk bekerja produktif sesuai dengan subjektivitas pengusaha. Pada saat yang sama pengusaha tidak mau tahu bagaimana buruh bisa mencapai prestasi produktif tersebut. Di kalangan buruh sendiri, demi menghindari dari hukuman sekaligus menimba iba, tidak sedikit individu buruh mendekati atasan secara pribadi.

Buruh penjilat cenderung mementingkan diri sendiri. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan nasib rekan-rekan yang lain. Tentu saja manajemen sangat suka cita dengan moralitas buruh yang seperti ini. Dengan komunikasi *fait-ac-compli*, saling sikut diantara sesama buruh, mentalitas ingin berkuasa, manajemen tidak perlu mengeluarkan uang banyak

untuk mempraktikkan politik *divide et empera* (pecah-belah buruh lalu kuasai) karena buruh sendiri telah mempraktikkan moralitas buruk kaum tertindas. Ketika penindasan otot dan moral telah dipraktikkan kepada buruh, maka sistem industri yang kapitalistik ini semakin lengkap menghegemoni.

Hegemoni Bahasa

Secara sistematis kelas buruh disekat-sekat agar tidak ada solidaritas diantara mereka. Solidaritas akan menciptakan kekuatan massif. Sehingga hegemoni persuasif dimulai dengan penyebutan istilah buruh yang berbeda-beda, seperti “pekerja”, “karyawan”, dan “pegawai” untuk mengacu pada strata sosial tertentu. “Pekerja” atau “tenaga kerja” merupakan istilah umum dari buruh, pegawai dan karyawan. Sebutan “Buruh” untuk pekerja luar ruang (*outdoor*) yang banyak menggunakan tenaga fisik secara manual, menempati posisi paria dari kelas pekerja. Istilah “Karyawan” untuk pekerja dalam ruang (*indoor*) yang banyak menggunakan ketrampilan khusus/otak. Sedangkan “pegawai” adalah sebutan untuk pekerja (*ambtenaar*) di pemerintahan dan birokrasi. Buruh berasal dari rakyat (jelata) kebanyakan, karyawan berasal dari kelas menengah (relatif berpendidikan formal), dan pegawai biasanya dari kalangan ningrat atau masih terkait hubungan famili dengan pegawai di instansi tersebut (nepotisme).

Pada era Orde Soekarno, -rezim Soeharto menyebutnya Orde Lama-, sesuai dengan semangat zamannya yang penuh pergolakan politik ideologis, buruh dipandang faktor penting bagi kemenangan partai karena kemampuannya dalam memobilisasi massa. Sebutan “buruh” bagi kelas pekerja sudah hal lazim.⁴

4 Misalnya pencantuman “buruh” dalam UU Darurat No. 16 tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan *Perburuhan* yang kemudian diganti oleh UU No 22 Tahun 1957.

Pada awal kekuasaan Orde Soeharto, -yang mengklaim diri sebagai Orde Baru-, istilah “buruh” tidak dianggap masalah. Pendirian Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada 20 Februari 1973 membuktikan kenetralan pemerintah pada istilah tersebut. Delapan belas tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 Februari 1991, Presiden Soeharto meneguhkan hari kelahiran cikal bakal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ini sebagai Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) dalam Kepres No. 9 Tahun 1991. Penetapan ini nampaknya untuk memutus rantai solidaritas antara buruh Indonesia dan buruh internasional pada hari buruh sedunia 1 Mei.

Namun seiring perubahan politik global, semakin maraknya penanaman modal asing, dan kepentingan untuk menjaga stabilitas nasional, pemerintah berupaya agar gerakan buruh tidak menjelma sebagai kekuatan politik yang signifikan. Tak lama setelah diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja kabinet Pembangunan IV (Maret 1983), Sudomo mengusulkan penggantian istilah “buruh” dengan “karyawan”. Istilah karyawan menggantikan istilah buruh kontrak, buruh lepas (*anemeer*) menjadi tenaga kontrak atau karyawan lepas. Istilah serikat buruh juga diusulkan diganti menjadi serikat pekerja; sedangkan Hubungan Perburuhan Pancasila diubah menjadi Hubungan Industrial Pancasila. Menurutnya, “buruh” berkonotasi “penindasan”. Akibatnya, buruh cenderung menggunakan penentangan fisik kalau terjadi persoalan dengan pengusaha maupun pemerintah. Pada kongresnya di tahun 1985, FBSI berubah menjadi SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Dengan nama baru buruh sebagai “pekerja” atau “karyawan”, setiap konflik dengan perusahaan harus diselesaikan sesuai nilai-nilai Pancasila, artinya musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan pemaksaan dan/atau kekerasan. Semua pihak harus duduk bareng demi kepentingan bersama.

Yang terabaikan pada konsep ini adalah, bagaimana mungkin tercipta sebuah kemufakatan bila hubungan industrial yang berjalan selama ini dipenuhi dengan kekerasan sistemik.

Salah satu praktik represi bahasa yang lain adalah istilah "kartu kehadiran" dalam hubungan kerja formal. Secara sistematis, atau ketidaksengajaan akibat kesalahan logika dalam menyusun frase, majikan mewajibkan buruh untuk selalu mendokumentasikan bukti kerjanya pada kartu kehadiran. Sering disebut sebagai "kartu absensi". Padahal dalam bahasa Inggris, absensi (*absent*) berarti "tidak hadir". Dengan kata lain, majikan sudah berasumsi negatif bahwa kinerja buruh tidak sebanding dengan upah yang diterimanya karena buruh kerap "tidak hadir, tidak bekerja" daripada "hadir".

Seharusnya, istilah yang dipakai adalah "kartu presensi", nadanya positif dan semacam apresiasi atas kinerja buruh. Berapa kali buruh 'masuk kerja' (*present*) tentu punya konotasi lebih positif, tidak menghakimi, daripada kata buruh 'tidak masuk kerja' (*absent*). Melalui konsep absensi ini, buruh yang "tidak/lambat hadir" dikonotasikan "tidak bekerja" atau "tidak cakap bekerja". Sehingga keberadaan buruh yang (diper) kerja(kan) tiada lain disebabkan oleh rasa belas kasihan majikan. Upah bukan lagi konsekuensi keringat buruh yang terga-daikan, melainkan sekadar derma atau santunan. Wajar saja, nilai upah minimum selalu lebih rendah dari kebutuhan hidup buruh tersebut. Pada saat yang sama, tindakan kemurahan hati pengusaha dalam memberikan tambahan gaji, tunjangan lembur, kesehatan, bonus, THR, bila ditelusuri lebih dalam, bisa jadi merupakan hak-hak buruh yang ditahan.

Hegemoni Sosial

Tindakan-tindakan kita didasarkan atas pemahaman kita tentang realitas sosial, kenyataan keseharian. Pengingkaran

kita atas satu realitas sosial menjebloskan kita ke dalam realitas sosial yang lain. Pemaknaan kita terhadap satu realitas yang berbeda dengan orang kebanyakan dapat menggiring kita pada cibiran "pengkhayal", "pemimpi", "tidak realistis". Seorang buruh yang berpikir ingin maju di antara teman-temannya yang berpikiran "bisa kerja saja sudah cukup" akan dianggap aneh. Seorang aktivis buruh yang mengajarkan buruh untuk membela hak-haknya juga kerap dicemooh oleh sejawatnya yang lebih suka menjadi advokat korporasi. Perimbangannya sederhana: bekerja dengan yang "punya uang" lebih menguntungkan dan menjanjikan.

Inilah hal-hal yang terjadi dan harus diwaspadai. Setelah hegemoni moral yang sifatnya individual maka hegemoni yang lebih berbahaya adalah hegemoni sosial. Yaitu ketika seorang ditekan oleh sikap aneh, baik oleh musuh maupun teman-teman sejawatnya ketika mereka memperjuangkan hak-haknya. Lebih buruk lagi realitas "yang berbeda" dengan orang banyak ini diyakini oleh buruh sendiri sebagai bentuk penyimpangan sosial, sehingga banyak kita temukan aktivis buruh yang cepat melemah dan akhirnya menyerah kepada realitas "yang berbeda". Pada saat ia menyaksikan rekan-rekannya sesama aktivis sudah "jadi orang", duduk enak di kursi parlemen dan birokrasi, ia bisa beranggapan bahwa aktivitas pendampingan dan pendidikan yang ia lakukan selama ini bersama komunitas dan organisasi buruh merupakan sebuah aktivitas utopis yang tidak akan mengubah keadaan. Kataanya, "Zaman sudah berbeda." Padahal justru realitas yang dipercayai masyarakat yang belum tentu benar.

Realitas yang dibangun lewat konstruksi mental sosial perlu kita periksa kebenarannya. Contohnya adalah bagaimana penilaian orang terhadap "kemiskinan", yaitu suatu kondisi kekurangan harta, yang menyebabkan kebodohan, akibatnya

orang miskin tidak bisa berbagi dan membantu sesama, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lengkap. Mereka tidak melihat kemiskinan sebagai buruknya akses atau ditutupnya kesempatan finansial bagi orang miskin untuk menjadi maju.

Menjawab masalah ini, masyarakat menganggap menjadi kaya dari segi finansial adalah solusi dari semua problem hidup. Untuk memenuhi hal tersebut, buruh harus bekerja sekeras mungkin, hidup hemat dengan gaji yang kurang, rajin menabung apabila punya kelebihan, berinvestasi dan atau bergaul dengan orang kaya. Pilihan terakhirlah yang dianggap cerdas, mudah dan murah ketimbang memulai usaha dari nol atau bekerja keras.

Pengusaha seperti gula, dirubung banyak semut. Semut-semut itu bisa birokrat, pejabat sipil dan militer, dan orang-orang yang ingin bekerja dengannya. Pandangan sosial seperti ini yang menghadirkan hegemoni bentuk baru, sehingga kedudukan orang kaya dianggap sebagai berkah bagi negara. Padahal kita tahu justru karena telah mengambil hak-hak publik lebih banyak dari orang miskin maka orang menjadi kaya. Pengusahalah yang terbanyak mengambil sumber daya alam dan manusia, yang paling banyak menikmati hak-hak sosial seperti infrastruktur jalan, listrik, air, dan fasilitas sosial yang dibiayai dari pajak dan retribusi pedagang kaki lima dan buruh. Disebabkan alasan-alasan tersebut maka sudah sewajarnya para pekerja sebagai penyumbang mayoritas mendapatkan porsi mayoritas atau minimal porsi yang lebih baik.

Sangat sedikit dari kita yang memahami praktik hegemoni sosial sebagai kekeliruan, sehingga wajar jika saat ini korporasi masih mensubordinasi buruh-buruhnya dalam segala hal, karena banyak buruh yang bangga diri dapat bekerja di perusahaan yang dianggap sukses. Padahal sesukses apapun

perusahaan dalam sistem yang kapitalistik, mereka tetap pada credo yang efektif dan efisienlah yang memenangkan persaingan. Artinya mereka pulalah yang paling abai memenuhi hak-hak buruhnya juga mengembalikan hak-hak sosial yang telah mereka nikmati.

Berangkat dari sini maka hanya orang-orang tabah dan kuat yang siap berhadapan dengan konstruksi sosial hegemoni ini. Orang yang "berbeda" dan siap dianggap "gila" oleh kalangannya yang akan sukses mentransformasikan realitas yang mereka pahami dan hadapi kepada orang-orang yang berbeda pandangan dengannya. Orang-orang inilah yang nantinya akan menjadi penyambung lidah bagi masyarakat untuk menemukan realitas yang semestinya. Sehingga pemahaman dan sikap atas suatu realitas baru tadi akhirnya bukan lagi milik pribadi tertentu, melainkan milik banyak orang menggantikan realitas-realitas sosial yang keliru sebelumnya.

Hegemoni Budaya

"Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed.

Dunia ini cukup untuk semua orang, tapi tidak pernah memuaskan satu orang serakah. (*Mahatma Gandhi, 1869 – 1948*)⁵

Setiap orang ingin hidup sejahtera, cukup sandang, pangan, dan papan tapi tidak semua orang layak dan pantas untuk hidup seperti itu. Sedikit orang serakah itu paham sekali bagaimana menjadikan orang yang miskin tetap menjadi miskin, yaitu dengan membangun budaya kemiskinan. Kita dipahamkan bahwa kemiskinan selalu identik dengan kemalasan, yang artinya kemiskinan selalu dihubungkan dengan masalah personal akibat satu atau dua orang malas bekerja

5 http://thinkexist.com/quotation/earth_provides_enough_to_satisfy_every_man-s_need/181709.html. 1 Juni 2011. 11:00 Wib

ketimbang satu dua orang lainnya. Kemiskinan tidak pernah dianggap sebagai produk sosial atau konstruksi sistem yang kapitalistik.

Sering kita mendengar adagium seandainya semua uang orang-orang kaya sedunia ini dibagi-bagikan secara merata ke semua penduduk bumi, niscaya dalam beberapa tahun kemudian kondisinya akan kembali seperti semula. Yang kaya akan kembali kaya. Yang miskin akan tetap menjadi miskin. Adagium itu sebenarnya ada benarnya. Betul bahwa masalah kemiskinan bukan hanya terkait soal fisik rajin atau malas melainkan suatu sikap budaya. Kita sadari bahwa buruh sudah ditakdirkan untuk bekerja lebih lama ketimbang pekerjaan lain.

Namun nyata pula bahwa tidak ada jaminan kerja keras mereka akan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Yang jelas, majikan pasti senang dengan buruh yang bekerja giat sesuai peraturan perusahaan, tidak banyak menuntut, dan selalu memberikan kinerja terbaiknya. Demi menjamin adanya buruh-buruh yang bekerja giat semacam ini, perusahaan perlu membangun mentalitas budaya kerja. Hegemoni budaya kerja yang sering disebut dengan *corporate culture* dipampang besar-besar mulai dari gerbang pabrik: "Kami Siap Bekerja Keras, Efektif, Efisien, dan Jujur dalam Bekerja", atau "Kami Malu Jika Tidak Menjaga Mutu".⁶

6 Corporate culture atau budaya perusahaan atau budaya organisasi dipopulerkan pertama kali oleh Edward B Taylor, seorang antropolog, pada tahun 1871. Menurutnya, corporate culture adalah sekumpulan pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, kapabilitas dan kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu. Hasil studi Harvard Business School menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan yang mengelola budaya organisasinya dengan baik meningkat 682% sedangkan perusahaan yang biasa saja hanya meningkat 166%. Pendapatan bersih perusahaan yang memberi perhatian terhadap budaya organisasinya naik 756%

Disinilah letak perbedaannya. Pengusaha ditakdirkan berpikir efektif dan efisien untuk mempertahankan perusahaan, yang notabene memperkerjakan banyak buruh. Buruh ditakdirkan menikmati hasil kerjanya, namun tidak mesti dibagikan kepada buruh-buruh lainnya. Jargon-jargon *corporate culture* diaplikasikan dengan aneka stimulan; penghargaan bagi seksi yang berprestasi dalam bentuk hadiah paket wisata, persentase bonus, hingga promosi jabatan.

Secara perlahan, buruh memetakan dirinya dalam strata kelas tertentu. Operator berbeda dengan supervisor, divisi bongkar berbeda dengan divisi pemeliharaan, mandor berbeda dengan manajer. Satu sama lain menjadi asing, tidak saling kenal, dan cenderung saling kompetisi. Semakin besar kesenjangan tersebut, semakin tinggi rasa kepemilikan buruh terhadap tempat kerjanya. Seolah-olah perusahaan telah memberikan lebih banyak kesejahteraan daripada profit yang mereka peroleh dari buruh. Masing-masing divisi mendapatkan "wewenang" atau otonomi untuk bersaing lebih maju dari divisi lainnya melalui pertandingan olah raga atau penilaian produksi yang mereka hasilkan. Mereka menjadi bos-bos majemuk di lingkungannya sendiri, sehingga istilahnya mereka merasa menjadi "kopral yang lebih jenderal daripada jenderalannya sendiri". Mentalitas budaya seolah-olah ini cukup tepat menggambarkan hegemoni budaya melalui *corporate culture* yang sukses bereproduksi secara otomatis hingga struktur terbawah perusahaan.

Bagaimana memeriksa praktik hegemoni budaya ini, karena rupanya hal ini pun tidak sesederhana yang kita kira. Kenyataan berbicara lain dalam praktiknya hegemoni budaya lahir karena mengakomodir dorongan-dorongan dimana

dibandingkan hanya 1% bagi yang tidak. Harga saham perusahaan yang mengelola budayanya melambung 901%, sementara yang tidak mengelola dengan baik hanya 74%.

selalu saja ada sekelompok manusia yang ingin menguasai manusia lain dan berupaya mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Mereka tidak membiarkan hak istimewa dan kapital mereka beralih kepada kelompok lain; lupa mereka pun buruh. Praktik akomodatif ini seirama dengan kehendak perusahaan untuk memecah belah soliditas buruh. Mulai dari pendekatan persuasif, penawaran hadiah, uang, promosi jabatan kepada tokoh buruh, hingga kampanye busuk kepada antar buruh agar saling curiga.

Demi menghindari pergolakan yang merusak citra dan mengurangi laba perusahaan, pihak manajemen menyediakan ruang pelepas stres dengan membangun berbagai sarana kesenian, olahraga, hingga program rekreasi karyawan dan keluarganya (*family gathering*). Misi tunggalnya, menumbuhkan rasa sayang dan toleran yang tinggi terhadap perusahaan. Bila masih ada ketidakpuasan atau bentuk protes yang lain, manajemen melokalisir isu sebagai problem pribadi, bukan problem sosial. Ketika ada aksi demonstrasi menuntut perbaikan sistem, perusahaan menyasati dengan cara lain. Alih-alih menolak mentah-mentah tuntutan buruh, pihak manajemen mendukung aksi tersebut dengan memberikan fasilitas dan bantuan keuangan agar demo tersebut kelihatan menarik dan tidak anarkis. Pada titik inilah perusahaan berhasil memandulkan gerakan buruh menjadi gerakan demokrasi ala korporasi.

Hegemoni Politik

Hubungan Industrial Pancasila merupakan salah satu slogan hegemoni politik rezim Soeharto dalam upayanya mengontrol gerakan buruh. Pada tataran idealnya, Hubungan Industrial Pancasila merupakan semangat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pelakunya adalah pengu-

saha, buruh, dan pemerintah. Pada masa Orde Lama, sistem ketenagakerjaan didominasi kegiatan sosial politik yang kental. Tidak hanya ramai dengan perdebatan ideologis, namun juga menorehkan pengalaman traumatik. Kehidupan sosial ekonomi kita terbengkalai.

Orde Baru tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Pembangunan harus dipercepat di segala bidang. Untuk itu harus tercipta stabilitas nasional dalam sektor produksi barang dan jasa. Tafsir tunggal 'stabilitas politik' adalah dengan mengeluarkan 5 paket UU Politik pada tahun 1973. Isinya adalah masalah penyederhanaan partai politik dan organisasi massa melalui azas tunggal Pancasila. Organisasi pekerja disatukan dalam wadah Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada 20 Februari 1973. Pada Desember 1974, seminar nasional yang dihadiri wakil dari serikat buruh, pengusaha, pemerintah dan akademisi melahirkan konsensus tentang Hubungan Industrial Pancasila.

Karakteristik utama Hubungan Industrial Pancasila adalah kerjasama buruh dan pengusaha dalam menyukseskan pembangunan. Tugas buruh adalah meningkatkan produksi dan produktifitas kerja, sehingga menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban dalam bekerja. Buruh juga wajib menciptakan ketenangan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Timbal baliknya, pengusaha wajib meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengusaha juga wajib menghormati buruh sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Sayangnya, pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila jauh panggang dari api, baik itu era Orde Baru, termasuk pada era Reformasi ini. Upah buruh dipermainkan, PKB diabaikan, kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diintervensi. Bagaimanakah UU Ketenagakerjaan? Dokumen mulia ini bahkan tidak bisa apa-apa ditengah praktik kerja

kontrak dan borongan (outsourcing) yang merajalela. Saat buruh hendak menjalankan haknya untuk berunding tentang upah layak, kondisi tempat kerja, standar K3, jaminan sosial, dan status “kemitraan” yang tidak jelas; itikad baik ini diberi stigma buruk: tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia, dan tentu saja, berbau komunis. Semua masalah harus diselesaikan dalam bentuk musyawarah mufakat, dalam perspektif tunggal pengusaha.

Lalu, siapakah yang sebenarnya anti Pancasila? Siapakah sesungguhnya musuh nyata bangsa Indonesia?

Menggilir Hegemoni?

“Nobody can hurt me without my permission.”

Tidak ada yang bisa menyakitiku tanpa izinku

*(Mahatma Gandhi)*⁷

Titik puncak penghisapan adalah perlawanan kaum tertindas melawan kelas penindas. Binatang saja menggigit bila disakiti, apalagi manusia. Pandangan antitesa semacam ini sudah menjadi jargon kaum sosialis dan komunis sejak dua ratus tahun lampau. Praktik boikot yang mula-mula dilakukan buruh kereta api di Inggris dengan melepaskan engsel-engsel penghubung rel kereta mampu melumpuhkan industri disana dan mengundang gerakan yang sama di Indonesia pada tahun 1926.

Menyulut kerusuhan sosial bukanlah pekerjaan sulit, apalagi mengajak kaum tertindas yang sakit hati, jiwa dan raga. Sebagian besar orang miskin yang kelaparan rela menyerbu toko makanan. Mereka hanya punya dua pilihan: makan atau mati. Mereka melawan pemilik modal dengan se-

7 http://thinkexist.com/quotation/nobody_can_hurt_me_without_my_permission/215192.html. 2 Juni 2011, 08:06 WIB.

penuh hati, dengan segenap kebencian dan selaksa sumpah serapah. Masalahnya setelah semua agitasi dan propaganda semua itu terjadi, lalu kita mau apa?

Ketika dominasi majikan diruntuhkan, berkuasalah kaum buruh. Dengan jargonnya "dari buruh oleh buruh untuk buruh" dan buruh berkuasa niscaya akan menaikkan harkat dan martabat kaum proletar. Di tangan kaum tertindas, kekuasaan milik rakyat dan akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Begitulah slogan, pada awalnya. Benarkah? Sejarah membuktikan kebalikannya, Revolusi Bolshevik di Rusia yang menumbangkan kekaisaran Tsar berujung pada kemenangan kaum pekerja hanya melahirkan diktatorial proletar dibawah Lenin dan Stalin. Diktatorial yang menimbulkan perang antar kaum buruh Finlandia dengan buruh Rusia (1921 dan 1939), Buruh Prancis dengan buruh Jerman. Demikian pula praktik-praktik partai buruh di Inggris dan Eropa lainnya, mereka pada dasarnya hanya menjalankan bentuk kediktatoran modal atas nama kaum buruh.

Kenapa hal ini terjadi? Pertama-tama perlu kita pahami, perilaku seseorang adaptif terhadap situasi dan kondisinya. Kaum proletar berteriak anti kemapanan karena mereka belum mencicipi hidup mapan dengan kekuasaan dan harta berlimpah. Setelah mereka merebut singgasana kaum borjuis, perilaku mereka pun tidak ubahnya seperti kelas yang mereka runtuhkan itu. Jadilah pemerintahan diktator proletariat yang hanya mengakomodir segelintir orang-orang yang merasa paling berjasa dalam perjuangan buruh. Kadangkala mereka memobilisasi dan mengatasnamakan rakyat. Namun rakyat yang mereka pimpin kemudian dibentuk untuk tidak naik pangkat menjadi pemimpin seperti mereka.

Revolusi tanpa batas membuat mereka menggunakan hukum semauanya dan mengenyampingkan hak-hak asasi

manusia. Kata sejarawan Inggris Lord Acton (1834-1902), *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.”* Kekuasaan cenderung korup, apalagi bila tidak ada pengawasan karena euforia sistem baru. Seorang demokrat saat masih di pinggir kekuasaan bisa berubah menjadi otoriter setelah meraih kursi. Artinya, perubahan kelas tidak menandakan berakhirnya ritus penindasan.

Bebas hegemoni

Menghilangkan hegemoni tidak bisa dengan mengemis belas kasihan. Tidak ada pelaku hegemoni yang sudi melepaskan kekangan hegemoninya. Apalagi bila ia telah banyak berinvestasi untuk meraih posisi demikian. Membongkar segala hal yang mentradisi, mapan dan baku perlu sebuah keberanian serta dasar bagi suatu perubahan yang lebih besar. Apalagi ketika ia berhubungan dengan sistem dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Bagi buruh, membongkar sistem hegemoni mengacu pada sistem dan budaya perusahaan. Penindasan yang berlangsung terus menerus membuat buruh menjadi imun pada perubahan. Mental buruh rusak oleh bayangan kerisauan dan ketakutan dijauhan perusahaan. Mereka lebih mendamba disakiti daripada dilepas sama sekali dari perusahaan.

Tali penindasan akan mengendur bila buruh membongkar segala sakralitas budaya yang tidak mempunyai argumen yang kuat. Pembongkaran ini harus diawali dengan menaikkan terlebih dahulu posisi tawar buruh *vis-a-vis* perusahaan dalam hal soliditas organisasi dan ideologi. Buruh harus yakin, bahwa akumulasi massa ideologis yang terorganisir adalah perlawanan terbaik melawan hegemoni modal pengusaha bersama antek-anteknya.

Buruh harus membongkar sindrom inferior yang berasal dari alam bawah sadar materialistiknya. Perusahaan biasanya tampil pongah dengan memamerkan segala kemewahan duniawi untuk menjatuhkan semangat juang elit buruh. Disinilah kita perlu mengukur seberapa besar keyakinan elit buruh bahwa sikap pongah perusahaan hakikatnya berdiri diatas bangunan yang rapuh? Seberapa besar keyakinan aktivis buruh bahwa didalam seluruh aset perusahaan hakikatnya tersimpan butiran-butiran keringat buruh? Seberapa besar keyakinan segenap pengurus serikat bahwa kemakmuran pengusaha adalah hak buruh yang dirampas? Hanya dengan kekuatan keyakinan dan ideologi yang kuat dengan dukungan serikat yang solid, maka buruh tidak silau oleh penawaran segala fasilitas dan sogokan.

Apabila tidak terjadi perubahan sedikit pun dari cara pandang dan aksi maka kita harus berlapang dada menyadari bahwa kita masih **terhegemoni oleh alam bawah sadar materialis**. Kita harus mengakui bahwa kita ini buruh kapitalis dan praktik hegemoni yang menyusahkan kita terjadi karena persetujuan kita atas penindasan yang kita alami.[]

RINGKASAN:

1. Hegemoni adalah praktik dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam masyarakat melalui kekuasaan, bukan sekadar kekuatan fisik untuk memaksakan tujuan politiknya namun juga dalam bentuk persetujuan yang ditindas.
2. Melalui kekuatan modalnya, pengusaha menghegemoni buruh sejak buruh bekerja pertama kali. Didalam mental buruh ditanami rasa hutang budi dan minder setiap berhadapan dengan perusahaan. Buruh terus dihegemoni dalam kehidupan sosial dan budayanya, melalui pengawasan anggota masyarakat yang secara tidak sadar menjadi perpanjangan tangan pengusaha.

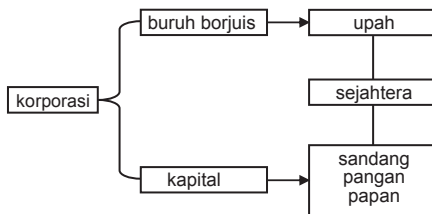




Persaingan bebas membuat setiap orang kreatif menciptakan terobosan-terobosan bisnis, menantang siapa pun untuk uji nyali, keluar dari zona nyaman. Bila kita tidak berani menanggung risiko, cukuplah jadi buruh sebaik mungkin dengan memberikan nilai tambah sebesar mungkin kepada perusahaan.



BAB 4 : BURUH BORJUIS



BURUH BORJUIS

“In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality.”

Dalam masyarakat borjuis,¹ modal itu mandiri dan punya kepribadian, sementara orang hidup bergantung dan tidak punya kepribadian.

(Karl Marx, 1818-1883)

Siapakah musuh buruh yang sesungguhnya?

Serikat buruh mendoktrin anggota-anggotanya untuk memusuhi kapitalisme.² Mereka menghujat kapitalisme

- 1 Borjuis (dari bahasa Perancis, yang berarti “penghuni-kota”) adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal/ alat produksi dan perilaku yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas pedagang, dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Hal ini dibedakan dari kelas sosial yang kekuasaannya didapat dari lahir di dalam sebuah keluarga aristokrat pemilik tanah yang bergelar, yang diberikan hak feodal istimewa oleh raja. Kaum borjuis muncul dari kelas-kelas orang kaya di perkotaan di masa pra dan awal masyarakat kapitalis.
- 2 Kapitalisme adalah suatu paham yang menekankan peran kapital (modal) untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan

sebagai biang kerok kesenjangan yang parah antara buruh dan alat produksinya, penyebab orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Ada selisih biaya dan keuntungan yang tidak wajar yang dinikmati oleh pemilik modal dari produksi dan distribusi barang dan jasa. Mereka meraup laba berlipat ganda tanpa keringat satu tetes pun. Laba mendatangi pengusaha setiap saat, dalam kondisi terjaga ataupun tertidur. Mereka telah membuat sistem dan mesin uang yang bekerja tanpa perlu pengawasan langsung pengusaha. Bukan mereka yang mengejar uang, justru uanglah yang mengejar mereka. Mereka menamakan cara kerja ini sebagai “kerja cerdas”, bukan “kerja keras”. Kerja cerdas adalah suatu kondisi dimana orang bekerja untuk kesejahteraan kita yang selisihnya digunakan untuk melipatgandakan hasil pekerjaan orang tersebut. Sedangkan kerja keras adalah orang yang terkondisi bekerja untuk kesejahteraan orang lain untuk mendapatkan selisihnya dalam bentuk upah yang nilainya hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup. Semua pengusaha kerja cerdas, semua buruh kerja keras.

Demikianlah doktrin anti-kapitalisme didendangkan bertalu-talu oleh kelompok serikat buruh radikal. Sampai-sampai dikatakan bahwa kapitalisme dunia telah membunuh banyak orang setiap hari ketimbang yang Adolf Hitler perbuat. Hingga pada satu titik mereka membenci kalangan mapan dan berkecukupan dari sisi materi. Dalam kacamata mereka, setiap orang yang mapan pasti kapitalis.

Masalahnya, memusuhi sesuatu tanpa mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana sesuatu itu sungguh berbahaya. Selain karena kita tidak mengetahui siapa yang kita hadapi sesungguhnya, kita juga sangat mungkin berpikir dan bertin-pribadi. Kapitalisme lebih dari sekadar sistem perekonomian; ia merupakan bagian dari gerakan individualisme dan liberalisme ekonomi.

dak sebagaimana yang musuh praktikkan. Ketidaktahuan kita tentang hakikat kapitalisme dapat menjebloskan kita pada lubang kapitalisme itu sendiri. Dipermukaan, seolah-olah kita memusuhi kapitalisme dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati. Segala teori dan simbol budayanya kita bantai. Namun, jangan-jangan, setelah sel-sel pikiran kita diurai satu persatu, kitalah pendukung kapitalisme yang sejati.

Kapitalisme terkait erat dengan konsep awal manusia dan pekerjaannya bahwa bekerja dan memiliki secara pribadi hasil dari pekerjaan tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia. Pada saat yang sama kita menyadari bahwa usia, kesehatan, dan kemampuan fisik kita terbatas. Kita tidak mungkin bekerja terus menerus sepanjang hayat. Demi menghindari kejadian tak terduga yang membutuhkan biaya besar, kita menyisihkan sebagian penghasilan kita ke tabung-an dan menginvestasikan sebagian yang lain. Tidak ada manusia yang tidak ingin hidup sejahtera. Setidaknya berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Sebagaimana definisi kaya menurut motivator Anthony Robbins, "Mengeluarkan lebih sedikit daripada yang diterima dan menginvestasikan selisihnya; lalu menginvestasikan kembali hasilnya untuk pertumbuhan bunga berbunga hingga mencapai jumlah yang massif; investasi yang massif inilah yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang kita inginkan."³

Efektif dan Efisien

Kapitalisme lahir sejalan dengan lahirnya kota. Jauh sebelum adanya kota, pada masa abad pertengahan, masyarakat dunia umumnya bekerja di sektor agraris. Orang tinggal di desa-desa, memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berco-

3 Anthony Robbins, *Awaken The Giant Within*, Jakarta: Kharisma, 1992.

cok tanam, beternak atau melakukan sistem barter dengan desa lainnya apabila kebutuhan keseharian mereka tidak dapat dipenuhi komunitasnya. Mereka menjalankan sistem ekonomi *self-sufficient* yaitu ekonomi sekadar memenuhi kebutuhan konsumsinya sendiri.

Dalam sistem ekonomi agraris, tanah merupakan faktor produksi terpenting, jauh lebih penting daripada tenaga kerja. Benar jika untuk mengolah tanah membutuhkan orang yang mencangkul, membajak, menanam benih, atau mengalirkan air tetapi selebihnya orang tani akan menyerahkan semuanya pada alam sampai benih tumbuh dan siap dipanen. Kaum agraris terikat pada hukum-hukum determinisme alam. Mereka adalah orang yang menyukai harmoni, pasrah, menerima nasib, sabar, dan tidak menuntut banyak dari apa yang telah dihasilkan oleh alam. Sambil menunggu alam mengerjakan hasilnya kaum tani mengerjakan produk-produk kebutuhan tani dan rumah tangga dalam bentuk kriya-kriya. Semuanya dikerjakan dalam rangka menunggu panen, bukan karena memenuhi order. Dengan demikian kehidupan masyarakat desa selalu mewujudkan suasana tenang, *alon-alon*, nan damai.

Pada pihak lain, sistem ekonomi industrial membasiskan diri pada penyediaan modal dalam bentuk bunga (*interest*) dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham (deviden) yang kemudian mendorong pengembangan daya produksi dan kapital kedalam jumlah yang paling kolosal. Konsekuensi sistem ini melahirkan kredo: mereka yang bekerja mengelola modal dengan efisien dan efektif adalah pemenang persaingan. Kredo ini pun berlaku di sektor industrialisasi yang menyedot modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar seperti industri manufaktur dan jasa distribusi.

Membicarakan efisiensi dan efektivitas kerja tanpa mengorbankan bunga dan deviden pemilik modal adalah hal

yang sulit, sehingga pilihan yang paling “baik” bagi industri adalah mengorbankan kepentingan buruh, salah satu alat produksi yang memang menyedot modal dengan kuat. Berbeda dengan investor dan modalnya yang selalu dijamin oleh korporasi, negara, atau bank maka keberadaan buruh, sejak zaman perbudakan sampai tanam paksa, dari revolusi industri sampai revolusi informasi, adalah alat produksi yang paling rentan dari perlindungan karena sampai sekarang yang dihargai dari buruh hanyalah ototnya.

Semakin lama sistem ekonomi kapital bekerja secara efektif dan efisien, korporasi punya lebih banyak alasan untuk mengatakan mesin dan komputer, bukan tenaga manusia, sebagai alat produksi jauh lebih menguntungkan bagi kelangsungan perusahaan. Berangkat dari alasan ini korporasi mendesak pemerintah mengurangi perlindungan terhadap buruh dengan alasan persaingan usaha yang semakin ketat atau untuk menarik investasi luar. Hasilnya, undang-undang yang membolehkan adanya tenaga outsourcing semakin menyudutkan kedudukan buruh didalam sistem ekonomi kapitalis, ketimbang menaikkan status pekerja menjadi permanen yang artinya korporasi harus berpikir mengeluarkan biaya tambahan diluar ongkos produksi dalam bentuk tunjangan-tunjangan seperti dana kesehatan, jaminan hari tua dan pensiun. Buruh lebih baik diikat hanya sebagai tenaga lepas, yang kapan pun boleh dilepas perusahaan setelah tenaganya tidak lagi dibutuhkan.

Surat kabar *Economic Observer* menurunkan laporan tentang bagaimana produk-produk garmen mewah merahasiakan produksi outsource mereka di China untuk menjaga kepercayaan konsumen (4/9/10). Namun demikian, tenaga kerja murah dan transportasi di negara-negara berkembang masih merupakan godaan tak tertahankan. Mereka meng-

outsource produksinya ke luar negeri dan menutup informasi dengan menandatangani perjanjian rahasia dengan pabrikan kontrak mereka. Negara-negara di Asia, seperti China, Vietnam, dan Malaysia menjadi pilihan utama. Namun sebagai bagian dari strategi *branding*, label-label mewah tersebut tidak pernah menjual produk di negara asal pabrik tersebut. Bagi kebanyakan pabrikan kontrak itu sendiri, bekerja dengan label-label mewah cukup memberatkan, karena ketatnya standar mutu yang diminta.

Adakah pihak yang kita rugikan? Tidak ada. Tidak ada? Akumulasi dari modal massif kita jadikan perusahaan. Kita jalankan roda bisnis seefektif dan seefisien mungkin agar meraih laba. Efektif dari segi waktu dan efisien dari segi biaya produksi, termasuk upah buruh. Upah buruh tidak perlu besar karena itu pemborosan, kita sulit berkompetisi. Dengan upah yang minim pun buruh cukup produktif. Apalagi kini mencari pekerjaan demikian sulit. Kita orang yang praktis, hanya mengurus bisnis.

Sebagian besar staf kita kontrak selama dua tahun. Bila kinerjanya baik, kontraknya diperpanjang setelah mereka diistirahatkan dahulu di rumah. Bila kinerjanya jelek, kontrak tidak diperpanjang, dan kita segera mencari tenaga kerja baru. Untuk jenis pekerjaan tertentu, kita memakai tenaga *outsourcing*. Alasan umumnya, kita ingin menghemat tempat usaha dan tidak ribet mengurus masalah personal mereka. Bila telah berjalan dua tahun, sesuai ketentuan pemerintah, cukup nama jenis pekerjaan mereka saja yang diubah. Meskipun pekerjaannya masih di bidang yang sama. Maka buruh kontrak selama belasan tahun pun tidak mengapa, tidak meninggalkan masalah. Istirahatkan dulu, atau ubah status pekerjaannya. Beres.

Buruh tetap kita hanya beberapa tenaga administrasi.

Kita tidak ingin dipusingkan dengan pesangon, pensiun, dan segala tetek bengeknya. Bagi kita, itu biaya diluar urusan bisnis. Bolehlah sekadar uang bonus, hadiah atau ucapan terima kasih. Tentu perusahaan kita juga meniru pola pemasaran yang standar: fokus pada produk, membuat nilai tambah, mencari momentum yang tepat untuk menggelar dagangan, dan memperkuat *brand*.

Singkat cerita, perusahaan kita membesar. Kita mengakuisisi beberapa perusahaan sejenis yang bermodal cekak dan tidak pintar mengelola manajemen. Demi bersaing di tingkat global, kita kembangkan usaha dengan cara merger dengan perusahaan lain. Kita butuh tambahan modal dan manajemen yang solid untuk ekspansi. Banyak pihak yang tertarik dengan usaha kita, maka kita ciptakan pola waralaba (*franchise*). Pada saat yang sama kita juga tak berhenti untuk mencari tenaga kerja dan bahan baku murah namun tetap menjaga citra mewah produk-produk kita.

Ditengah kesibukan bisnis, kita tetap tunaikan kewajiban agama. Kita sisihkan sedikit laba untuk membantu lembaga sosial keagamaan dan menyantuni anak-anak yatim. Agama mengajarkan, Tuhan menyayangi hamba-Nya yang mencintai anak yatim. Tuhan menerima doa anak-anak yatim. Terbukti rezeki kita *moncer*. Lagipula, menderma atas nama perusahaan bagus untuk pencitraan publik. Kita tidak perlu tahu apakah ayah mereka meninggal karena beban kerja, kecelakaan kerja atau karena tidak ada tunjangan kesehatan yang memadai. Dengan beragam pengalaman ini, kita bisa meletakkan sengketa eksistensi antara buruh dan korporasi, sosialisme dan kapitalisme, secara proporsional. Jadi, apa yang salah dengan sistem ini?

Kapitalis Alamiah

“Historically and politically, the petit-bourgeois is the key to the century. The bourgeois and proletariat classes have become abstractions: the petite-bourgeoisie, in contrast, is everywhere, you can see it everywhere, even in the areas of the bourgeois and the proletariat, what’s left of them.”

Secara historis dan politis, borjuis-kecil adalah kunci bagi abad ini. Kelas proletar dan borjuis telah menjadi kontras. Borjuis-kecil ada dimana-mana. Anda bisa melihatnya dimana-mana. Bahkan dalam area-area borjuis dan proletar, apa saja yang tersisa dari mereka.

(Roland Barthes, 1915-1980)⁴

Menurut kita sebagai manusia borjuis, para pengkritik kapitalisme tidak melihat dengan bijak bahwa kapitalisme adalah hirarki puncak ekonomi manusia dari sebuah simbiosis manusia pekerja dengan pemilik modal. Alih-alih musuh kapitalisme, buruh adalah kelas terendah dalam sistem produksi yang sedang berproses menuju kelas kapitalis baru. Tiada perbedaan yang signifikan antara pengusaha dan buruhnya. Keduanya sama-sama mendambakan kesejahteraan. Hanya saja pengusaha mencapainya lebih dulu. Beberapa waktu kemudian akan disusul oleh buruh. Bukankah ini cuma masalah waktu?

Kesejahteraan adalah tujuan setiap manusia. Orang yang paling sejahtera adalah mereka yang berjuang lebih keras, giat, tekun, dan fokus sehingga ada nilai tambah dalam kinerjanya dan bisa membuat faktor kali dalam produksinya. Bandingkan dengan orang biasa yang merasa cukup dengan pekerjaannya. Ia bekerja seadanya sehingga memperoleh hasil sekadarnya. Bagi para petani subsisten, profit mengharuskan kerja tambahan, dan kerja tambahan berarti berkurangnya waktu untuk melakukan hal-hal lain, misalnya bersenang-

⁴ <http://quotationsbook.com/quote/6981/html>. 2 Juni 2011, 12:03 WIB.

senang dan bercengkrama dengan keluarga. Tapi itulah risiko yang harus dibayar: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; hidup prihatin dahulu, hidup senang kemudian.

Dengan penambahan jumlah penduduk dan sumber daya alam yang menipis, tentu orang-orang harus menyadari bahwa persaingan adalah hal yang wajar dan biasa. Tidak ada yang gratis di alam ini. Kalaupun ada, itu tidak membuat istimewa bagi siapa yang memperolehnya. Tidak ada pengetahuan dan kesadaran baru bagi yang menjalaninya.

Begitulah, setiap orang harus menempuh berbagai ujian agar tumbuh sebagai pribadi yang profesional dan mandiri. Ia harus mengelola perusahaan sehingga mampu bersaing di dunia usaha. Meskipun perusahaan itu adalah warisan orangtuanya. Pengusaha harus efektif agar bisnisnya bisa bertahan. Konsekuensinya, mereka harus mencari lingkungan yang lebih produktif, kompetitif, dan area yang lebih luas untuk beroperasi. Budaya kita mengajarkan, manusia yang se-benar-benarnya adalah ia yang teruji hidup di perantauan.

Bila kita kaya raya di daerah sendiri, itu tidak istimewa. Mungkin kita kaya sejak masih di kandungan. Mungkin kita sudah punya rumah sejak lahir. Itulah kekayaan yang dimusuhi kapitalisme. Kekayaan yang diperoleh tanpa persaingan bukanlah kekayaan yang sejati. Lihatlah pengusaha-pengusaha siluman di masa Orde Baru. Mereka tumbuh meraksasa murni karena fasilitas, bukan dari usaha dan tetesan keringat. Semuanya berkat ilmu aji mumpung, koncoisme, kolusi, dan nepotisme. Praktik monopoli yang dijaga oleh regulasi negara, sehingga harga menjadi irasional, bukanlah praktik ekonomi, tapi perampokan. Jadi pahamiilah, kejatuhan Suharto pada 21 Mei 1998 dilakukan sekaligus oleh kelompok sosialis dan kapitalis. Kaum sosialis anti Suharto karena perilaku rezim despotik tersebut. Sedangkan kaum kapitalis anti Suharto

karena membuka pasar dengan setengah hati. Kedua aliran yang berbeda ideologi dan tujuan politik ini dipertemukan oleh elemen-elemen mahasiswa dengan gerakan moralnya.

Kemerdekaan dan Kebebasan

Apa yang terjadi setelah reformasi dan globalisasi bersliweran didepan mata? Konglomerat gigantis di era Orde Suharto berjatuhan. Mereka tidak bisa bersaing dengan korporasi-korporasi lain yang bergerak lincah mendiversifikasi usaha dan mengontekstualisasi produk. Perlahan namun pasti, kiprah dan sosok mereka surut kebelakang. Mereka hanya jadi artefak Orde Suharto tentang nasib pengusaha karbitan. Kita, sebagai konsumen, merasakan keuntungan akibat dibukanya keran globalisasi. Dulu hanya orang kaya saja yang mampu naik pesawat terbang. Kini hampir semua orang bisa merasakan naik pesawat karena harga tiket yang murah meriah. Dulu hanya kalangan berduit saja yang bisa punya ponsel. Kini pedagang sayur keliling dan pengojek pun punya ponsel.

Jangan salahkan kapitalisme hanya karena ada yang gagal dalam berbisnis. Dalam sebuah kompleks perumahan, kita sering melihat rumah-rumah yang dijadikan warung atau toko. Setiap tempat usaha saling berebut pelanggan dengan menjual sentimen-sentimen etnik yang tidak ekonomis. Hanya karena mereka pribumi, mereka merasa berhak mengendalikan pusat perniagaan. Sedangkan kualitas barang dan harga di toko/warung rumahan tersebut tidak stabil, bahkan mungkin mencurigakan. Kenyataannya, konsumen mencari barang berkualitas dengan harga murah di tempat yang menyediakan segala keperluan. Dengan hanya membayar parkir, mereka sudah lebih dari sekadar belanja di hipermarket. Bahkan toko rumahan banyak berbelanja juga di hipermarket tersebut untuk kemudian dijual kembali secara eceran dengan

harga yang jauh lebih mahal.

Dalam melakukan usaha ekonomi yang sehat, ada dua kata kunci yang sebenarnya juga menjadi syarat awal sebuah kehidupan menyeluruh: kemerdekaan dan kebebasan. Kemerdekaan adalah sebuah kondisi dimana setiap orang memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tersebut dengan memperkecil kemungkinan campur tangan orang lain. Sedangkan kebebasan adalah sebuah kondisi nilai kita di mata orang lain, apakah ia memberikan sesuatu kepada kita dengan senang hati.

Sisi positif karakter individualisasi dalam diri kapitalisme adalah penciptaan lapangan pekerjaan, dinamisme, dan kesempatan bagi semua orang. Semua orang dibebaskan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Tidak ada arahan dan larangan kita kepada suatu pekerjaan tertentu. Bila sukses, itu karena kejelian dan kegigihan kita. Bila gagal, itu karena kita kalah momentum, kurang modal, atau salah manajemen. Jadi, sukses dan gagal adalah urusan dan tanggung jawab kita. Persaingan yang bebas membuat setiap orang kreatif menciptakan terobosan-terobosan bisnis. Dan ini terbuka bagi siapa pun untuk uji nyali, keluar dari zona nyaman (*comfort zone*). Bila kita tidak berani menanggung risiko, cukuplah jadi buruh sebaik mungkin dengan memberikan nilai tambah sebesar mungkin kepada perusahaan.

Dalam mekanisme pasar yang terbuka tanpa intervensi negara, tidak ada sesuatu yang luput dalam proses ekonomi. Dengan pasar sebagai pusat alokasi sumberdaya, manajemen mengalami peralihan dari sekadar fungsi penawaran ke permintaan dengan memasukkan kehidupan dan kebutuhan publik sebagai komoditas. Semua aspek kehidupan adalah sumber untuk laba korporasi. Karena usaha ekonomi mem-

butuhkan iklim yang baik berupa stabilitas politik, dengan sendirinya globalisasi ekonomi akan sejalan dengan proses globalisasi politik. Karena setiap orang mendambakan kesejahteraan dan *passive income*, dan politik hanyalah salah satu sarana mencapai hal tersebut, maka globalisasi ekonomi meninggalkan defisit demokrasi diantara keduanya: mengecilnya perbedaan ideologis dan menurunnya partisipasi demokratik.

Itulah yang sedang berlaku. Apakah kita berkeberatan dengan hal ini? Ditinjau dari sisi manapun, tidak ada kerugian dan kejahatan yang diperbuat perusahaan kita. Kita membayar pajak secara rutin sebagai bentuk balas budi karena diizinkan menjalankan usaha di negeri yang sedang berkembang ini. Sepertinya tidak ada yang salah. Seakan-akan, semua berjalan normal. Buruh bekerja keras untuk dapat hidup di hari tua dengan upah yang telah berkembang pada banyak lahan bisnis, baik secara perorangan maupun berkelompok. Buruh tersebut kemudian merekrut orang sebagai pegawainya dengan upah yang disisihkan dari segala macam pembiayaan dan laba. Usaha ini dapat berkembang dan menghasilkan unit-unit usaha lain; atau bangkrut dan meninggalkan hutang yang bertumpuk dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan yang lebih kuat modal dan modern. Bukankah hidup sejahtera adalah impian semua buruh?

Bila kita setuju dengan konsep di atas, nyatalah bahwa didalam diri seorang buruh terdapat makhluk borjuis kecil yang tidak berhenti hanya pada upah, melainkan terus berupaya mengakumulasi kapital. Dengan asupan ketamakan setiap hari, ia siap memangsa tubuh buruh itu sendiri. []

RINGKASAN:

1. Kapitalisme dihujat karena dinilai mengeksploitasi kaum buruh. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kapitalisme adalah lebih dari sebuah sistem ekonomi yang dapat juga bertengger dalam benak buruh tersebut.
2. Ketika buruh menjalankan sistem sosial-ekonomi yang berorientasi profit sebesar-besarnya tanpa mengindahkan tetesan kesejahteraan kepada pegawainya, maka sesungguhnya ia telah masuk dalam lubang kapitalisme, meskipun yang diproduksi adalah barang-barang berlabel anti-kapitalisme atau sebagian keuntungannya di-dermakan untuk kegiatan sosial.



John Tanjung 2011



Buruh menukar tenaganya dengan upah yang kemudian ditukar kembali dalam bentuk barang konsumsi. Nilai upah disetarakan dengan akumulasi kuantitas pekerjaan buruh dalam satu waktu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, yang besarnya sesuai upah minimum yang dilegalisir pemerintah.



NILAI LEBIH BURUH

“Labor is prior to, and independent of, capital. Capital is only the fruit of labor, and could never have existed if labor had not first existed. Labor is the superior of capital, and deserves much the higher consideration.”

Pekerja lebih dulu ada dan tidak tergantung pada kapital. Kapital hanya buah dari pekerja, dan tidak akan pernah bisa eksis jika pekerja tidak eksis lebih dahulu. Pekerja itu lebih utama dari kapital, dan pantas menerima perhatian lebih besar.

(Abraham Lincoln)¹

Mengapa buruh selalu tertindas? Ada apa dengan kapitalisme dan dimanakah posisi buruh dalam sistem itu? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini sebenarnya bukan monopoli kaum buruh saja, tetapi juga akademisi, aktivis, dan mereka yang bekerja di sektor industri semacam Usaha Kecil Menengah. Pertanyaan ini menyentuh lebih dari sekadar teori, sebab jika hanya teori, bagaimana mungkin ratusan tahun praktik kapitalisasi terhadap buruh sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi buruh untuk mengubah nasibnya, bahkan

1 <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/abrahamlin395631.html>.
2 Juni 2011, 13:47 WIB.

sistem penindasan ini mengendap dalam alam bawah sadar setiap orang.

Seorang buruh perkebunan sawit di Binjai yang sudah tiga keturunan dari generasi Djakon (Djawa Kontrak) mengatakan tidak berpikir untuk kembali dan menjalankan usaha ke Jawa, sebab harga tanah sudah mahal, ongkos juga mahal. Ia merasa lebih enak bekerja di perkebunan, tidak usah memikirkan iuran sekolah anak-anaknya. Sebagian dari mereka malah menganggap kerja sebagai karyawan harian lepas, sebutan untuk buruh PTPN, adalah salah satu bentuk aktualisasi diri dengan harapan memperoleh keamanan ekonomi dan sedikit memiliki legitimasi sosial di lingkungan warga sebagai ketua panitia Hari Kemerdekaan. Sebagian mengatakan menjadi buruh PTPN lebih dihargai kalau pinjam uang ke bank atau menjadi anggota partai politik.

Keinginan-keinginan dan pseudo hasrat dari dalam diri buruh sendiri yang rupanya menjadi salah satu alasan, mengapa praktik kapitalisme mudah mengendap dan diterima begitu saja. Dalam hal ini eksploitasi hasrat dalam diri seseorang sebenarnya mengarahkannya kepada kecenderungan kapitalis daripada sisi sosialisnya. Inilah yang membuat kapitalisme mampu bertahan dan menghegemoni peradaban global.

Kepemilikan Pribadi dan Ekonomi Kota

Pada zaman dahulu orang bekerja dan memproduksi sesuai dengan kecakapan dan kebutuhannya dan menjadi miliknya secara pribadi. Ekonomi semacam ini pernah kita bahas sebagai bentuk ekonomi mandiri (*self-sufficient*) dan ekonomi swa-konsumsi (*self-consumption*), dimana orang memproduksi dan mengkonsumsi sesuai dengan keadaan alam dan

kebutuhan sehari-hari saja. Dalam sistem ekonomi ini, faktor alam adalah faktor utama dari alat produksi. Alam melanjutkan proses awal yang dilakukan oleh manusia, sehingga orang-orang dahulu atau di desa menyukai hidup harmoni dengan alam, dan tidak sedikitpun berkeinginan mengeksploitasi alam lebih dari apa yang dibutuhkannya.

Pada ekonomi desa, proses yang dilakukan dalam pertukaran antara produk alam dengan produk kerajinan dilakukan dengan model barter. Nilai tenaga yang dikeluarkan setara dengan barang atau jasa yang dihasilkan yang kemudian dipertukarkan sebagai barang konsumsi (bukan barang komoditi). Dalam sistem ini, tidak ada dominasi kelas sosial satu atas kelas sosial lainnya. Pembagian kelas sosial terjadi di wilayah yang disepakati seperti pemuka agama, pemuka adat, dan khalayak atau orang kebanyakan.

Kepemilikan pribadi dalam sistem ini adalah pengakuan sosial kepada seseorang atas suatu hasil alam yang diperolehnya dengan suatu usaha dan atau sesuatu yang melekat pada dirinya dan bisa dipergunakan secara subjektif. Ikan yang kita pancing, padi yang kita tanam, buah yang kita petik, kapas yang kita tenun, semuanya adalah milik kita secara pribadi karena hubungan produksi langsung antara kita dan alam. Selama tidak ada kaitan produksi antara manusia dengan sumber alam maka manusia tidak boleh mengklaimnya sebagai miliknya secara sepihak.

Secara alamiah manusia memberi batasan sosial mana yang memang milik mereka secara pribadi dan mana yang milik umum. Dahan dan buah yang menjuntai ke pekarangan tetangga adalah miliknya meskipun pohon itu milik kita. Pada konteks ini, pagar halaman adalah pembatas wilayah privat dan publik. Kontrak sosial ini terjalin sejak setiap orang bersepakat menjalin kerjasama sosial, membatasi wilayah privat

dan publik masing-masing anggota masyarakat, baik itu hubungan formal dalam hal distribusi kerja hingga ke hubungan personal yang lebih dalam, misalnya ikatan perkawinan.

Tapi tidak semua orang mampu bekerja dan memproduksi. Mereka tidak berarti malas. Anak kecil, perempuan hamil, penyandang cacat fisik dan mental, orang sakit dan jompo tidak dikenai tanggung jawab tersebut. Bahkan mereka berhak ditanggung, dirawat dan memperoleh makanan dari sebagian penghasilan dari pekerjaan orang-orang yang lebih muda, kuat dan sehat. Penyisihan pendapatan adalah balas budi atas perbuatan baik yang telah mereka lakukan kepada kita pada masa lalunya, atau tindakan kemanusiaan yang dinamakan derma (sedekah) dan untuk sistem kemasyarakatan yang sudah baik kita sebut dana sosial atau pajak.

Kepemilikan pribadi baru membuahkan persoalan ketika suatu barang hasil alam diklaim lebih dari satu pihak, karena aktivitas produksi yang tidak diakui atau tidak jelas akad dan peruntukannya atau diserobot/dirampas orang lain. Namun, solusi atas sengketa tersebut tidak berarti penghapusan kepemilikan pribadi. Sejak awal sejarah manusia, kepemilikan pribadi sudah ada dan sangat dihargai, namun juga tidak menafikan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama kepada orang-orang yang lemah.

Ketika ekonomi jenis ini bertemu dengan ekonomi kota maka harmoni yang sebelumnya dipegang teguh mulai terganggu. Ekonomi kota tidak lagi mendasarkan gerak produksinya atas dasar kebutuhan konsumsi dasar namun juga berdasarkan "order." Sistem order ini yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk spesialisasi pekerjaan, kerja borongan, kerja shift, dan kerja eksploitasi alam. Sistem ini memperkenalkan rantai panjang produksi-produksi (*production chain*), sehingga yang menjadi penting bukan lagi kerja alam, melainkan

kerja orang. Kerja orang dinilai dengan uang. Uang memainkan peran penting sebagai alat tukar barang produksi dimana yang punya uang adalah yang paling mampu menguasai faktor-faktor produksi.

Disini kita lihat cukup jelas perbedaan besar dari cara pandang ekonomi desa yang mewakili masa lalu yang akrab dengan alam, tata adat, pengakuan kepemilikan pribadi, dan aturan-aturan sakral lainnya. Sementara ekonomi kota yang mewakili masa kini dan masa depan yang akrab dengan tenaga kerja, menihilkan pembagian sosial masyarakat yang berdasarkan pembagian tugas sosial. Aksesibilitas setiap orang untuk mengambil manfaat dari alam dan hak sosial dalam memanfaatkan keuntungan bagi komunitasnya diubah menjadi pembagian berdasarkan kepemilikan modal (*investasi*) dan bagi keuntungan (*deviden*). Pembagian ini menggeser kepemilikan pribadi dan sosial menjadi kepemilikan investor dan pemegang saham. Peralihan ekonomi berbasis harmoni ke ekonomi persaingan yang kemudian melahirkan relasi baru para pemilik uang dan kekuasaan; kaum borjuis dan feodal.

Kelahiran kaum Feodal

Kehidupan harmonis itu tidak berlangsung lama. Suatu kaum lebih banyak menguasai lahan daripada yang lain, hingga satu kondisi tidak semua pihak memperoleh lahan yang sama produktifnya dan menguasai banyak lahan. Sebagian yang tidak betah segera pindah mencari lahan baru yang lebih subur. Sebagian yang lain menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Secara perlahan tuan tanah menanggung untung karena mereka dapat memutar kembali hasil produksi untuk membeli lahan milik petani kecil lain yang menjual lahannya karena terdesak kebutuhan pribadi, misalnya untuk berobat, membeli barang berharga,

menikahkan anak, modal berdagang, dll. Barang konsumsi berubah menjadi barang komoditi.

Tuan tanah yang kini digelar bangsawan, mulai membangun simbol-simbol kemewahan dalam bentuk nama dan gelar keningratan dan bangunan berupa puri (*castle*). Diantara mereka yang paling berpengaruh dijadikan pemimpin dan memperoleh harta atau produk surplus dari penyewaan lahan, upeti dari bangsa-bangsa taklukan, dan sentra-sentra bisnis. Sebagian warga bekerja di lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan mereka dengan aset yang tidak seberapa. Sebagian yang lain menjadi petani penggarap karena sudah melego tanahnya. Yang lain ikut majikan mereka mengarungi samudera mencari sumber daya alam baru. Diantara mereka ada yang berprofesi sebagai tentara, yaitu penjaga keamanan dan ketertiban dengan imbalan upah.

Untuk memperkuat komunitas dan menghindari pertumpahan darah, kaum bangsawan berbagi kekuasaan dengan memilih salah satu dari mereka sebagai kepala pemerintahan berdasarkan geneologi. Pemimpinnya disebut raja, wilayahnya disebut kerajaan atau monarki. Rezim tertentu menciptakan hikayat tentang raja sebagai jelmaan Tuhan di bumi dengan dukungan pendeta berikut (tafsir) teks-teks keagamaannya. Titah raja adalah undang-undang dan semua perundang-undangan berubah bila bertentangan dengan kehendaknya. Posisi raja memang satu orang, tapi kaum bangsawan yang lain mendapatkan posisi terhormat dalam hirarki kerajaan. Sebagian keluarga mendapat jatah pemimpin di daerah lain dalam wilayah kerajaan (gubernur), sebagian menjadi raja di wilayah lain yang lebih kecil. Lambat laun, wewenang raja yang besar dan luas menyilaukan kalangan dekat kerajaan. Terutama yang terikat darah namun tidak cipratan kekuasaan yang besar. Makar berdarah merupakan

fenomena umum di kalangan internal kerajaan.

Kelahiran kaum Borjuis

“Capitalism means that a few people will do very well, and the rest will serve the few.”

Kapitalisme berarti segelintir orang sangat berhasil, dan yang lain akan melayani yang segelintir itu

(Michael F Moore)²

Banyak warga, terutama kaum pedagang, tidak suka dengan keberadaan kaum bangsawan. Awalnya mereka memperoleh makanan juga dengan bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagian hasil alam yang mereka peroleh tidak mereka habiskan sendiri, tapi ditabung untuk musim selanjutnya, atau dijual kepada masyarakat lain. Ada juga yang memperoleh makanan dengan mensubstitusi dengan hal lain (misalnya menjual jampi-jampi, nasehat, kisah/dongeng), ketrampilan (menyanyi, akrobat, sulap) dan membuka pertokoan (barang kelontong dan kerajinan). Usaha mereka berkembang, mulai dari sekadar broker/mediator, tenaga pemasaran, distributor, hingga pemegang lisensi, dengan skala cakupan mulai dari industri rumah tangga, jasa angkutan barang hingga pengusaha pertanian, perkebunan, manufaktur berskala besar. Inilah asal mula kaum borjuis. Mereka menjadi motor utama terjadinya revolusi industri, melahirkan pasar sebagai tempat transaksi dan menciptakan kota sebagai tempat akumulasi kemakmuran dan peradaban. Dari kata *borjue* atau *kota* inilah istilah borjuis atau borjua diambil, yaitu para penduduk kota.

Ditemukannya daerah-daerah baru di Asia dan Afrika

2 http://www.goodreads.com/author/quotes/3154596.Michael_Moore.html. 2 Juli 2011, 14:15 WIB.

mengundang banyak investor. Kaum borjuis mendirikan perusahaan dengan melibatkan modal pihak ketiga melalui bursa saham dan meraup dana masyarakat melalui pendirian bank. Siapapun bisa mendirikan perusahaan dengan dana minim asal mempunyai prospektus yang mengesankan. Pada saat yang sama, memiliki korporasi bukan lagi hak eksklusif kaum bangsawan. Kaum borjuis menguasai lalulintas saham dan mengendalikan komisaris, direksi, manajemen dan operator. Kaum borjuis membutuhkan sistem yang menjamin keamanan usaha ekonomi mereka, tapi bukan sistem monopoli ala kerajaan absolut.

Kelas borjuis bergerak cepat. Mereka menyuarakan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*). Tidak ada satu pun manusia, apalagi diluar itu (baca: Tuhan/gereja), yang lebih tinggi dari kelas manusia yang lain. Kedudukan semua manusia sejajar di mata hukum, tidak menyisakan hak istimewa bagi siapa pun. Tekanan kaum borjuis berhasil menumbangkan monarki absolut dan terbitlah monarki konstitusional. Raja ratu diperlakukan sebagai simbol kepala pemerintahan, namun hak-hak istimewanya berkurang drastis. Roda pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri dan dikontrol oleh parlemen. Praktik ini terbukti ampuh. Kerajaan tetap berdiri dan tidak ada lagi sengketa antar keluarga kerajaan. Pada saat yang sama kaum borjuis telah sukses mengatur sistem kerajaan yang pro-pasar.

Posisi kaum borjuis menguat. Mereka ingin merombak sistem lebih mendasar. Pimpinan kerajaan harus dipimpin oleh orang yang mengerti sistem pasar liberal. Parlemen menamatkan riwayat monarki konstitusional dan menggantinya dengan negara modern berpaham kebangsaan (*nation-state*). Nasionalisme borjuis terbentuk karena keinginan menguasai pasar yang lebih luas. Rezim fasis Jerman, misalnya, menggunakan slogan-slogan patriotisme ekonomi pada Perang Du-

nia II agar kelas buruh Jerman rela bertempur melawan kelas buruh negara-negara lain. Di sisi lain nasionalisme proletar yang lahir pasca Perang Dunia II terbentuk karena melawan kolonialisme kaum nasionalis borjuis.

Sejarah membuktikan bahwa gerak revolusi perubahan di dunia modern tidak pernah tidak melibatkan kelompok buruh. Revolusi Bolshevik (1917) di Rusia melibatkan kelompok Bolshevik, kaum buruh dan tentara merah sehingga mampu menumbangkan imperium Rusia Raya Tsar Nikolai II. Bolshevik sendiri merupakan kelompok radikal dari Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia pimpinan Lenin. Tapi sejarah juga mencatat bahwa gagasan "*Proletarier aller Lander, vereinigt euch!*" (Kaum buruh sedunia, bersatulah) dari manifesto komunis Karl Marx nyata-nyatanya dikhianati sendiri oleh elit buruh. Di Rusia muncul kelas diktatorial-proletarian, di Jerman bangkit Nazi yang ultra nasionalis, di Prancis tampil kelas elit borjuasi, di Cina sosialis fasis, sementara di Finlandia kaum buruh pribumi (Jaggen Troops) yang didukung Jerman berperang dengan buruh pribumi lainnya yang didukung Soviet (*winter war* 1918 dan 1939).³

Paradoks Industri

Para industrialis berupaya mengatasi kelebihan produksi lewat pemasaran dengan pemusatan modal dan usaha. Praktik ini menimbulkan paradoks industri. Melalui modal, industri mengembangkan produksinya, namun over-produksi memaksa industri berpikir lagi bagaimana mengembangkan

- 3 Pada tahun 1919 Lenin membubarkan dewan-dewan buruh (Soviet) yang pada tahun 1917 menjadi tulang punggung revolusi. Dua tahun kemudian kelasi-kelasi di Konstadt yang empat tahun sebelumnya memainkan peran kunci dalam Revolusi Oktober berontak terhadap rezim komunis tetapi berhasil ditumpas. Antara tahun 1918 dan 1922 puluhan ribu orang sandera dan tahanan dieksekusi, ratusan ribu buruh dan petani yang berontak dibantai.

pasar demi memperoleh konsumen yang lebih luas. Demi meraih simpati konsumen, industri memasuki fase saling bersaing dengan sesamanya, melahirkan kompetisi global dengan jargon: kualitas bagus dengan harga semakin rendah. Pemusatan modal ini berefek kepada penekanan gaji buruh, bahwa industri akan merasionalisasi ongkos kerja atau menukar buruh dengan mesin.

Dalam sistem kapital dimana uang menjadi alat produksi utama, ukuran kekuatan ekonomi adalah bagaimana uang dikonsentrasikan untuk menguasai alat-alat produksi lainnya. Membangun atau memperbaiki pabrik, menambah jumlah mesin, membuka cabang, dan memperkuat distribusi membutuhkan uang. Aksesibilitas terhadap uang adalah bagian dari konsentrasi dan distribusi modal, dan konsentrasi ini dilakukan dengan adanya alat produksi lain yang juga penting, yaitu perbankan. Perusahaan mustahil mau mengeluarkan uang pribadi untuk membangun pabrik. Kalau bisa dapat pinjaman bank dan bisa dicicil, kenapa harus kontan?

Pada sistem kapital modern, aksesibilitas terhadap modal atau "kepercayaan untuk boleh berhutang" dilakukan melalui praktik-praktik pemberian kredit. Melalui kredit perusahaan punya kemampuan memelihara dominasi ekonominya melalui peningkatan kapasitas produksi, meluaskan jaringan, atau membuka pasar-pasar baru. Masalahnya adalah kredit diberikan bank kepada perusahaan dengan insentif, yang artinya uang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu berikut dengan bunganya.

Demi mengejar perimbangan antara meraih keuntungan, mengembalikan pinjaman, dan menekan pengeluaran, maka korporasi harus menggenjot kapasitas produksi dan mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran atau istilah korporasinya rasionalisasi bisa terjadi lewat dua hal; *Pertama*,

mengurangi pengeluaran dari sektor gaji melalui pengurangan jumlah tenaga kerja (buruh) dan menggantinya dengan sistem modern. *Kedua*, tidak menaikkan gaji atau menggantinya dengan sistem upahan (*maakloon*), menghilangkan pensiun dan tunjangan-tunjangan, dan bila perlu mengambil upah buruhnya secara ilegal.⁴

Disini kita melihat adanya kesulitan yang dihadapi korporasi, dengan dinamika kredit usaha. Tanpa kredit korporasi lambat berkembang, tetapi dengan bunga kredit korporasi meningkatkan kapasitas produksinya dengan mereduksi pengeluaran. Kalau sudah begini kita pun tahu, artinya ujung-ujungnya buruhlah yang diminta paling banyak berkorban demi kelangsungan usaha, karena mustahil korporasi mau membawa kesulitannya itu bagi dirinya.

Posisi Buruh

Akhirnya kita sampai pada pertanyaan, jika buruh adalah kekuatan perubahan, mengapa buruh pula yang mudah dipertentangkan? Lalu dimanakah peran buruh yang sebenarnya dalam sistem kapitalisme? Dimanakah posisi buruh saat kaum feodal dan kaum borjuis bertarung?

Hal ini akan kita urai satu persatu. Pertama, ketiadaan alat produksi selain otot yang membuat buruh dependen terhadap pemilik modal dalam suatu hubungan produksi. Buruh menukar tenaganya dengan upah yang kemudian ditukar kembali dalam bentuk barang konsumsi. Nilai upah disetara-

4 Perusahaan selalu punya cara untuk mengemplang upah buruh. Misalnya, aksi mogok lebih dari 2.000 buruh PT Newmont Nusa Tenggara pada awal Agustus 2010. Perusahaan dituduh tidak membayar uang lembur 2.920 buruh sejak Mei 2008 hingga Mei 2010 yang nilainya mencapai Rp 120 miliar lebih. Alih-alih menunaikan kewajiban, manajemen mengeluarkan memorandum Nomor 055/GMO-DH/NNT/VIII/2010 yang berisi ancaman PHK kepada peserta aksi mogok kerja.

kan dengan akumulasi kuantitas pekerjaan buruh dalam satu waktu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, yang besarnya sesuai upah minimum yang dilegalisir pemerintah.

Pemerintah memang menaikkan upah minimum setiap tahun. Namun buruh tidak merasakan kenaikan ini sebagai sebuah peningkatan kesejahteraan karena harga kebutuhan pokok pasti naik setiap tahun. Berapapun nominal upah minimum yang ditetapkan pemerintah niscaya tidak akan mampu menaikkan posisi pekerja satu derajat pun. Bahkan, meskipun angka upah minimum mengikuti kebutuhan hidup layak (KHL), tetap saja kesejahteraan buruh tidak otomatis tercapai. Perhitungan KHL berdasarkan pada rata-rata kebutuhan hidup buruh lajang tahun sebelumnya, sama sekali tidak mempertimbangkan buruh yang sudah berkeluarga, juga tidak memprediksi inflasi pada tahun berikutnya meskipun mereka secara faktual tetap bekerja pada tahun berikutnya. Padahal hidup layak adalah hak setiap warga negara sebagaimana amanat Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Angka KHL pun didapat dari survei tahun ini untuk menentukan besaran upah tahun berikutnya, yang tentu saja sudah naik karena inflasi.⁵

Kedua, buruh tidak memiliki kemampuan memahami siklus modal dan nilai lebihnya (*surplus value*). Pengusaha

- 5 Data Badan Pusat Statistik mengungkapkan, besaran upah yang diterima pekerja pabrik atau kawasan industri selama kurun waktu 10 tahun terakhir (1999-2009) dinilai hanya mampu memenuhi 49% KHL. Demikian juga hasil penelitian AKATIGA yang menyebutkan bahwa rata-rata upah total pekerja tekstil dan garmen di Indonesia (upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan lembur) hanya mampu membayar 74,3% dari rata-rata pengeluaran riil bulanan. Artinya, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya mampu membayar 62,4% dari rata-rata pengeluaran riil pekerja, dan rata-rata upah pokok yang diterima oleh pekerja lebih rendah daripada UMK. Lihat Tim Penulis AKATIGA, *Menuju Upah Layak*, Jakarta: FES, 2010.

meraih laba dari selisih antara biaya produksi dengan harga jual yang (sekaligus menyasati kendala fisik dari barang dan jasa) diputar kembali menjadi komoditi, diubah menjadi uang dengan nominal yang lebih besar, dan uangnya kembali dijadikan komoditi, dst. Ini yang kita pahami sebagai uang menciptakan komoditi dan komoditi menghasilkan uang (*Money-Commodity-Money*). Padahal keuntungan dari selisih biaya dan harga produksi tersebut berasal dari kedua pihak, buruh dan pengusaha. Alih-alih menerima bagi hasil, buruh hanya menerima upah. Dengan kata lain, pengusaha menjadi besar karena perputaran keuntungan yang tidak pernah dibayarkan kepada buruh.⁶

Ketiga, lingkaran setan kemiskinan-kebodohan-kemiskinan. Dengan upah konstan, buruh tidak terlibat atas perkembangan atau melimpahnya suatu hasil produksi barang. Di sisi lain, ketika perkembangan usaha negatif -misalnya di sektor jasa- tidak stabil, maka buruh diupah berdasarkan order. Sedangkan upah yang diterima sekadar mengganti waktu dan tenaga produktif yang terpakai. Seolah-olah upah itu sarana agar buruh tetap hidup sehingga tenaganya bisa terus dipakai oleh pengusaha. Sistem pengupahan ini memiskinkan buruh secara sistematis karena pengusaha sama sekali tidak menghitung faktor eksternal dan kualitas yang khas dari pekerjaan buruh dibalik proses produksi.⁷ Pengusaha hanya menilai dari sisi lahiriah pekerjaan saja sedangkan konsep, kreasi dan inovasi yang buruh lakukan dianggap sudah merupakan bagian

6 Praktik ini dinamakan *meerwaarde*/riba/nilai lebih (ziyadah/tambahan/tumbuh, membesar) yaitu pengambilan tambahan (bunga) jumlah pinjaman dari harta pokok atau modal saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam tanpa sebuah aktivitas ekonomi yang riil.

7 Untuk dapat bekerja dalam suatu perusahaan, seorang pekerja/buruh harus mempunyai ijazah formal tertentu yang diperoleh melalui pendidikan yang panjang dan biaya yang besar.

dari pekerjaan material tersebut. Padahal menurut Marx, nilai dari setiap komoditi ditentukan oleh kuantitas waktu kerja yang dibutuhkan secara sosial yang digunakan untuk memproduksi komoditi itu.

Lambat laun tenaga buruh tidak lagi sebanding dengan apa yang ia hasilkan. Tenaga manusia semakin lama semakin aus karena faktor usia, sedangkan biaya perawatan mesin jauh lebih murah. Semakin banyak mesin menggantikan posisi buruh, semakin lemah daya tawar buruh sehingga upahnya tidak lagi mencukupi kebutuhan hidupnya selama ia bekerja. Dahulu perbedaan upah dan harga produksi tidak besar sehingga buruh mampu memiliki produk yang ia hasilkan. Dengan inovasi dan kehadiran mesin baru, pengusaha meraih laba berkali-kali lipat tanpa mengubah besaran upah buruhnya. Hal tersebut akan memunculkan keadaan yang disebut Karl Marx sebagai objektivikasi (*vergebrtandlichung*) dimana buruh sebagai obyek dalam satuan modal di mata kapitalis, bukan sebagai subyek atau pencipta benda. Buruh tidak mampu memiliki dan terasing dari barang yang ia hasilkan sendiri⁸.

Ketiga faktor lemahnya posisi tawar akibat ketiadaan alat produksi, rendahnya pemahaman tentang investasi atau manajemen masa depan, dan kemiskinan berkepanjangan yang menyebabkan buruh selalu menjadi korban dari perubahan-perubahan sosial. Mereka dimanfaatkan oleh kaum

8 Menurut Marx tentang keterasingan: 1) Buruh tidak mempunyai kuasa untuk mengatur dan memasarkan produk-produknya sehingga ia tidak memperoleh keuntungan dari produk tersebut; 2) Buruh terasing dengan pekerjaannya sendiri sebab dikuasai oleh kekuatan eksternalnya sehingga menurunkan kecakapan produktifnya ke tingkat hewan; 3) Buruh terasing secara langsung dari hubungan masyarakat karena relasi sosial disederhanakan menjadi kegiatan pasar dimana uang menentukan pertukaran barang dan jasa.

pemodal, penguasa atau politisi untuk mendapatkan keuntungan tetapi setelahnya selalu diabaikan.

Etika Weberian

Kapitalisme sebagai modus eksistensi secara tidak langsung mendapat pembenaran dari Max Weber dalam “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” (*Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus*) yang awalnya berupa tulisan berseri pada tahun 1904 dan 1905 dan kemudian terkenal sebagai “Thesis Weberian”. Ia menyatakan bahwa gagasan keagamaan (etika Protestan) adalah sebuah kekuatan bawah sadar dalam pengembangan kapitalisme.

Philip Zimbardo, profesor psikologi dari Stanford University, melukiskan jika etika Katolik berorientasi pada dogma-dogma masa lalu, maka Etika Protestan adalah diskursus tentang masa depan. Cara pandang tentang kuasa waktu (*the power of time*) bagi keduanya berbeda nyata. Bagi orang Katolik bekerja menjaga nilai-nilai lama dan tradisi menjadi penting, sementara bagi orang Protestan mencari nilai-nilai baru dan bekerja demi masa depan adalah utama. Dengan demikian orang Protestanlah yang lebih dahulu memahami apa pentingnya investasi. Sehingga apabila kita lihat sekarang, ekonomi dunia yang dikuasai sektor keuangan serta pembiayaan yang menjunjung tinggi kaidah investasi dan deviden adalah milik kapitalis Protestan.

Dalam perspektif Protestan, Tuhan telah memberikan pembagian yang tegas antara urusan akhirat dan duniawi. Manusia sebagai mandataris Tuhan di dunia bertanggung jawab penuh atas nasibnya tanpa bantuan sakramen dan otoritas keagamaan. Akibatnya, manusia mencari jalan terbaik untuk bertahan hidup (*survival of the fittest*). Ia sendiri yang harus memberikan harga dalam setiap aktivitas dan waktu

untuk memperoleh apa yang dikenal sebagai “kesuksesan”. Tentu saja ukuran paling rasional dari kemampuan mengelola tenaga-modal-waktu adalah berlimpahnya materi dan kedudukan. Bukankah orang protestan Inggris yang membuat kredo “*time is money*” waktu adalah uang. Sukses dunia adalah sebuah ukuran selamat dan sukses akherat.

Sesungguhnya aktivitas mengejar keuntungan ekonomi ini bukan dominasi budaya Barat atau kelompok protestan saja. Karakter ini umum dalam perspektif keagamaan manapun, dimana keberimanan adalah kekayaan jiwa dengan menerima “kehadiran Tuhan”. Konsep “tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah”, atau “manusia merugi dengan waktu yang disia-siakan” adalah doktrin-doktrin agama dalam membangun pondasi aksi bahwa kemapanan adalah sebuah kemestian dan jalan hidup yang terpuji. Semua agama mengajarkan kemuliaan dengan membantu banyak orang adalah jalan bagi peneguhan iman ketuhanan, melapangkan pekerjaan, dan penghormatan atas kemanusiaan. Konsep kehendak bebas (*free-will*) bersanding dengan pembenaran teologis, menghadirkan makna spiritual dan moral yang positif. Dengan kata lain, gerakan keagamaan memperkuat prinsip utama kapitalis dalam usaha pengejaran kekayaan.

Menolak Kapitalisme

Tidak ada yang menolak bahwa hak asasi manusia yang paling mendasar adalah kemerdekaan dan kebebasan. Merdeka dari belenggu penjajahan dalam segala bentuknya dan menggunakannya secara bebas untuk memilih keyakinan, berkumpul, berserikat dan kepemilikan pribadi. Namun menjalankan kedua hak dasar tersebut tidak boleh mengusik kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Untuk itulah, kata

Immanuel Kant, manusia butuh rekonsiliasi demi keberadaan bersama (koeksistensi) dan kerjasama (koperasi) agar dunia terhindar dari pertentangan dan konflik.

Kapitalisme ditolak bukan karena "keluhuran"nya yang membebaskan setiap orang untuk memperoleh kesejahteraannya, melainkan karena sistem tersebut tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang efektif atas pelaku-pelaku ekonomi. Kita akui bahwa kapitalisme dalam inti murninya adalah mengajarkan penghargaan terhadap nilai-nilai kerja. Atas nama persaingan bebas, praktik-praktik *good corporate* dari pengusaha mempunyai banyak kebaikan, antara lain; Menyeleksi badan usaha dan buruh yang kinerjanya baik, menghasilkan barang bermutu tinggi dengan harga murah, persaingan yang membangkitkan industri kreatif, penemuan-penemuan baru dalam hal teknik, metode dan sistem ketenagakerjaan. Namun, persaingan dalam pasar bebas juga punya banyak sisi buruk, ketika badan usaha yang bermodal besar saja yang menang, namun dengan usaha yang belum tentu baik. Persaingan bebas juga menciptakan efisiensi upah dan pengurangan standar kerja. Persaingan tidak melulu menciptakan harga yang murah sebab ada tambahan biaya promosi.

Praktik-praktik kejam dari kapitalisme yang ditelikung pemilik modal dan penguasa menciptakan kecenderungan bagi korporasi besar untuk memakan pelaku usaha yang lebih kecil, menciptakan monopoli dan individualisme yang justru menjadi musuh utama kapitalisme protestan yang menjunjung tinggi hak-hak komunitas. Modal hanya berputar pada pemilik atau segelintir pemegang saham atau direksi semata dan tidak mengalir ke buruh. Tidak ada *trickle down effect* sebagaimana yang dijanjikan.

Para eksekutif di Wall Street bertanggung jawab atas kri-

sis kredit perumahan di Amerika Serikat pada tahun 1997. Pemerintah Amerika Serikat terpaksa mengucurkan dana talangan (bailout) sebesar US\$700 miliar. Meskipun para eksekutif itu mengundurkan diri atau dipecat, mereka masih mendapat pesangon yang jumlahnya luarbiasa. Charles Prince CEO Citigroup menerima pesangon US\$40 Juta (setara Rp365,32 miliar). Richard Fuld CEO Lehman Brothers menerima kompensasi US\$ 71,9 juta atau sekitar Rp668 miliar selama tahun 2007 termasuk saham, bonus dan bayaran lain. Martin Sullivan, chief executive AIG menerima US\$ 14 juta (sekitar Rp130 miliar) dan paket senilai US\$ 47 juta (sekitar Rp437 miliar). Pensiun para eksekutif yang lain, misalnya Fannie Mae dan Freddie Mac, Daniel Mudd dan Richard Syron sebesar US\$ 9,43 juta (sekitar Rp88 miliar). Sepanjang 2008, gaji pada level senior manajer keatas justru naik rata-rata 5%, yang mana gaji Direktur Keuangan mengalami kenaikan paling tinggi diantara jabatan lainnya (Compdata Survey, seperti dikutip Forbes, 29/10/2008).

Buruh tidak mampu membeli hasil produksinya sendiri. Dengan daya beli yang rendah, tidak ada aktualisasi dan motif ekonomi dalam diri pekerja. Ketika tidak ada permintaan, tidak ada pula transaksi, roda ekonomi pun berhenti. Muncul anarki kapitalisme. Kapitalisme menghisap darahnya sendiri, menciptakan apa yang kita saksikan sekarang dengan paradoks-paradoks. Kemakmuran, kesejahteraan, dan jargon perdamaian selalu beriringan dengan perang dalam rangka menguasai sumber-sumber alam. Pengetatan anggaran produksi dan peningkatan bunga hutang menyebabkan kelumpuhan industri dan menjerumuskan negara-negara barat dalam kebangkrutan. Industri berteriak memohon talangan hutang, dan kita tahu persis kelas buruhlah yang mati lebih dahulu.

Sistem Alternatif

“Capitalism and communism stand at opposite poles. Their essential difference is this: The communist, seeing the rich man and his fine home, says: ‘No man should have so much.’ The capitalist, seeing the same thing, says: ‘All men should have so much.’”

(Kapitalisme dan komunisme berdiri di kutub yang berlawanan. Perbedaan esensial mereka adalah: Sang Komunis, yang melihat orang kaya dan tempat tinggalnya yang baik, berkata: “Seharusnya tidak seorang pun punya terlalu banyak”. Sang Kapitalis, yang melihat hal yang sama, berkata: “Seharusnya semua orang punya banyak”)

(Phelps Adams)⁹

Malapetaka dunia bukan dikarenakan kepemilikan pribadi, melainkan ketika praktik ekonomi tidak dijaga oleh regulasi yang mendukung kemaslahatan mayoritas warga, terutama kelas buruh sebagai pelaku utama produksi. Tidak ada yang salah dengan kepemilikan pribadi selama tidak mencaplok hak-hak sipil-politik-ekonomi-sosial-budaya warga lainnya. Sebaliknya, sosialisme bukanlah solusi jitu karena cenderung membonsai partisipasi politik rakyat, bahkan mencabut hak asasi manusia. Dan bagaimana mungkin ekonomi sentralistis memberdayakan masyarakat bila hak untuk mengaktualisasi diri dalam memilih pekerjaan dan mempunyai barang pribadi terhambat?

Sudah cukuplah pemimpin semacam Mao Zedong dengan program “Lompatan ke Depan (*Dae Yu Djin*)” yang memobilisasi besar-besaran buruh tani menjadi buruh industri demi mengejar industri infrastruktur barat antara tahun 1958-1960 yang menciptakan kelaparan dan menewaskan

9 <http://www.inspirationalstories.com/quotes/phelps-adams-capitalism-and-communism-stand-at-opposite-poles/> 4 Juni 2011, 22:13 WIB.

20 juta lebih rakyat China. Kita juga kapok dengan kebijakan pertanian kolektif ala Pol Pot yang menumbalkan hampir 2 juta rakyat Kamboja pada tahun 1975. Pasca keterbukaan ekonomi yang digulirkan Deng Xioping, negeri tirai bambu ini menjadi raksasa ekonomi yang luarbiasa, sebagaimana Amerika Serikat menggantikan Inggris pada abad ke-20, dan Inggris menggantikan Belanda pada abad ke-18. Ratusan pakar mengipas-ngipas sukses pertumbuhan ekonomi Cina sebagai contoh dari ekonomi kerakyatan dan menjanjikan bagi masa depan. Cukup buat kita bahwa sejarah perubahan memakan banyak korban. Artinya, pergantian kepemimpinan ekonomi global tidak berarti bahwa kapitalisme telah tamat.¹⁰

Sulit kita pungkiri hal-hal demikian tidak akan muncul, sebab manusia punya sisi lain selain sifat baiknya dalam mengaktualisasi diri. Bahwa kecenderungan untuk memperkaya diri adalah alami, namun sisi sosialisnya sebagai bentuk ekspresi kesadaran rasional seharusnya dapat mengerem dan menahan suatu pemenuhan kebutuhan individualismenya menuju kebutuhan kolektif. Istilahnya, jika kapitalisme menghasilkan satu orang pemenang dengan seribu orang kalah, maka bagaimana sistem ekonomi alternatif kita membuat manusia mampu berpikir untuk memenangkan semua orang dan bukan hanya dirinya sendiri. Untuk mencapai kesadaran

10 Pertumbuhan ekonomi makro China memang tinggi. Tapi tingkat pelanggaran hak-hak pekerja juga sangat tinggi. Menurut Carsten A. Holz, negara penghasil industri pakaian, sepatu, mainan anak-anak dan banyak produk murah lainnya ini terkenal dengan rendahnya upah pekerja, pelanggaran hak-hak pekerja dan Hak Asasi Manusia, dan, tentu saja, kerusakan ekosistem air-tanah-udara yang mengerikan. Misalnya, jam kerja yang panjang (lebih dari 40 jam/minggu), upah dibawah upah minimum (termasuk tidak mendapatkan upah lembur), K3 yang tidak terjamin, terlanggarnya hak-hak perempuan (cuti menstruasi, hamil dan juga melahirkan), pekerja anak, dll. Semua ini lumrah terjadi di China. (Carsten A. Holz, *China's Economic Growth 1978-2025*, 2005).

sosialisme semacam ini butuh *effort* yang lebih dari sekadar slogan dan semangat, perilaku asketis dan sikap egaliter, yang tentu saja mengebiri hasrat terhadap kemapanan. Tanpa prinsip-prinsip ini, pemerintahan proletariat hanyalah bentuk lain dari kapitalisme, dimana elit partai atau kaum progresif bergaya hidup borjuis dengan fasilitas negara karena kapok hidup sederhana.¹¹

Ditengah pertikaian dan perselingkuan antara kelas borjuis dan kapitalis di satu sisi dengan kelompok sosialis di sisi lain, muncul kelas ketiga yang mencoba melihat persoalan secara proporsional. Kelompok ketiga ini, sering dinamakan politik Jalan Ketiga (*The Third Way*), meyakini kehidupan asasi manusia terpaparkan pada sistem demokrasi liberal. Mereka memfokuskan diri pada prinsip-prinsip kesetaraan untuk masyarakat dan pada kondisi macam mana prinsip-prinsip tersebut diberlakukan. Mereka meyakini bahwa kebebasan bertindak (demokrasi politik) harus diiringi oleh hak dasar yang sama dalam hal penguasaan barang-barang konsumsi (demokrasi ekonomi). Demi menjaga hak sosial-ekonomi individu itulah campur tangan negara sangat diperlukan. Politik berperan mengatur distribusi kekayaan diantara sesama warga tanpa menutup peluang usaha mereka.[]

11 Lenin berkhayal bahwa, "Organisasi-organisasi independen milik proletariat semakin bertambah banyak jumlahnya, dari Amerika hingga Jepang, dari Swedia hingga Afrika Selatan. Proletariat menjadi semakin tercerahkan dan terdidik dengan membiayai perjuangannya sendiri; mereka membuktikan kesalahan tuduhan-tuduhan masyarakat borjuis; mereka terus memperbaiki strategi perjuangan; menggalang kekuatan dan tumbuh tak terbendung." (*Prosveshcheniye*, No. 3, Maret 1913). Pada tahun 1989 Republik Uni Soviet bubar.

RINGKASAN:

1. Semangat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dikuasai secara individual telah hadir sejak manusia mengenal kepemilikan pribadi. Motif ekonomi ini kemudian berkembang lebih terstruktur, terorganisir dan melibatkan banyak pihak, terutama kelas buruh sebagai pelaku utama proses produksi.
2. Pertumbuhan dunia usaha tidak serta merta membawa kesejahteraan bagi buruh. Pengusaha mengambil seluruh keuntungan dan buruh hanya mendapat upah konstan untuk mengganti kebutuhan hidup selama ia bekerja. Buruh akhirnya teralienasi dari proses dan hasil produksi.
3. Kebebasan bertindak (demokrasi politik) harus diiringi oleh hak dasar yang sama dalam hal barang-barang konsumsi (demokrasi ekonomi) agar tidak ada dominasi suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya. Disitulah campur tangan negara sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan tersebut.



MANUSIA BORJUIS BERDAGANG.



MEREKA JUGA MENARIK DANA
MASYARAKAT DENGAN MEN-
BUKA SAHAM PUBLIK (BURUH
YANG MENJALANKAN PERU-
SAHAAN)



UNTUK
MENGUASAI
LAHAN LAIN
DAN MEMPER-
BESAR KEUNTUNG-
AN, KAUM BORJUIS ME-
NYOGOK PEJABAT SETEMPAT
ATAU BERPERANG DENGAN NE-
GARA LAIN.



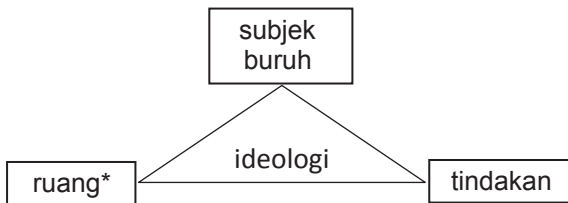
John
Tamung
2011



Sebaliknya, buruh yang tidak berkesadaran memaknai segala sesuatu dengan tumpul. Ia baru sadar kalau dia tidak memiliki apa-apa lagi setelah dipecat, dipotong gajinya, atau dipensiunkan tanpa pesangon dengan alasan krisis ekonomi.



BAB 6 : KESADARAN BURUH



*) politik, ekonomi, sosial, budaya

KESADARAN BURUH

“Consciousness is the basis of all life
and the field of all possibilities.”

Kesadaran adalah basis dari segala kehidupan dan ladang dari seluruh kemungkinan.

(Maharishi Mahesh Yogi, 1914–2008)¹

Perasaan tertindas tidak otomatis memunculkan perlawanan, yaitu ketika ketertindasan dipahami sebagai hal wajar dan bagian dari ujian kesabaran. Hanya kesadaranlah, syarat mutlak bagi transformasi sosial, yang membuat kaum buruh bergerak sesuai dengan ideologi kelasnya. Mengacu pada teori realismenya Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), posisi buruh masih dalam taraf “Ada dalam dirinya” (*etre en soi*). Buruh melek tapi tidak mampu menjabarkan dan mengolah eksistensinya. Mereka terpenjara oleh definisi, terminologi dan konstruksi negatif tentang kelasnya; sebagai pihak paling lemah dalam sistem produksi, sebagai orang kecil, atau kaum yang beruntung karena ototnya masih bisa dipakai.

1 <http://www.diamondhelpers.com/loveandlife/famousquotes/consciousness.html>. 7 Juli 2011, 15:47 WIB.

Perusahaan ingin seluruh eksistensi kita larut dalam sistem dan dimensi pekerjaan. Industri telah menghilangkan eksistensi atau kesadaran buruh sebagai manusia –yang bisa bertegur sapa, berorganisasi, atau sekadar curhat tentang bayaran sekolah anak belum dibayar– hanya sebatas robot-robot yang diatur berdasarkan sistem shift dan dipandang sebagai sapi perah atau mesin tanpa empati. Tanpa empati dalam diri maka tidak ada kemungkinan kita sadar tentang diri kita yang luhur. Bila buruh protes atau melawan, isinya tidak menjauh dari koridor yang dibuat oleh perusahaan, dengan risiko dipecat atau diintimidasi.

Kenyataannya memang demikian, buruh belum memahami dirinya sebagaimana yang seharusnya. Mereka masih hidup dalam persepsi orang lain terhadapnya. Buruh bekerja berdasarkan perintah, bukan karena kesadaran dari dalam diri tetapi oleh kondisi yang ditentukan dari luar dirinya. Ia menjadi robot yang penakut di perusahaan. Tapi ia menjadi pribadi lain saat berkumpul dengan keluarga di rumah, menunjukkan sosok yang lain pula saat berada di tengah-tengah aktivitas kemasyarakatan. Kepribadiannya terbelah. Sistem penindasan mental dan fisik memaksanya untuk selalu mencari posisi yang aman, menghindari konflik dan menerima segala ketentuan yang dipaksakan. Ia tidak mampu mengeluarkan dirinya sebagai seorang pribadi yang utuh, makhluk yang dilahirkan merdeka, pembayar pajak yang eksis dibawah negara hukum, yang kewajiban dan haknya setara dengan manusia lainnya. Bila buih-buih kesadaran sebagai buruh ini tidak beralih pada kesadaran yang lebih tinggi, yakni bahwa saya ada bagi diri saya sendiri (*etre pour soi*), pastilah kesadaran buruh itu palsu; ia tidak akan mampu membuat kesadaran bagi orang lain.

Etre pour soi mengacu pada kesadaran yang berjarak. Bahwa kita *tidak sama* dengan sesuatu yang kita pahami. Pada

satu sisi kita terikat oleh sistem ketenagakerjaan. Pada sisi lain, kita sosok yang merdeka, bebas berpikir, berpendapat, dan menentukan nasib sendiri. Ada perbedaan dan jarak antara kesadaran diri kita yang natural dan citra diri kita dalam desain perusahaan. Sebenarnya buruh selalu punya ruang yang cukup untuk menjaga jarak antara pikiran individualnya dan apa yang dia perbuat di hadapan manajemen. Maksudnya seburuk-buruknya buruh dalam pandangan paling negatif yaitu sebagai pekerja kasar, dia memiliki kesadaran untuk eksis sebagai manusia yang ingin dihormati dan dihargai.

Pencitraan yang berbeda-beda ditiap kesempatan terhadap seseorang sebetulnya sudah menjadi penanda bahwa setiap orang bebas bergerak dan memilih eksistensi seperti apa yang dia inginkan pada suatu waktu. Dengan ketiadaan patokan diri inilah buruh dimungkinkan untuk melampaui dirinya dan hubungan dengan benda-benda diluar dirinya sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ia mampu menidak, menolak, bahkan membangkang apabila tekanan-tekanan terhadap dirinya dianggap dapat menghancurkan eksistensinya sebagai manusia. Meskipun dirinya masuk dalam lingkaran produksi namun kebebasan jiwanya tidak terikat sama sekali dengan pekerjaannya. Konsep ini berbeda dengan pandangan Marx tentang keterikatan jiwa dan alat produksinya.

Sedangkan kesadaran "Ada untuk yang lain" (*etre pour les autres*) benar-benar membelalakkan mata buruh. Ia melihat relasi-relasi antar manusia yang sebenar-benarnya tidak terpisah dengan dunia. Ada sistem global yang menaungi setiap tindak tanduk manusia. Kesadaran buruh tidak lagi tentang dan untuk dirinya, melainkan juga yang lain, sesama rekan buruh dan hegemoni wacana yang mengungkungi dunia perburuhan. Sebagaimana ungkapan tokoh buruh Korea Selatan, Chun Tae-il (1948 – 13 November 1970), "Di zaman komodi-

fikasi ini, zaman yang mengerikan, dimana seseorang bisa mengambil segalanya dari orang lain, aku tidak akan berkompromi dengan ketidakadilan apapun ataupun tinggal diam, tetapi akan berupaya maksimal demi keadilan.”

Pada level ini, buruh dapat membedakan dan menegaskan antara abstrak personal dan konkret. Wilayah ketuhanan dan mistis bukan tujuan gerakan buruh karena itu masuk wilayah privat. Ada waktu-waktu dimana wilayah perenungan ini diberikan kepada buruh, namun problem perburuhan adalah problem sosial dan material. Buruh tidak ditugaskan untuk meneliti niat majikan, karena urusan niat siapa yang tahu. Yang dilihat dan dinilai hanyalah tindakan konkret majikan.

Melalui kesadaran inilah buruh bertindak lebih hati-hati dalam berpikir dan bersikap. Kewaspadaan ini juga yang menciptakan nalar kritis, kenapa kita selalu mendapatkan bagian paling kecil dari keuntungan pabrik. Tentu kewaspadaan kita terganggu ketika buruh dihalang-halangi untuk berorganisasi dan berkoperasi demi menaikkan daya tawar dan kesejahteraannya. Sebaliknya, buruh yang tidak berkesadaran memaknai segala sesuatu dengan tumpul. Ia baru sadar kalau dia tidak memiliki apa-apa lagi setelah dipecat, dipotong gajinya, atau dipensiunkan tanpa pesangon dengan alasan krisis ekonomi.

Kesadaran Ideologi

*Hari-hari esok adalah milik kita
Terciptanya masyarakat sejahtera
Terbentuknya tatanan baru masyarakat
Indonesia Baru tanpa Orba*

*Marilah kawan mari kita kabarkan
Di tangan kita terenggam arah bangsa
Marilah kawan mari kita nyanyikan
Sebuah lagu tentang pembebasan*

(Marjinal, "Buruh Tani")

Struktur kesadaran itu bertingkat-tingkat. Pemahaman dan pengendalian refleksi kita yang berbeda-beda membuat realitas hadir dan termaknai secara beragam pula. Kita menyebut orang yang memiliki mobil lebih dari satu sebagai orang kaya, sementara buruh yang tinggal di kamar sewaan sebagai orang miskin. Padahal dengan sedikit perenungan kita akan memperoleh kesadaran akan realitas yang lebih luas. Kenyataannya buruh adalah orang yang paling kaya sebab dia tidak punya hutang di bank untuk membayar kredit mobil dan apartemen. Orang yang berhutang, dalam definisi sederhana, adalah orang miskin meskipun ia punya sejumlah mobil.

Masalahnya adalah kenapa buruh yang sebetulnya "bukan orang miskin" merasa menjadi miskin? Pertama, dia menjadi miskin karena tidak menyadari "kekayaan" yang dimilikinya dan terus mengutuki dirinya sebagai orang miskin, terus mereproduksi citra diri sebagai orang miskin dan rendahan yang layak dibayar murah. Kedua, dia menjadi miskin karena "ada" suatu sistem terstruktur yang membuatnya terus miskin. Buruh diperas sedemikian rupa dengan aneka peraturan dan alasan sehingga posisinya menjadi lemah baik sebagai alat produksi terpenting perusahaan maupun sebagai warga negara.

Dalam kerja menebarkan kesadaran ini maka kita akan bertemu dengan orang yang sok memahami realitas, orang-orang ini sering berkata, "Sudahlah, realistis saja. Masih untung kita dapat pekerjaan. Diterima saja sudah alhamdulillah." Atau aktivis buruh yang bilang, "...jangan melawan realitas, kita realistis saja, yang punya uang itu korporasi." Ucapan pertama mengandung hikmah tapi palsu karena sebetulnya dia senang ada orang lain susah atau dia menghibur diri karena nasib sialnya. Ucapan kedua dari aktivis buruh jauh

lebih parah, karena ini ungkapan frustrasi.

Kedua ekspresi yang muncul dari kedua ucapan diatas adalah bentuk dari ketidaksadaran ideologis. Mereka sebenarnya tidak paham realitas. Mereka justru orang yang tidak realistis, kalau bukan anti-realis, mereka pasti pemimpi. Buruh yang mengatakan dapat kerja saja sudah cukup, sama sekali tidak paham bahwa dirinya adalah faktor determinan, penentu dari aktivitas ekonomi korporasi. Ungkapan tersebut bukan kontrak sosial karena menghilangkan basis material dan sosiologisnya. Dialog yang menekankan sisi abstrak/teologis dengan parameter keikhlasan merusak tatanan kemanusiaan. Ia memaksa orang untuk menerima wilayah privat yang sebenarnya merupakan urusan pribadi antara dia dengan Tuhannya.

Sementara aktivis buruh yang lebih memilih bekerjasama dengan korporasi atas alasan korporasi punya uang adalah orang frustrasi. Dalam sistem ekonomi dimana kapital terakumulasi dalam wujud yang massif (besar sekali), maka betul bahwa uang memainkan peranan. Masalahnya dari mana perusahaan mendapatkan uang untuk membangun pabrik dan membayar upah awal pegawai? Mustahil dari uang mereka sendiri. Tidak ada pengusaha yang rela keluar uang tanpa ada jaminan aset mereka tidak hilang. Maka pilihan paling benar adalah meminjam uang dari bank. Dari mana bank memperoleh uang? Dari nasabah dan negara. Siapa nasabah, dan dari mana negara memperoleh uang? Mayoritas dari pajak buruh, dari retribusi kaki lima yang dikejar-kejar satpol PP, dari potongan gaji PNS. Orang bilang pajak terbesar dari industri tembakau dan rokok, dari mana mereka memperoleh keuntungan? Tentu dari keringat yang diperas dari buruh-buruhnya. Maka, sekali lagi, buruh adalah faktor dominan dari berlangsungnya dinamika ekonomi kapital. Tanpa buruh me-

sin-mesin sama sekali tidak bekerja, dengan boikot (mogok) buruh semua negara lumpuh. Pernyataan ini muncul karena buruh terjebak pada pikiran masing-masing, mereka tidak pernah mau menyamakan ide dalam satu IDE besar bersama.

Kesadaran Sosial

Banyak buruh menganggap bahwa hubungannya dengan perusahaan adalah masalah pribadi, murni antara pencari kerja dan pemilik lapangan pekerjaan. Semua masalah dile-takkan pada masalah psikologis. Sehingga, dalam kondisi apa pun, sulit membuat buruh bisa berdiri setara dengan pemilik modal. Padahal, pemilik modal, buruh, dan produksi adalah sebuah kesatuan sosial yang tidak bisa dipisah begitu saja. Tidak ada proses produksi yang tidak melibatkan buruh. Sehingga peralihan kesadaran dari personal ke komunal, me-ngubah konteks psikis ke ranah sosial, adalah pembentukan dan penguatan sistem dalam diri buruh.

Kesadaran sosial meniscayakan kebutuhan untuk saling memperkuat jaringan komunitas. Kesadaran ini membantu menyebarkan distribusi pendapatan sehingga setiap komuni-tas mempunyai daya tahan yang sama. Kesadaran yang inte-gral dan sistemik pada ruang ini hanya dapat tercapai melalui perkaderan di tiap basis komunitas buruh. Sehingga tidak ada yang mengklaim bahwa gerakan buruh adalah sebuah gerakan reaksioner.

Dalam rangka mengawal penyadaran dan penyolidan kelas buruh, setidaknya ada beberapa fase yang mesti kita lalui, mulai dari fase konsolidasi dan perumusan sistem perkaderan (konsolidasi serikat); fase sosialisasi ideologi kelas buruh (indoktrinasi); fase pengawalan sistem perkaderan di serikat buruh (perkaderan); fase sosialisasi perkaderan di komunitas buruh (pendidikan warga); hingga fase pengawalan

sistem perkaderan buruh di tingkat nasional (sistem). Dalam bahasa lain, membangun ideologi buruh harus dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, dan sistem nasional. Semakin keatas, tantangan semakin berat karena areal politik lebih luas, butuh energi besar. Semua ini hanya bisa jalan bila ada sinergi tim. Dengan menoleh sekilas kepada kredo *community development*, maka kita tahu bahwa proses penyolidan kelas buruh masih terjebak pada internal organisasi, belum pada masyarakat buruh. Pada saat yang sama, sebenarnya sudah tersedia ruang mediasi ke warga buruh dalam banyak bentuk, misalnya forum temu warga, arisan, hingga pengajian/kebaktian warga. Bila ideologi buruh bisa sinergi dengan kebutuhan komunitas pekerja, maka kesadaran kelas buruh barulah niscaya, bukan wacana.

Kesadaran Gender

Kesadaran sosial juga berhubungan dengan bagaimana memaknai dan memperlakukan buruh perempuan yang secara kodrat reproduksi (hamil dan melahirkan) berbeda dengan laki-laki. Selain masalah reproduksi, tidak ada perbedaan signifikan dalam dimensi intelektual, spiritual, dan emosional antara laki-laki dan perempuan. Pada wilayah abstrak ini, kemampuan jenis perempuan dan laki-laki adalah sama. Untuk pintar hanya mensyaratkan kerajinan dan ketekunan. Untuk menjadi spiritualis, hanya membutuhkan perenungan dan refleksi yang mendalam tentang kuasa dan kebesaran Tuhan. Untuk mempunyai emosi yang stabil hanya membutuhkan empati dan interaksi intens dengan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, hubungan kedua insan perempuan dan laki-laki wajib dilandasi komunikasi yang sejajar, egaliter dan transparan. Semuanya murni pembagian kerja teknis. Hal ini penting dikatakan mengingat hingga kini masih ada

praktik-praktik dengan bumbu teologis dan kultural yang menyudutkan dan mengorbankan perempuan. Kontrak sosial yang bias gender mengkonfrontasikan urusan-urusan privat dengan alasan-alasan belas kasihan. Padahal menstruasi, melahirkan dan menyusui bukan sekadar persoalan privat, bukan pula wilayah yang bisa dinegosiasikan sehingga industri bisa berlepas tangan begitu saja. Ketiga hal itu adalah satu organisme yang menyeluruh dalam diri perempuan, jauh sebelum adanya kontrak kerja formal dilakukan. Dengan kata lain, segala problem biologis khas perempuan buruh adalah tanggung jawab industri. Industri harus bertanggungjawab atas tambahan nutrisi yang dibutuhkan buruh perempuan yang hamil dan melahirkan sampai dia pulih dan siap bekerja kembali. Setiap darah yang keluar dari tubuh perempuan adalah bagian dari proses industrial.

Stereotipe tentang perempuan yang lemah dalam relasi industrial sehingga pengusaha merasa berhak memotong upah pekerja perempuan masih cukup dominan. *Sydney Morning Herald* melaporkan hasil penelitian Ian Watson, peneliti senior Macquarie University, yang menemukan adanya diskriminasi upah antara pekerja perempuan dan laki-laki di Australia yang mencapai 60%. Pendapatan manajer perempuan lebih rendah A\$ 22.000 atau US\$ 17.180 per tahunnya dibandingkan manajer laki-laki. Salah satu alasannya karena jam kerja perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Padahal, manajer perempuan juga memiliki pendidikan, usia dan kualifikasi yang sejajar jika dibanding manajer laki-laki. Laki-laki yang menikah dan memiliki anak akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Namun, tidak demikian halnya dengan manajer perempuan yang juga memiliki anak.²

_____ Budaya patriarki di perusahaan kerap memanfaatkan

2 <http://www.brisbanetimes.com.au/lifestyle/life/female-managers-13500-worse-off-than-men-20090712-dhf3.html> (13/7/2009)

posisi perempuan yang lemah secara struktural dan fisik. Hasil survei *Reuters* dan Ipsos Global mengungkapkan satu dari sepuluh pekerja mengaku pernah mengalami pelecehan seksual dari atasan mereka di tempat kerja. Menurut survei tersebut, ada sekitar 12 ribu pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual di 24 negara. Laporan paling banyak terjadi pada pekerja di India (lebih dari 26%). Berikutnya di China (18%), Arab Saudi (16%), Meksiko (13%), Afrika Selatan (10%), dan Italia (9%). Di Brasil, Rusia, Korsel, dan AS sebanyak 8%. Biasanya atasan mencoba melakukan kegiatan seksual karena merasa bawahannya bekerja kepadanya, bukan karena mereka ingin menjalin hubungan yang tulus.³

Sehingga, memformat kesadaran setiap individu perempuan sebelum kontrak industrial sangat penting dilakukan. Kesadaran bahwa dirinya adalah manusia bebas, bukan bagian dari kelas batu (yang hanya benda mati dan objek pasif), bukan dari kelas tumbuhan (benda hidup dan objek pasif), dan tidak juga dari hewan (benda hidup, subjek pasif/instingtif), dan juga bukan kelas dua setelah laki-laki (hingga digaji sekadarnya saja). Kesadaran ini sangat menentukan nilainya di mata pengusaha yang didominasi budaya patriarki. Semakin lemah konsepsinya, semakin rentan pula posisinya dihadapan pemilik modal. Imbasnya jauh lebih parah, kasus-kasus pelecehan seksual, pengucilan, sampai pemecatan atas nama kehormatan, urusan keluarga, haid atau hamil sering terjadi.

Kesadaran Politik

Wilayah mana dalam kehidupan sosial kita yang lepas dari aktivitas politik? Tidak ada. Semua hal yang berhubung-

3 <http://in.reuters.com/article/2010/08/12/idINIndia-50791320100812> (12/8/2010)

an dengan kontrak sosial adalah politik, terlepas dari apakah buruh tidak sadar atau tidak peduli dengan hal itu. Bila demikian, apakah yang bisa diharapkan lebih jauh dengan posisi buruh yang personal di hadapan sistem regulasi, modal dan senjata yang berlimpah? Sampai kapan pun, buruh tidak akan mampu melawan mereka. Gerakan protes yang buruh lakukan cuma mampir di telinga kiri perusahaan dan negara untuk selanjutnya keluar melalui telinga kanan. Di beberapa perusahaan yang bebal lagi *ndablek*, pesan dan aspirasi buruh tidak pernah masuk ke telinga pengusaha. Proses komunikasi bukan lagi dialog, tapi seperti pengemis kepada majikan. Dengan kondisi yang mentok disana dan terjepit disini, tiada lagi harapan yang bisa dicapai kecuali melalui perlawanan kaum buruh.

Sejak abad 19 buruh Eropa yang produktif akan mendapatkan renumerasi (tambahan) bayaran yang semakin tinggi, meskipun perusahaan "terpaksa" harus "berbagi" keuntungan untuk membayar tambahan ini. Ini semua karena buruh sudah disadarkan hak dan kewajibannya melalui serikat buruh. Pada waktu yang bersamaan, perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik-pabrik kolonial memaksa buruh di Asia dan Indonesia kerja rodi tetapi enggan berbagi keuntungan. Buruh dijebak oleh ijon tenaga kerja, setelah sebelumnya ia diberi pinjaman uang dengan hutang berbunga. Posisi lemah sebagai pengutang dibayar buruh dengan teken kontrak kerja kepada agen. Agen menjual buruh beserta bunga pinjamannya kepada perusahaan, dimana perusahaan kemudian menjalankan *penal sanction*, aturan perdata yang mengikat buruh selama-lamanya untuk bekerja di perkebunan. Praktik ini menyebabkan buruh tak pernah bisa membayar hutangnya akibat bunga yang terus-menerus bertambah. Inilah jenis kemiskinan yang

disebabkan suatu sistem struktur diluar diri buruh. Praktik ini masih berlaku hingga masa sekarang. Banyak buruh pabrik yang mendapatkan pinjaman uang dari agen dengan cara menggadaikan ijazah. Akibatnya ia sulit pindah kerja karena antar agen dan antar perusahaan mewajibkan calon buruh menunjukkan ijazah terakhirnya.

Sosok buruh yang punya kesadaran lengkap terdapat pada diri Marsinah. Padahal ia hanya buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kesadaran politiknya muncul saat ia membaca surat edaran Gubernur KDH TK I Jawa Timur No. 50 Tahun 1992 yang menghimbau pengusaha agar menaikkan gaji sebesar 20% dari gaji pokok sebagai efek inflasi tahun tersebut. Bagi lulusan SMA Muhammadiyah Nganjuk ini, surat edaran adalah *good news* ditengah beban hidup yang menghimpit. Namun bagi pengusaha, itu *bad news* yang mengurangi profitnya. Karena tidak ada sinyal positif dari perusahaan, buruh PT. CPS berunjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250. Pasca demo, Marsinah menghilang. Jenazahnya ditemukan setelah 3 hari diculik.⁴

Kini kita sedikit menyadari tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Kesadaran adalah awal dari tindakan yang lebih besar... []

4 Slamet Rahardjo Djarot mengapresiasi perjuangannya dalam film “Marsinah: Cry Justice” (2001).

RINGKASAN:

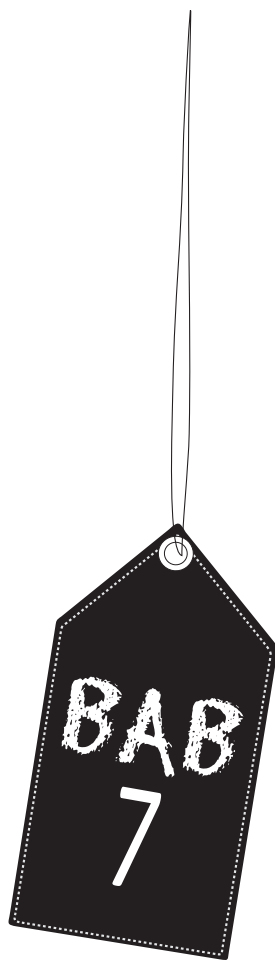
1. Perusahaan ingin seluruh eksistensi buruh larut dalam sistem perusahaan dan dimensi pekerjaan. Tujuannya agar buruh tidak berkesempatan merefleksikan diri dan membuat perbandingan dengan eksistensi lain di luar sistem kerja yang lebih bebas.
2. Buruh harus membuka lapis-lapis kesadarannya, mulai dari kesadaran jiwa hingga struktur, agar mereka dapat memilah wilayah privat/abstrak dan publik/material. Kekacauan dalam pemilahan ini akan mendistorsi relasi majikan-buruh dalam bentuk yang irasional dan personal yang malah memurukkan buruh dalam jerat kemiskinan.



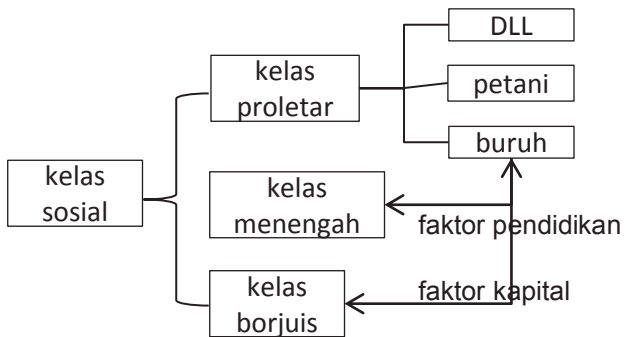
KALAU SEMUA BURUH SALING BERSATU, PASTI PERUSAHAAN TIDAK BISA BERBUAT SEMENA-MENA LAGI!!



Kelas juga bukan suatu determinasi nasib yang mustahil diubah. Bagi mereka kesadaran yang tertinggi dan kemewahan yang paling besar adalah ketika mereka mampu membebaskan manusia dari diperbudak oleh pikiran mereka sendiri.



BAB 7 : "MEMBUNUH" KELAS BURUH



"MEMBUNUH" KELAS BURUH

“All history has been a history of class struggles between dominated classes at various stages of social development”

Semua sejarah dunia merupakan sejarah perjuangan kelas antara kelas-kelas tertindas pada berbagai tingkatan perkembangan sosialnya

(Friedrich Engels, 1820-1895)¹

Menjadi “manusia” adalah pilihan hidup yang paling sulit. Ia bukan pelengkap komunitas. Dalam sosok tersebut terkandung pelbagai kompleksitas kehidupan. Kebaikan dan keburukan alam semesta tercermin dalam perilaku manusia. Bila ia menyadari misi hidupnya (darimana ia berasal, mengapa ia dilahirkan, untuk apa ia hidup, mau kemana setelah hidupnya), maka citra alam akan baik. Dengan refleksi yang mendalam manusia menyadari bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat tumbuh-kembang-makmur seorang sendiri, kecuali klaim emosional sepihak belaka. Peralihan kesadaran dari individual ke publik seperti ini mengarahkan manusia ke-

1 <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/preface.html>. 7 Juli 2011, 11:21 WIB.

pada kesadaran sosial yang selanjutnya menuntunnya pada kesadaran struktur-sistem, yakni sebagai apa ia akan berpikir, bersikap dan bertindak. Tidak heran, manusia disebut jagad cilik (mikrokosmos). Melalui kedua tangannya, seluruh sistem kehidupan di alam ini dapat berubah.

Ketika kedudukan ini ditarik ke wilayah antar manusia, maka manusia menyadari jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama memperoleh hak-hak prudensial (perasaan senang, kemakmuran, rasa aman, dll..). Berangkat dari kesadaran inilah maka manusia menjadi makhluk sosial (*homo socius*). Semua bentuk prudensialitas yang didambakan individu manusia meniscayakan keterlibatan manusia lainnya dalam suatu ikatan. Ikatan-ikatan ini yang melahirkan aneka sistem sosiologi dalam masyarakat.

Di titik kesadaran sebagai makhluk yang terikat pada sistem maka manusia menyadari bahwa dia harus menempatkan dirinya bermanfaat bagi sosial selain dia juga mengambil manfaat sosial. Hubungan ikatan ini murni merupakan suatu kesadaran yang melekat dalam diri tiap orang dalam hubungan produksinya, sesuatu yang alamiah tanpa mempertimbangkan kekayaan. Sejauh mana orang mampu membawa dirinya berfungsi dalam sistem sosial tergantung bagaimana dia mau dan berkemampuan mengembangkan kapasitas dirinya. Disinilah muncul masing-masing individu dengan aneka ragam keahlian menciptakan kesalingbergantungan. Ada kelompok yang memainkan peran di wilayah teknis, manajemen, organisasi, dan wilayah motivasi. Semua ini melahirkan apa yang kita kenal dengan kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas ini tidak bersifat melekat, melainkan hanya masalah kesepakatan dan pembagian tugas. Tidak ada orang yang mau mencangkul selamanya sebagai tukang cangkul selama tujuh turunan, atau orang yang berprofesi sebagai kuli panggul ber-

harap anaknya harus juga menjadi kuli.

Kelas dalam Sistem Produksi

Dalam sistem ekonomi tradisional, dimana alam menjadi faktor determinan dalam produksi maka setiap orang dalam sistem ini memiliki kewajiban bersama menjaga faktor-faktor penting pendukungnya. Kesalingterkaitan ini melahirkan tata aturan dalam masyarakat, pengorganisasian antar individu. Hubungannya bersifat egaliter, dimana setiap orang memiliki peran bersama dan arbitrari (mana suka). Sistem ekonomi bersama ini melahirkan budaya ekonomi bersama, gotong royong, *tepo seliro*, budaya harmoni saling bantu-membantu, ekonomi *self-sufficient*, ekonomi swadaya yang sekadar asal dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ekonomi ekspansif dengan uang dibelakangnya mengubah tatanan ekonomi bersama ini. Kedatangan modal menurunkan alam sebagai faktor determinan menjadi sekadar faktor pendukung saja. Alam tidak lagi dianggap penting, produksi besar-besaran berbasis order menjadikan tenaga kerja sebagai faktor yang lebih penting bagi sistem ekonominya.

Semua alat produksi termasuk tenaga kerja dinilai dengan uang. Pembagian hasil pengolahan alam tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan kelompok-kelompok sebagaimana tradisi ekonomi *self-sufficient* tetapi sepenuhnya untuk pasar. Dari komoditas yang diperolehnya, korporasi menjualnya ke pasar, dan di pasar dia mengembalikan keuntungan investasi duitnya berlipat-lipat. Semakin banyak uang yang dimilikinya, maka semakin besar pemilik modal mencapai penguasaan sistem produksi. Dengan uang dan kekayaannya, mereka menjadi kelompok yang paling dapat mengatur kelompok-kelompok lainnya. Para pemilik modal ini menjadi kelompok-kelompok elit yang kita kenal dengan sebutan kelas borjuis.

Sementara kelompok yang hanya mampu menyeter tenaga dalam proses produksi, dikenal dengan sebutan kelas pekerja (ploretar). Istilah dalam sistem ekonomi kapital ini kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembagian sistem sosial kemasayarakat yang dianggap permanen dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Manusia pekerja yang pada awalnya egaliter dan memahami bahwa pembagian kelas hanyalah sekadar pembagian tugas sosial dalam rangka mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama melalui pengolahan alam, perlahan-lahan mengubah "persepsi diri"nya menjadi pendapat baku; bahwa menjadi buruh/pekerja adalah nasib dan memang sudah menjadi ketetapan sosial.

Kontraksi kelas Buruh

Sistem ekonomi kapital yang menempatkan kelas buruh sebagai salah satu alat produksi menimbulkan pula hukum *supply-demand*. Besarnya permintaan tenaga buruh demi mendukung investasi dan kredit yang ditanamkan pemodal di sektor industri menyebabkan buruh, dari sekadar kelas sosial menjadi bagian dari komoditas ekonomi.

Apabila pada masa lalu, ekonomi kapital menggunakan kuasa imperialisme dan fasisme demi memperoleh tenaga buruh murah melalui "kerja paksa" dan perbudakan (*slavery*), maka pada masa sekarang korporasi mengandalkan keberadaan negara dan agen-agen pencari kerja melalui aneka peraturan dan semangat membuka lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana buruh menyadari bahwa dirinya adalah alat produksi yang penting, yang memiliki hak untuk memperoleh pembagian yang layak dari keuntungan korporasi agar tercapai cita-cita kesejahteraan dan kemakmurannya.

Besaran upah yang kita terima sangat menentukan gaya

dan pola hidup apa yang akan kita jalankan, dengan siapa kita berkawan dan seberapa jauh kita dapat bertindak. Buruh yang terkungkung dalam sistem sosial proletarnya telah mematok nasibnya untuk menua dan mati sebagai buruh dengan menerima dan mengakui sistem perburuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada penolakan atau perlawanan yang buruh dapat lakukan untuk mendesain ulang sistem perburuhan yang mereka jalani selama ini. Apapun dalihnya, buruh telah berada dalam zona nyaman (*comfort zone*), menyukuri hidupnya sebagai bahan bakar perusahaan.

Penindasan tidak akan terjadi tanpa kesepakatan antara kaum penindas dengan kaum yang ditindas. Cukup mengenaskan, karena buruh sebagai objek penderita, menyetujui sistem penindasan ini hanya karena terbiasa tertindas. Keseragaman kita dalam berpikir dan bertindak merupakan afirmasi atas nilai-nilai yang ditawarkan oleh kelas sosial yang kita masuki. Sedangkan kelas lain (*borjuis*) terus memperkuat diri karena memang tidak ingin berubah sebagai kelompok dominan dan penguasa alat produksi.

Pengusaha hanya butuh tenaga buruh. Pada zaman dulu, pekerjaan banyak dilakukan dengan kekuatan otot. Orang-orang bertenaga besar, berbadan sehat, dan tidak mudah sakit, itulah yang banyak dilirik pengusaha. Tapi itu dulu. Sekarang, setelah mesin modern berdatangan, setelah manajemen semakin “profesional”, tenaga kerja kasar mulai tersingkir perlahan-lahan. Buruh berpendidikan formal rendah, harus semakin menunjukkan ototnya agar dapat terus dipakai perusahaan. Sementara perusahaan mulai mencari buruh kontrak berijazah perguruan tinggi, untuk perlahan-lahan menggantikan pekerja organik.

Kini segala hal diatur oleh hukum, perundang-undangan. Memang fisik pengusaha kalah kuat dibanding buruh. Tapi

pengusaha punya senjata (melalui tangan aparat negara), punya hukum (punya divisi legal yang handal), dan tentu saja uang (untuk menyuap siapa saja). Karenanya buruh selalu kalah karena mudah dibodohi pengusaha. Mereka tidak mampu meraih hak-hak normatifnya karena tidak bisa mendesain **gerakan perlawanan**, tidak tahu **undang-undang ketenagakerjaan**, tidak tahu **berorganisasi**, dan tidak mau melakukan **kajian-kajian**. Akhirnya, kaum buruh tidak pernah bersatu karena mereka mudah diadu domba. Buruh cukup senang dikasih tunjangan ini, itu, meskipun upah pokok mereka tidak naik bertahun-tahun.

Namun kita masih punya sikap dan pikir mandiri dengan kemampuan mengolah dan memilah segala informasi yang kita terima. Kaum proletar tidak menerima semua konsepsi nilai yang ditawarkan oleh kelas borjuis. Hanya melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya, buruh proletar mampu melebur nilai-nilai lama dalam dirinya sebagai konstruksi nilai baru yang kemudian kita pilih sebagai pemandu jalan hidup kita.

Perjalanan hidup sastrawan Inggris George Orwell (25 Juni 1903 – 21 Januari 1950) yang ia paparkan dalam *“Down and Out in Paris and London”* (1933) dapat mewakili bagaimana seorang anggota kelas tidak mengalami dan memahami posisi kelasnya. Ia meninggalkan statusnya sebagai kelas menengah-borjuis-berpendidikan namun miskin, dan menerjuni pengalaman hidup sebagai paria, gelandangan dan pencuci piring setelah gagal meraih karir sebagai penulis.

Orwell tidak berinteraksi dengan komunitas buruh pencuci piring dan tidak mendalami sistem perburuhan yang mengelilinginya. Hasilnya, tetap saja kelas sosialnya mengikat eksistensinya sebagai individu, tidak membuatnya melebur sebagai bagian dari kelas proletar, yang hanya berpikir

menjadi buruh adalah nasib terakhir. Pikirannya tidak mudah diintervensi oleh suatu keadaan sosial sehingga menjauhkannya dari kelas yang melingkupinya. Orwell menunjukkan bahwa dalam tubuh seorang budak atau pekerja rendahan, seorang manusia selalu mempunyai peluang yang sama untuk menjadi orang merdeka dan warga terhormat.

Kisah Orwell menunjukkan bahwa kelas sosial tidak deterministik. Jika dia determinis, kita dapat pastikan bahwa ada kelas-kelas lain yang tidak rela dan berkeinginan untuk tetap memeras tenaga kelas buruh demi keuntungan-keuntungan mereka. Kita dapat berpindah kelas sosial, baik naik ke kelas borjuis atau turun ke kelas proletar, tanpa harus menjalani kelas sosial dimaksud, selama kita memiliki salah satu dari dua syarat perubahan tersebut, yaitu kapital dan pendidikan. Seorang buruh proletar dapat naik kelas dari proletar ke borjuis karena faktor pendidikan yang memungkinkannya menaikkan posisi tawarnya sehingga meraih tambahan materi dan fasilitas. Dengan limpahan kemewahan tersebut, ia bisa berbalik melawan serikat yang menentang kezaliman korporasi. Meskipun mungkin pada awalnya ia adalah salah satu eksponen serikat buruh yang vokal. Sungguh, ironi ini kerap terjadi.

Kita menamakan urusan turun kelas dari kelas borjuis ke proletar sebagai *bunuh diri kelas*. Kebanyakan kelas yang memperjuangkan kaum buruh tidak banyak yang berasal dari buruh, melainkan mereka yang dulunya mendapatkan kemudahan materi dan fasilitas, mereka yang berasal dari kelas menengah-atas yang barangkali belum pernah mengalami kesulitan ekonomi sebagaimana kebanyakan diderita kelas buruh. Dipadu dengan konsep-konsep universal tentang kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan, maka subjek pengamat dari kelas borjuis dapat menjadi pembela paling gigih dari

perjuangan kaum buruh.

Pengalaman membuat jarak subjek pengamat dan objek yang diamati merapat hingga suatu kondisi pengamat adalah objek yang diamati itu sendiri. Kemelekatan ini tidak berarti bahwa subjek mesti mendapatkan perlakuan yang sama persis sebagaimana yang diterima oleh objek (pihak yang paling lemah). Cukup subjek mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang dipahami, dirasakan dan diharapkan oleh objek, sehingga subjek bukan lagi pengamat netral dengan paparan argumentasi ilmiahnya, melainkan seorang partisan yang mendukung dengan sepenuh hati.

Dengan posisi demikianlah kita dapat memahami mengapa Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (19 Februari 1896 – 16 April 1949), seorang bangsawan terdidik dari Minangkabau, dapat memusuhi kelas bangsawan dan borjuis lainnya karena perilaku kelas mapan tersebut terhadap suku Jawa yang menjadi buruh perkebunan di Sumatera. Raden Ajeng Kartini, anak Bupati Jepara (21 April 1879 – 17 September 1904), bersusah payah mengajar kaum perempuan di daerahnya agar mereka menyadari harkatnya sebagai perempuan, padahal praktik itu sama sekali tidak menguntungkan pribadinya yang hanya lulusan ELS (Europese Lagere School) atau tingkat sekolah dasar. Begitu pula Siti Soendari, yang berpendidikan Belanda, adalah perempuan pertama yang mengorganisir buruh kereta api Semarang.

Ada pula Raden Mas Tirto Adhi Surjo (1880 – 17 Agustus 1918), aktor utama Sarekat Dagang Islam (1905) dan tokoh pers. Ia menggunakan koran sebagai media propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia pun berani mengecam pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu, sehingga ia sempat ditangkap di Jawa dibuang ke Pulau Bacan. Mohamad Hatta (12 Agustus 1902 – 14 Maret 1980), keturunan

bangsawan-ulama Minangkabau, yang memilih berpolitik melalui Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging) setelah pemahamannya tentang nasionalisme makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Tentu saja kita tidak melupakan Ir. Soekarno, keturunan raja Bali yang menolak kenaikan pangkat menjadi master kepala arsitek di Bandung dengan gaji 3000 Gulden, pada waktu itu setengah gulden bisa hidup senang-senang, asal mau meninggalkan aktivitas politiknya.

Semua tokoh ini rela bunuh diri kelas demi putusya rantai kolonialisme di Indonesia. Ada juga tokoh nasional yang naik kelas karena pendidikan namun dengan kesadaran membela kaum tertindas. Contohnya saja Semaoen (1899 – 1971) yang menjadi pimpinan Sarekat Islam (SI) Semarang pada usia 19 tahun. Padahal ia cuma anak pegawai rendahan dan hanya sekolah Tweede Klas (sekolah bumiputra kelas dua). Kemuannya yang besar untuk sekolah dan menguasai bahasa Belanda menarik perhatian Henk Sneevliet (13 Mei 1883 – 13 April 1942) pendiri Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, ISDV) yang akhirnya mendidiknya secara khusus.

Pada orang-orang yang memiliki kesadaran alamiah seperti yang kita sebut diatas, maka kelas bukan lagi suatu bentuk kemewahan dan kehormatan. Kelas juga bukan suatu determinasi nasib yang mustahil diubah. Bagi mereka kesadaran yang tertinggi dan kemewahan yang paling besar adalah ketika mereka mampu membebaskan manusia dari perbudakan pikiran mereka sendiri. Sehingga tugas yang paling besar bukanlah mengumpulkan kekayaan atau memelihara kelanggengan kelas mereka, namun memberikan pendidikan kesadaran bagi rakyat pekerja agar mereka menjadi orang merdeka, karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan tanpa

kelas-kelas, setara baik hak dan kewajibannya.

Kemandirian kelas

Apakah kelas buruh dapat memerdekakan dirinya sendiri tanpa bantuan dari kelas lain? Menurut tokoh naturalis Charles Darwin (1809 – 1882), **keberadaan sebuah kelas mensyaratkan seleksi alam**, maka kelas yang tidak mampu berjuang akan punah, digantikan oleh kelas yang lebih kuat. Dalam konteks sosial, sejarah panjang manusia hanya menorehkan kejayaan kelas borjuis yang kapitalistik atas kelas buruh proletar sebagai pecundang. Konsep semacam ini sulit kita terima karena hanya membuat perilaku manusia tak ubahnya hewan yang bergerak karena dorongan insting.

Interaksi manusia dengan manusia lain menghasilkan konstruksi nilai baru yang membarui nilai-nilai lama, yang seyogyanya secara perlahan membuat manusia semakin beradab. Mungkin saja pada masa lalu penindasan dalam wujud perbudakan merupakan hal yang lazim dan dipraktikkan selama ribuan tahun oleh banyak suku bangsa. Namun transformasi ilmu pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang semakin tinggi akan merevisi konsep-konsep primitif tersebut. Apabila panggung sejarah manusia hanya kumpulan kisah penindasan yang sudah ditentukan sejak awal, dapat dipastikan manusia tidak punya inisiatif dan daya kreasi untuk membangun peradaban. Namun sejarah manusia yang dinamis membuktikan kepada kita bahwa sejarah manusia bukanlah sejarah hewan. Dengan demikian, konsep pertarungan kelas dalam dunia manusia tidak dapat dianalogikan begitu saja dengan dunia hewan.

Vladimir Ilyich Lenin (1870 – 1924) menolak kemandirian kelas buruh dan kemampuannya untuk memperbaiki diri. Kesadaran sosialis buruh tidak dapat muncul secara tiba-tiba.

Serikat buruh yang menaungi mereka pun tidak otomatis mengubah mereka sebagai gerakan progresif. Serikat buruh hanyalah sekolah buruh, tahap awal menuju partai pelopor (*vanguard party*). Baginya, buruh adalah pribadi yang belum selesai. Masalah mendasar buruh terletak pada intelektualitasnya dan penguasaan kapital yang terbatas. Gerakan buruh tanpa kaum progresif hanya memunculkan pemberontakan, bukan revolusi sosial. Penyadaran dan tahapan kesadaran revolusioner hanya mampu dilakukan oleh kelas intelektual yang berada diluar dan berbeda dengan kelas buruh. Setelah revolusi selesai, buruh dikembalikan ke pabrik-pabrik untuk menopang kediktatoran proletariat.

Meski terlihat keren, tesis dari Lenin sebetulnya mengundang pertanyaan juga. Bagaimanakah buruh yang nyata-nyata berperan penting dalam perubahan sosial pada akhirnya hanya menjadi buruh dibawah rezim diktator proletariat yang berisi orang-orang intelektual. Artinya buruh hanya berganti bos, bila dulu dikuasai kelas borjuis pemilik modal sekarang dikuasai kelas teknokrat. Apabila kita bandingkan dengan tesis Gramsci di bawah ini, akan dapat kita peroleh bahwa perubahan sosial tidak dapat diberikan begitu saja kepada satu kelompok tertentu. Buruh harus memiliki kesadaran mengorganisir dirinya, dengan harapan kemampuan bersatu ini akan menjadikannya "waspada" terhadap kelompok-kelompok yang hanya mau mendompleng kerja keras mereka.

Menurut Antonio Gramsci, kebangkitan kelas buruh tidak dapat terjadi tanpa melalui perubahan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Kaum buruh menghadapi aliansi strategis antar kaum feodal dan kapitalis, yang disebutnya kelas-kelas yang bermilik (*propertied classes*). Meskipun relasi antar kelas borjuis tersebut tidak selamanya akur, setiap saat mereka berkompetisi untuk memperluas alat produksi dan mempe-

nangkan pasar, mereka kompak dalam menghadapi gerakan kelas proletar, yang disebutnya sebagai kelas-kelas yang tidak bermilik (*propertyless classes*). Sebab, kemenangan revolusi proletar akan menghancurkan seluruh sistem borjuis dan menghabis anggota-anggota kelas borjuis tersebut.

Bagi Gramsci, kelas pekerja (buruh perkotaan) harus memimpin gerakan revolusioner dengan cara beraliansi dengan kaum tani (buruh pedesaan). Pada hakikatnya, revolusi harus menyeluruh dalam berbagai lapis sosial, bukan hanya terjadi di pabrik-pabrik, dan kaum tani punya kebutuhan untuk bebas dari penindasan kaum feodal. Namun karena jumlah yang kecil, kaum buruh dituntut untuk meraih dukungan dari kelas menengah yang terdiri dari kaum borjuis kecil dan kaum intelektual demi melancarkan perjuangan anti kapitalisme dan menghemat biaya politik. Dengan bantuan kaum intelektual progresif, buruh dapat mengenalkan gagasan perlawanan dan nilai-nilai alternatif untuk menyusun hubungan industrial yang berkeadilan.

Memulai Pendidikan

“Kekuasaan kaum modal berdiri atas didikan yang berdasar kemodalan. Kekuasaan rakyat hanyalah bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan.”

(Tan Malaka)

Buruh yang tidak mau mengembangkan diri, merasa cukup di zona nyaman, tidak mau belajar hukum perburuhan, enggan mempelajari ideologi dan teori politik-ekonomi, tidak mau berdiskusi dan berbagi peran dalam organisasi, akan punah secara perlahan dimangsa perusahaan. Kata Tan Malaka, untuk keluar dari rantai penindasan ini, buruh harus melengkapi diri dengan tiga jenis pendidikan, yaitu: Pendidikan ketrampilan, Pendidikan berorganisasi, dan

Pendidikan yang berorientasi ke bawah (proletar). Hanya dengan pendidikan kritis maka nasib buruh bisa berubah.

Karl Kautsky (1854 – 1938) memberikan pandangan lain. Baginya, kaum buruh dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui keterlibatannya dalam serikat buruh dan kekuatan melalui solidaritas serikat buruh, bukan melalui orang luar (kaum intelektual). Mungkin saja kesadaran berserikat diletupkan oleh kaum progresif yang mendampingi komunitas buruh. Namun dengan pembangunan sistem perkaderan didalam organ serikat, setiap anggota serikat buruh memungkinkan diri untuk menduplikasi kajian-kajian ideologis kepada kalangan buruh lainnya. Artinya buruh tidak dapat sepenuhnya menggantungkan nasibnya pada kelompok lain, meski kita paham bahwa buruh membutuhkan mereka namun inti sebenarnya dari proses pendidikan adalah bagaimana buruh memiliki kecukupan modal untuk berpikir dan mengorganisasi diri.

Suatu pendidikan yang hanya menggantungkan pada satu kelompok amat sangat mudah diruntuhkan. Bilamana kelas progresifnya dihadang, diancam, atau disuap maka gerakan tersebut berhenti. Untuk mencegahnya maka meraih pendidikan yang dapat melahirkan buruh-buruh pendidik adalah hak bagi setiap buruh sebab setiap perubahan akan berhasil bilamana datang dari kesadaran diri mereka yang memang ingin berubah.[]

RINGKASAN:

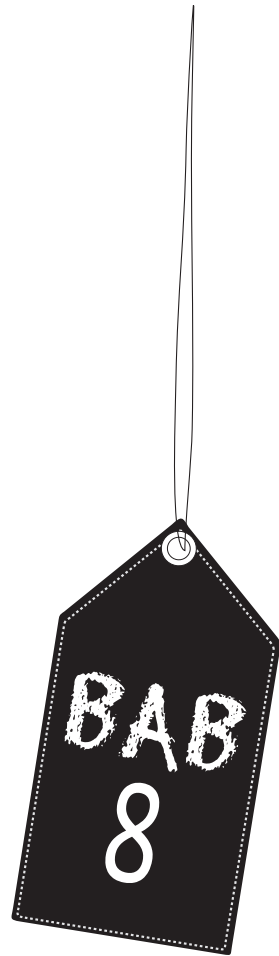
Kaum buruh adalah bagian dari kelas proletar garda terdepan dalam perjuangan anti kapitalisme karena mereka merupakan kelas terbawah dalam struktur kerja kapitalisme. Untuk menguatkan perlawanan, kelas buruh harus meningkatkan kapasitas dirinya melalui pendidikan sehingga mereka dapat beraliansi dengan kaum sesama kelas proletar dan kelas menengah yang peduli dengan kelas proletar. Pada saat yang sama, pengklasifikasian manusia dalam kelas-kelas borjuis atau buruh bukanlah suatu yang deterministik, buruh pun berhak naik kelas dengan membunuh stigma buruk atas kelasnya.



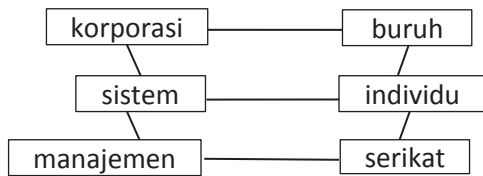
John Tanjung 2011



Sungguh salah bila elit pengurus serikat buruh masih menunduk-nunduk dihadapan pengusaha. Harga diri buruh akan hilang saat hanya bisa meratap, meminta-minta, dan mengharap belas kasihan pengusaha untuk perubahan nasibnya.



BAB 8: UNIONISM



UNIONISME

“If it wasn’t for union workers and labor unions,
there would be no 40-hour work weeks,
eight-hour work days, pensions or vacations.”

Jika bukan karena serikat pekerja dan serikat buruh,
tidak akan ada 40-jam minggu kerja,
delapan jam hari kerja, pensiun atau liburan.

(Thomas Graham)¹

Penderitaan buruh bukan sekadar masalah upah atau kepastian status saja. Lebih luas lagi, buruh dan pekerjaannya masuk dalam desain eksploitasi ekonomi global. Eksploitasi ini tidak terjadi begitu saja atas alasan pemusatan modal. Penindasan juga terjadi karena “kesepakatan” antara penindas dan yang ditindas. Bisa saja penindasan yang terjadi terhadap buruh disebabkan karena buruh tidak benar-benar cukup kuat menghadapi serangan-serangan ini, dan akhirnya mengalah “bersepakat” dengan nasib yang menimpa mereka. Bila kenyataan yang terjadi saat ini sudah demikian menekan, maka

1 http://thinkexist.com/quotes/thomas_graham/ 8 Juli 2011, 02:47 WIB. Thomas Graham (1805-1869) adalah ahli kimia dari Skotlandia

seharusnya kita bisa berpikir lebih mendalam apa nilai dasar bagi kekuatan dan modal yang seharusnya dimiliki oleh kelas buruh agar mereka tidak lagi menjadi kayu bakar kapitalisme.

Sebagaimana yang telah kita singgung pada bab-bab sebelumnya, buruh mudah ditindas karena tidak memiliki kesadaran kelas. Mereka bergerak sendiri, menganggap semua hubungan antara dia dan majikan semata-mata masalah individual. Ia berorientasi jangka pendek, bekerja demi keamanan posisi pribadinya semata, tidak peduli nasib sial yang dialami rekan buruh lainnya. Ia terfragmentasi pada upah dan karir. Akhirnya, ia menjadi pecundang. Buruh semacam ini, yang pasrah, hakikatnya telah menggadaikan nasibnya kepada pemilik modal.

Merdeka ala Bung Karno

Soekarno mempunyai resep bagaimana mencapai kemerdekaan kelas buruh. Pada 1 Juni 1945, didepan majelis BPUPKI, beliau memaknai kemerdekaan sebagai jembatan emas bagi rakyat Indonesia agar diseberryangnya rakyat dapat meraih kesejahteraan. Katanya, indikator utama kemerdekaan adalah perasaan senasib, kehendak untuk bersatu dan semangat untuk berjuang dalam ikatan kebangsaan. Ia mengutip Ernest Renan, bahwa bangsa terbentuk karena *“le desir d’etre ensemble”*, yaitu kehendak untuk bersatu. Ia juga mengutip Otto Bauer, bahwa syarat terbentuknya sebuah bangsa adalah persatuan karakter yang timbul karena persatuan nasib, *“Eine Nation ist eine aus schicksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”* (bangsa adalah suatu kelompok yang lahir atas kesadaran senasib dengan orang-orang sekelompoknya).

Pada konteks pidato Bung Karno, kekuatan kelas buruh muncul saat mereka punya kehendak untuk memerdekakan diri. Betapapun banyaknya, jumlah buruh laksana buih di laut-

an saat mereka tidak mampu bersatu dalam suatu wadah organisasi. Melalui organisasi, buruh akan dipandang penuh hormat oleh pengusaha, bukan karena belas kasihan. Dalam serikat, buruh menegaskan bahwa roda produksi tidak akan berputar tanpa hubungan yang sejajar antara pengusaha dan buruh. Bersama serikat, buruh punya kemampuan mengawasi kebijakan-kebijakan perusahaan yang menyangkut kelangsungan perusahaan dan nasib semua pekerja dirundingkan agar keputusan yang diambil benar-benar bijak dan saling menyehatkan. Sungguh salah bila elit pengurus serikat buruh masih menunduk-nunduk dihadapan pengusaha. Harga diri buruh hilang saat hanya bisa meratap, meminta-minta, dan berharap belas kasihan pengusaha untuk perubahan nasibnya. Kata Soekarno, “Politik *minta-minta* satu kali akan berhasil, tetapi sembilan puluh sembilan kali niscaya akan gagal.”

Mendukung visi Soekarno, Hatta menulis; kesulitan yang harus dipertimbangkan korporasi untuk memusatkan modal dan usaha, adalah tekanan dari buruh. Tekanan ini hanya akan berarti bilamana buruh bersatu-padu dan terorganisir dalam serikat buruh/pekerja (union). Lewat serikat yang terorganisir baik, semua tuntutan akan kesejahteraan, seperti aturan waktu kerja, cuti, bonus, gaji, fasilitas materi atau remunerasi yang dibutuhkan buruh akan lebih mudah dipenuhi korporasi.

Apa yang Harus Dilakukan?

“We must learn to live together as brothers or we are going to perish together as fools.”

Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara atau kita akan binasa bersama-sama sebagai orang bodoh. (*Martin Luther King Jr.*)²

2 <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/martinluth101309.html>. 8 Juli 2011, 04:02 WIB. Martin Luther King Jr. (1929-1968) adalah aktivis anti rasisme yang memperjuangkan kesetaraan hak sipil orang Amerika ke-

Hanya satu hal yang harus buruh lakukan: Berserikat. *Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh*. Berserikat adalah hal alamiah yang juga dilakukan oleh kelompok hewan. Gajah, misalnya, berserikat membentuk formasi "A" untuk melindungi kawannya yang masih kecil atau lemah; burung-burung flamingo bergerombol saat terbang dengan membentuk formasi "V" untuk memecah angin agar mereka dapat terbang jauh; ikan-ikan berkumpul demi menghindari dari mangsa ikan yang lebih besar. Berserikat adalah kemestian setiap makhluk. Demikian pula dengan manusia, bila hewan yang hanya memiliki naluri berserikat, demi meraih tujuan yang lebih tinggi, maka manusia sebagai makhluk rasional dan bernalar sosial seharusnya jauh lebih paham kebutuhan itu.

Binatang berserikat demi keamanan diri semata. Namun serikat manusia terjadi karena adanya tujuan bersama. Hanya manusia yang bisa membangun peradaban. Serikat bebek tidak pernah bisa memperbaiki pola makan. Tapi serikat manusia bisa mengubahnya dari sekadar makhluk yang berorientasi makan-minum-sekreasi menjadi makhluk yang lebih luhur lagi, makhluk sosial yang beradab. Nah, tujuan manusia berserikat adalah untuk "memberikan perlindungan, pembealaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/ buruh dan keluarganya."³

Keberadaan serikat buruh mengikuti sejarah perkembangan korporasi. Tanpa korporasi, tidak ada buruh dan serikat. Bila korporasi mengakumulasi kapital, maka jalan mengimbanginya bagi buruh adalah melalui akumulasi massa buruh. Pada awalnya serikat berasal dari pekerja metal dan transportasi, dua *core business* yang meledak ketika kapitalisme Amerika serikat yang boleh dibilang tidak mengenal kelas-

turunan Afrika.

3 Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

kelas, memperkenalkan kapitalisme modal dalam wujud yang massif. Pembukaan ladang-ladang minyak dan mineral diikuti dengan pertumbuhan transportasi dan alat-alat pengangkutan. Setiap industriawan AS secara budaya terlepas dengan gaya kapitalisme Eropa yang masih peduli dengan hirarki dan sistem feodal. Kapitalisme Amerika melahirkan etika protes-tan, siapa saja mau berpikir merdeka, kreatif, gila ide, gila kerja boleh menjadi orang kaya.

Boleh kita sebut bahwa, kebebasan "menjadi orang" ini yang membuat kesadaran buruh bergabung dalam serikat lebih dulu lahir di AS.⁴ Rantai panjang dari sistem investasi-eksplorasi-produksi-distribusi melahirkan rantai panjang produksi yang tidak hanya melahirkan orang kaya baru, tetapi juga semakin menunjukkan pentingnya kerja buruh. Kesadaran "merdeka dari hirarki dan stigma kelas rendahan", ditambah kesadaran bahwa "buruh adalah faktor penting" dan lahirnya kesadaran bahwa buruh pun bisa "menjadi orang" menjadi cikal dari akumulasi kekuatan buruh dalam serikat-serikat.

-
- 4 Pada tanggal 1 Mei 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak 1 Mei. Pada 4 Mei 1886, polisi menembaki para demonstran saat aksi demonstrasi di bundaran lapangan Haymarket di Chicago, Illinois. Ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum gantung. Sebelum peristiwa ini, pemogokan-pemogokan buruh juga terjadi di berbagai negara untuk menuntut perlakuan yang lebih adil dari para pemilik modal. Pada bulan Juli 1889, Kongres Internasional Kedua di Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi: "Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dan waktu yang bersamaan pada satu hari yang disepakati bersama di semua negara dan kota-kota. Semua buruh harus menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis."

Pada saat yang sama di Eropa, serikat buruh terbentuk dua ratus tahun setelah Revolusi Industri (abad 19), setelah penghisapan korporasi memakan korban tujuh generasi. Kolonialisme merambah belahan dunia Amerika Latin, Asia dan Afrika, buruh turut migrasi dan menguat seiring pembebasan koloni-koloni dari negara induknya. **Kuatnya penanaman budaya feodalisme dan stigma minder sebagai orang kuli**, membuat gerakan buruh di Eropa dan di tanah-tanah jajahannya tidak secepat yang terjadi di Amerika. Ini menjadi isyarat bahwa perubahan dan akumulasi tenaga kerja hanya bisa terjadi dengan membuka kesadaran tiap-tiap buruh.

Di Indonesia, serikat mengikuti masuknya investasi di Indonesia. Jumlah buruh yang terbesar dimulai dari perkebunan gula, komoditi utama saat itu. Pembentukan serikat di Indonesia secara formal dimulai dari serikat buruh kereta api Semarang. Gerakan mereka terinspirasi dengan aksi boikot buruh kereta api Inggris yang mencabuti pin-pin rel karena menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Gerakan massa buruh ini mampu membuka ketertutupan dan feodalisme kerja yang menghantui buruh-buruh Inggris. Sukses gerakan mereka diikuti dengan tuntutan-tuntutan lain seperti perlindungan kerja, kebebasan berpolitik, dan tentu saja membangun dan menjalankan serikat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana buruh tanpa serikat.⁵

Dahulu, buruh yang tidak punya alat produksi, kehilangan lahan karena dirampas kaum bangsawan dan menjadi

5 Beberapa serikat yang muncul seiring dengan perkembangan industri di Indonesia era kolonial belanda, misalnya: Serikat Pekerja Guru Belanda, *Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG)* (1879), Serikat Pekerja Pos (*Pos Bond*) (1905), Serikat Pekerja Perkebunan (*Cultuur Bond*) dan Serikat Pekerja Gula (*Zuiker Bond*) 1906, Serikat Pegawai Pemerintah (1907), Serikat Pekerja Kereta Api (*Vereniging Spoor-Traam Personeel (VSTP)*) (1908), *Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB)* pimpinan Semaoen (1919), dan lain-lain.

penggarap setelah ekspansi korporasi perkebunan besar. Sebelum ada serikat, buruh tidak memperoleh penghargaan padahal bekerja tanpa batasan waktu, hingga enam belas jam per hari, tujuh hari per minggu. Dengan upah murah, mereka mendapat hukuman yang keras dengan landasan peraturan perburuhan yang semena-mena. Hukuman mati, dipenjarakan, dicambuk, dibuang ke laut, hingga kerja paksa merupakan suatu hukuman yang lumrah diterima buruh pada masa itu. Bahkan dalam suatu kondisi, apa yang dikerjakan buruh tidak dapat disebut "pekerjaan", melainkan "pengabdian", karena pada praktiknya mereka diperlakukan sebagai budak, bukan buruh. Dalam kondisi tekanan kerja yang sangat tinggi, buruh bisa mengalami karoshi (bahasa Jepang), yakni "mati akibat bekerja terlalu keras". Kematian mendadak kerja pada umumnya karena serangan jantung dan stroke karena stres. Kebangkitan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II, misalnya, telah dianggap sebagai pemicu korban karoshi yang signifikan.

Semua penderitaan ini dirasakan sepenuhnya oleh Chun Tae-il (1948 – 1970). Sebagai helper (pembantu umum) pada usia 16 tahun di Pasar Damai di kawasan Chonggye-chun, Seoul (salah satu produsen pakaian terbesar se-Korea Selatan), ia mengerjakan hampir semua pekerjaan; membantu mekanik dan tukang potong menyetrika, membersihkan dan merapikan jahitan, memasang kancing, dan melaksanakan segala macam perintah majikan mereka. Ia bekerja dalam sistem kerja yang buruk, 14-15 jam per hari tanpa bayaran tambahan. Bahkan, manakala pesanan berlimpah, para pekerja tidak tidur berhari-hari. Mereka hanya libur dua hari per bulan. Tidak ada izin untuk cuti, apalagi cuti haid, untuk buruh yang rata-rata adalah perempuan muda.

Tae-il dipecat dari pekerjaannya setelah ia dan rekan-

rekannya mendirikan “Masyarakat Orang Bodoh”. Karena ia tidak diterima oleh pabrik garmen manapun di Pasar Damai, ia menjalani hidup sebagai buruh bangunan. Beberapa tahun kemudian ia kembali ke Pasar Damai dan bekerja sebagai tukang potong. Ia mengorganisir sebuah serikat buruh dengan nama Asosiasi Persahabatan Samdong. Di sana ia dan kawan-kawannya mengajukan petisi ke Kementerian Perburuhan untuk meminta perbaikan nasib pekerja, terutama masalah waktu kerja. Petisi itu ditolak. Pada 13 November 1970, dalam suatu aksi demonstrasi yang diliput banyak media massa, Tae-il membakar diri dengan bensin. Dengan tubuh berapi itu ia berlari ke arena unjuk rasa sambil berteriak-teriak, “Kami bukan mesin!”, “Biarkan kami libur di hari Minggu,” “Buruh jangan dieksploitasi”, dan lain-lain, sebelumnya akhirnya roboh. Menjelang kematiannya, Chun Tae-il masih sempat berbisik, “Jangan biarkan kematianku sia-sia.”

Setelah buruh menemukan kesadaran kelasnya, mereka menjadi kekuatan massa yang riil. Keberadaan serikat menyadarkan pengusaha bahwa buruh bukan sekadar sapi perah. Sehingga dalam proses negosiasi upah dan kesejahteraan, buruh punya kemungkinan memperoleh penghargaan (pensiun, bonus, tunjangan, dll); Buruh bekerja dengan batasan waktu (misalnya, delapan jam per hari, lima hari per minggu); Manajemen dapat diseret ke pengadilan, dan peraturan perburuhan tidak boleh dibuat satu pihak saja dan mengabaikan kesepakatan bersama dengan serikat. Dengan serikat, kita mengetahui metabolisme alamiah kita: sepertiga waktu buruh adalah untuk tidur, bekerja, dan keluarga. Serikat juga menghasilkan “weekend”. Semboyan serikat buruh di Amerika Serikat, “*Unions, the folks who brought you the weekend.*” Serikat adalah organisasi yang memberi anda weekend.

Landasan Konstitusional

Ruang ekspresi buruh Indonesia terbuka lebar sejak awal kemerdekaan. Konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 Ayat 2). Konsekuensinya, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" (Pasal 28 D Ayat 2). Dan untuk memastikan hak-hak buruh, maka "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" (Pasal 28E Ayat 3). Selanjutnya pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No. 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi melalui Keppres RI No. 83 Tahun 1998. Konvensi ILO No. 98/1949 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama juga diratifikasi melalui UU Republik Indonesia No 18 Tahun 1956).

Sebenarnya, Pasal 28 UUD 1945 sudah sangat jelas menjamin kebebasan berserikat. Isinya sama dan lebih kuat dari Konvensi ILO 87 Tahun 1948. Sehingga rezim Soekarno hanya memandang perlu mengatur teknis berorganisasi dan berunding dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949. Namun karena trauma kolektif pada era Orde Soeharto, pasca reformasi pemerintah merasa perlu menguatkan bobot Pasal 28 dengan meratifikasi Konvensi ILO 87 Tahun 1948 yang sebenarnya tidak perlu secara yuridis. Tak lama kemudian, pemerintah juga mengeluarkan tiga paket UU tentang Ketenagakerjaan, yaitu UU NO. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa ketiga UU tersebut menuai kritik dari pengusaha dan buruh, fokus kita adalah pada politik ako-

modasi negara tentang keberadaan dan kiprah kaum buruh.

Mengorganisir Diri

“Organizing isn’t about the boss, it’s about workers. It’s about their need for some power or influence over their jobs and their lives. So it doesn’t matter if the boss is kind or moderate, benevolent, or vicious... It doesn’t matter what they say or do; this isn’t about them, it’s about us.”

“Berserikat itu bukan kebutuhan majikan, tapi kebutuhan pekerja. Merupakan kebutuhan mereka untuk memperoleh kekuasaan atau pengaruh atas pekerjaan dan hidup mereka. Jadi, tidaklah penting apakah majikan itu ramah atau moderat, baik atau kejam...bukan masalah apakah mereka bilang: ya atau tidak. Ini bukan persoalan mereka, ini persoalan kita.”

(Kris Rondeau, The Harvard Union of Clerical and Technical Workers)⁶

Salah satu hak buruh yang asasi adalah boleh mendirikan atau bergabung dalam organisasi Serikat Pekerja/Buruh.⁷ Bagi pengusaha yang masih membangkang dapat dikenai tindak pidana kejahatan.⁸ Sehingga, pertanyaan apakah kita mau membangun dan berkiprah dalam serikat bukan lagi himpu-

6 <http://www.newunionism.net/inspirations.html>. 8 Juli 2011, 05:12 WIB.

7 Pasal 28 UU No. 21 Th. 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Sia-papun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: (a) melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; (b) tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; (c) melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; (d) melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

8 Pasal 43 Ayat 1: Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

nan kata retorik. Tentu ada saja hambatan dan rintangannya, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi empat pokok masalah, yaitu masalah *individual*, *solidaritas antar anggota*, *soliditas organisasi*, dan *solidaritas antar organisasi*. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari korporasi dan negara. Sistem korporasi yang mengondisikan buruh sebagai makhluk soliter, introvert, fokus kepada integritas personal untuk pencapaian promosi jabatan pada tingkatan tertentu, membuat buruh merasa tidak punya alasan cukup untuk bergabung dengan atau mendirikan serikat buruh. Alih-alih membangun relasi baik dengan manajemen, menjadi aktivis serikat lebih banyak mendulang risiko daripada meraih untung.

Keraguan untuk berserikat bukan tanpa sebab. Solidaritas antar anggota kadangkala hanya manis di bibir, ramai didengarkan saat rapat-rapat konsolidasi. Pasca aksi, segala komitmen bisa sirna. Tidak semua pengurus serikat buruh mau menanggung efek konflik dengan manajemen yang dapat berdampak pada diri dan keluarganya. Ketua serikat sering dibuat sakit kepala. Ia harus menjalankan keputusan organisasi namun pada saat yang sama tidak ada jaminan bahwa akan ada pembelaan dan sokongan penuh apabila ia diincar manajemen dan dipecat karena dianggap mengganggu suasana kerja. Tak jarang pengurus lain "lebih realistis" dengan mundur perlahan dari aktivitas organisasi dengan alasan mau fokus pada pekerjaan saja. Aktivitas serikat rentan menimbulkan korban yang tidak perlu.

Masalah soliditas organisasi sungguh merupakan hambatan serius. Pengurus serikat tidak mampu menganalisa masalah perburuhan yang dihadapi anggota-anggotanya, bingung dalam menyusun strategi dan alternatif aksi, dan gagap dalam memilah agenda yang mendesak dan penting. Elit serikat buruh sering meremehkan prinsip primer bahwa

kemenangan butuh banyak perangkat. Bicara kemenangan itu baik untuk memompa semangat. Tapi sungguh naif bila perjuangan hanya berpikir menang tapi ogah menghitung kemungkinan kalah dan segala risiko terburuk.

Bicara kemungkinan kalah itu sangat baik untuk mengerem ego dan membuat kita berpikir lebih jernih dan dewasa, dan mengendalikan suasana chaotik. Dengan demikian, gerakan buruh akan mampu melahirkan alternatif-alternatif strategi, mulai dari yang paling aman hingga berisiko. Itulah fungsi persatuan dalam konteks gerakan buruh.

Kelas buruh wajib tahu di wilayah mana perlawanan itu akan berlangsung. Kita memahami bahwa perlawanan tidak hanya bermakna tindakan keras atau tegas kepada pihak eksternal, namun juga pengondisian secara internal agar seluruh lingkungan pekerja siap membantu dan melanjutkan perlawanan. Itulah fungsi perlawanan dalam konteks gerakan buruh. Sebagaimana kata Sun Tzu, *"Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat."* (Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kegaduhan sebelum kekalahan).⁹

Serikat berantakan bukan karena ketiadaan sumberdaya pengurus. Alih-alih tiada ide, justru pengurus mungkin banyak melontarkan ide-ide segar. Sayangnya, pengurus inti merasa pintar sendiri. Setiap ide langsung dibabat tanpa ampun selama tidak senada dengan ide elit pengurus. Tidak ada upaya mengapresiasi ide menjadi sebuah aksi. Alih-alih berkumpul menyamakan persepsi demi sebuah gerakan yang solid, ide-ide terlontar untuk dipermak menjadi wacana yang kemudian diwacanakan kembali dalam bentuk lain. Kelompok orang-orang (sok) pintar yang tidak tahu kapan sikon yang kondusif

9 http://thinkexist.com/quotation/strategy_without_tactics_is_the_slowest_route_to/220091.html. 1 Januari 2011, 23.50 WIB.

untuk berwacana dan kapan saatnya bertindak ternyata dapat menghambat kerja organisasi.

Efeknya, sistem komando tidak berjalan dalam mekanisme pengambilan keputusan yang terlalu demokratis. Bahkan kewibawaan pimpinan serikat memudar karena setiap instruksinya dimentahkan kembali atas nama demokrasi. Sekali lagi, ini akibat banyaknya orang-orang pintar yang ingin menonjolkan diri pada saat situasi sudah mendesak untuk satu komando. Dengan model kepemimpinan yang tidak efektif, serikat mustahil mampu menggerakkan anggota-anggota secara efektif.

Tidak salah apabila hubungan serikat dengan organisasi lain tidak punya daya rekat untuk saling menguatkan. Aura ketidaksolidan di internal serikat dan hilangnya kewibawaan pimpinan serikat berdampak buruk pada pencitraan serikat di mata organisasi atau serikat lain. Organisasi/serikat yang lain ingin melihat serikat yang solid, tidak saling melemahkan. Disisi lain, agenda politik tertentu dari organisasi-organisasi buruh berpengaruh bagi pembelaan terhadap serikat yang sedang dihantam manajemen korporasi. Organisasi/serikat yang memperoleh bantuan dana dan kerjasama program dari/atau dengan suatu korporasi, istilahnya *yellow union*, tidak mungkin pasang badan dalam barisan aliansi atau sekutu serikat yang bermasalah. Mereka lebih memilih sikap abstain.

Selain itu, hambatan eksternal, yaitu dari korporasi dan negara, turut berpengaruh pada pelemahan serikat.¹⁰ Demi memalingkan perhatian buruh kepada serikat, manajemen mengubah sistem kerja dalam bentuk shift yang berbeda-beda sehingga tidak ada kemungkinan buruh berkumpul. Demi

10 Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. (Pasal 29 UU No. 21/2000).

merusak soliditas, manajemen mencampur antara buruh organik dan buruh kontrak dalam satu regu kerja. Demi merusak konsolidasi organisasi, manajemen membuat sebuah mekanisme kerja sehingga hampir semua pengurus sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Selain itu manajemen membina komunikasi personal demi memunculkan rasa *ewuh pakewuh* dengan dalam diri pengurus serikat.

Benak pengurus diasupi kutipan norma-norma dan nilai-nilai mistik timur yang dipelintir yang antara lain dikatakan bahwa orang timur selalu membangun hubungan harmonis dan tidak suka bertindak anarkis. Pada sisi lain, tidak jarang korporasi menunjukkan wajah garangnya dengan melakukan pemberangusan serikat (*union busting*) atau membuat kepengurusan ganda atau menyusupkan infiltran dalam kepengurusan serikat yang selalu membiaskan agenda-agenda kerja. Inilah praktik-praktik feodalisme barat yang masih dipraktikkan korporasi, yang anehnya didukung oleh kepercayaan mistik orang timur yang sama sekali tidak masuk akal.

Jika selama ini pemberangusan serikat buruh sering identik dengan tindakan kekerasan bahkan melibatkan polisi dan tentara, kini union busting dilakukan dengan cara yang lebih halus dengan melibatkan penelitian, training, penasehat hukum dan juga konsultan. Perusahaan tidak segan-segan membayar mahal para konsultan ini. Misalnya yang dilakukan oleh US Airways. Mereka menyewa the Labor Relations Institute (LRI), sebuah perusahaan pemberangus serikat buruh terkenal di Amerika. Mereka menggambarkan dirinya sebagai lembaga konsultan paling sukses dalam menciptakan hubungan positif antara buruh dan majikan. Mereka menyediakan pelatihan khusus bagaimana menghindari serikat buruh dan melakukan persuasi langsung

dengan buruh. Fokus utama pelatihan tersebut untuk memperlihatkan betapa berbahayanya representasi serikat buruh bagi pekerja itu sendiri.

LRI memproduksi video anti serikat yang diperlihatkan kepada buruh semasa orientasi. LRI juga menjual barang dagangan anti serikat, seperti pin yang menyatakan bahwa serikat itu tidak perlu atau berapa banyak buruh akan kehilangan upah jika buruh mogok. Untuk semua tindakan buruk ini, US Airways telah mengeluarkan biaya besar. American Right At Works mengkritik pedas tindakan penggunaan ratusan ribu dolar yang digunakan untuk mengintimidasi buruh daripada memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan mereka.¹¹

Kebijakan negara pun dapat juga memperlemah serikat. Mereka mendesain peraturan perburuhan yang condong kepada kepentingan pengusaha. Pada saat yang sama elit secara personal punya hutang budi terhadap pengusaha tertentu karena kontribusinya saat pemilu atau gratifikasi yang elit terima. Dalam sistem oligarki, Negara mengusulkan undang-undang yang condong kepada kepentingan korporasi. Selain itu, Negara melumpuhkan fungsi pengawasan perburuhan dan atau merekayasa suatu keputusan hukum yang ringan untuk memastikan perusahaan masih berjalan dengan stabil.

Pengorbanan

"...everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests."

"...setiap orang memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya."

(The Universal Declaration of Human Rights, Ayat 23, Bait 4)

11 <http://www.americanrightsatwork.org/take-action/campaigns/tell-us-airways-to-cut-ties-with-anti-union-consultants-20101014-930-306-306.html>. 14 Februari 2011, 21:07 WIB.

Setiap orang akan mati. Tapi mati sebagai apa, kitalah yang menentukan. Kitab suci menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Perjuangan melawan kezaliman korporasi dan segala efek buruk dari ekonomi pasar liberal tertancap dalam sanubari aktivis serikat buruh/pekerja sejak organisasi tersebut didirikan. Sebagai satu-satunya wadah perjuangan, kelangsungan dan masa depan kerja ditentukan oleh seberapa besar militansi dan kesolidan kelas buruh di internal korporasi. Dalam setiap perjuangan, langkah-langkah harus dihitung secara cermat. Kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal, baik untuk diri sendiri apalagi organisasi.

Setiap perjuangan pasti menuntut pengorbanan. Pada konteks perjuangan serikat buruh, pengorbanan adalah usaha terakhir dari rentetan perlawanan melawan kezaliman korporasi. Setelah sebelumnya aktivis serikat melakukan perumusan dan penyolidan ideologi, membangun solidaritas, dan memberikan keteladanan. Tontonlah "Vertical Limit" (2000), sebuah film thriller yang mengisahkan tentang Royce Garrett, seorang pecinta olah raga panjat tebing, yang tewas demi menyelamatkan kedua anaknya, Peter dan Annie Garrett. Adegan tersebut, sering dijadikan slide inspirasi dalam berbagai pelatihan, mengajarkan kepada kita bahwa mengambil keputusan kritis sangat dianjurkan dalam sebuah perjuangan, meski nyawa taruhannya.

Kita bersyukur kepada Tuhan atas rezeki berupa kenaikan gaji, bonus dan tunjangan. Namun kita tidak berpikir panjang bahwa semua itu adalah hasil dari perjuangan serikat, perjuangan teman-teman pengurus yang tidak bisa meluangkan waktu bersama keluarga tercinta. Pengurus yang selalu meralat janji-janji sederhana kepada orang-orang terdekatnya, untuk ke sekian kalinya. Menemani anak jalan-jalan, mengantar

anak ke sekolah, membeli mainan untuk anak, menemani istri belanja, membereskan rumah dan nonton televisi bersama. Janji-janji yang tidak mahal secara material. Namun, sistem korporasi membuat hubungan privat ini rusak.

Kini, apakah yang bisa kita korbakan untuk serikat kita? Pengorbanan tidak harus berupa uang. Tapi kita tahu ada hal-hal yang tidak bisa diganti dengan uang. Sesuatu yang dianggap remeh oleh korporasi. Hal itu bisa jadi adalah ketemu setiap saat dengan keluarga kita; Berlibur dan bersenang-senang dengan mereka; Melakukan aktivitas bersama keluarga. Demi perjuangan serikat, semua ini terpaksa harus kita kesampingkan dahulu. Bisakah semua itu kita korbakan demi kepentingan serikat? Tujuan pengorbanan demi kepentingan dan tujuan yang lebih besar. Berserikat bukan untuk mengabaikan keluarga kita, bukan memperjuangkan nilai-nilai sekunder dan mengesampingkan wilayah primer. Kepercayaan kita membimbing kita untuk kembali menegaskan posisi keluarga didalam masyarakat, bukan sebaliknya.

Jauh sebelum kita aktif di serikat, sesungguhnya amanat perjuangan sudah diletakkan ke punggung kita oleh kedua orangtua kita. Amanat yang isinya bukan sekadar bahwa kita harus bekerja sebagai karyawan yang baik agar bisa sukses dan sejahtera sendiri. Melainkan amanat agar kita menjadi makhluk yang bernilai bagi masyarakat, yang membanggakan dan mengharumkan nama kedua orangtua kita. Harta apa yang bisa kita berikan kepada kedua orangtua dan keluarga kita selain rasa bangga bahwa kita menjadi pembela kemanusiaan. Menjadi orang yang terdepan dalam melawan kezaliman korporasi yang merajalela. Kata sebuah teks suci, "Berbuat baiklah pada orangtuamu, nanti anak-anakmu akan berbuat baik padamu." Berserikat adalah pembuktian bakti kita kepada orangtua. Mereka banting tulang menyekolahkan

kita agar kita dapat ijazah. Dengan ijazah itulah kita bekerja di korporasi, tempat melabuhkan jiwa dan tubuh kita kepada serikat pekerja. Berserikat adalah pola pikir dan aura naluri kita dalam memandang hubungan industrial. Bahwa korporasi sebagai sebuah institusi dan sistem yang tidak bisa dilawan secara individual. Sistem harus dilawan dengan sistem. **Untuk itulah kita berserikat.**

Tujuan Transenden

Aura serikat akan menebar kesekeliling kita, menyatu dalam keringat dan dengus nafas kita, menjiwai seluruh perbuatan kita. Mungkin saja beberapa tahun kemudian tidak ada buruh yang mengenal kita. Mungkin saja buruh-buruh yang ada pun tidak peduli dengan serikat. Kita tidak perlu hiraukan. Yang kita tahu adalah bahwa mereka, keluarga, dan seluruh tanggungan mereka turut menikmati hasil perjuangan kita di serikat. Perjuangan yang berdarah-darah, dengan segala pengorbanan batin keluarga kita.

Kesejahteraan tidak jatuh dari langit, namun ia harus diperjuangkan. Agar buruh mempunyai daya juang yang tinggi, ia perlu mempunyai misi suci (*mission sacre*) yang sifatnya transenden, yaitu sesuatu nilai yang sifatnya abstrak dan tidak bernilai material yang menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan. Simbol transenden ini bisa berupa Tuhan (semua) agama (tertentu), ideologi, partai, atau figur. Dengan berpegang kepada sistem nilai tersebut, buruh memaknai kerja-kerja organisasi sebagai suatu bentuk ibadah dan pengabdian. Bahkan spirit yang kuat mampu menghantarkan buruh untuk berani melepas nyawanya demi simbol transenden tersebut. Dengan kontemplasi intelektual dan refleksi spiritual, buruh meyakini dalam susunan alam semesta ini kebenaran harus tegak mengalahkan kejahatan.

Disinilah buruh bergerak sebagai Citra Sang Transenden dalam wadah serikat pekerja. Menjadi rahmat bagi alam semesta dengan memperjuangkan kebenaran, melaksanakan kebaikan, dan menegakkan keadilan. Inilah inti dari ideologi buruh, "unionism", keserikatan.[]

RINGKASAN:

Buruh harus menyadari bahwa posisinya lemah di hadapan korporasi. Buruh hanya individu, sedangkan korporasi adalah sebuah sistem. Buruh harus berserikat agar ia setara dengan dan tidak menjadi objek eksploitasi korporasi. Berserikat adalah kemestian, bukan pilihan, sebagaimana adalah keniscayaan akumulasi modal hanya dapat dihadapi dengan akumulasi massa buruh.

SEBELUM BERSERIKAT KEADAAN BURUH SEPERTI INI.....



SETELAH ADA SERIKAT BURUH.....



DAFTAR PUSTAKA

- AKATIGA, Tim Penulis. 2010. *Menuju Upah Layak*. Jakarta: FES.
- Cahyono, Edi, DS, Soegiri. 2003. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Eppler, Erhard. 2005. *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal*. Terjemahan Makmur Keliat. 2009. Jakarta: FES.
- Fisgon, El. 2004. *Menghadapi Globalisasi: Kiat Gombal Buat Pengusaha Kecil*. Terjemahan Ronny Agustinus. 2005. Jakarta: Marjin Kiri.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge*. Terjemahan oleh Yudi Santosa. 2002. Yogyakarta: Bentang.
- Hatta, Mohammad. 1991. *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Tintamas.
- Heriyanto, Husain. 1999. *Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi*. Makalah Short Course Kajian Ideologi, Peradaban dan Agama, HMI Cabang Depok, PKTTI-UI Depok, 21 Desember.
- Holz, Carsten A., 2008. *China's Economic Growth 1978-2025: What We Know Today about China's Economic Growth Tomorrow*, dalam "World Development 36". No. 10: 1665-91.
- KAJS, Tim. 2010. *Rakyat Berhak Berobat Gratis*. Jakarta: FES.
- Larrain, Jorge. 2000. *Identity and Modernity in Latin America*. London: Polity.
- Leur, JC Van. 1955. *Indonesia Trade and Society*. Bandung: W. Van Hoeve.
- Marx, Karl dan Engels, Frederick. 1959. *Manifesto Komunis*.

Jakarta: Yayasan Pembaruan. Cetakan Ketiga.

Meyer, Thomas dan Breyer, Nicole. 2007. *The Future of Social Democracy*. Bonn: Samskriti.

Republik Indonesia. 1951. *Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Robbins, Anthony. 1992. *Awaken The Giant Within*. Jakarta: Kharrisma.

Sen, Amartya. 1991. *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?* Terjemahan Rahmani Astuti. 2001. Bandung: Mizan.

Siregar, Chairil N. 2007. *Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*, dalam "Sosioteknologi". Edisi 12 Tahun 6.

Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. Jilid Pertama.

--. 2005. *Pancasila Bung Karno: Himpunan Pidato, Ceramah, Kursus dan Kuliah*. Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika.

Susanto, AB dan Wijanarko, Himawan (Ed.). 2008. *Corporate Culture & Organization Culture: A Strategic Management Approach*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.

Tjandra, Surya dan Suryomenggolo, Jafar. 2006. *Makin Terang Bagi Kami: Belajar Hukum Perburuhan*. Jakarta: TURC.

Tormey, Simon. 2004. *Antikapitalisme: For Beginner*. Terjemahan Wahyu. 2005. Jakarta: Teraju.

Trotsky, Leon. 1936. *Revolusi yang Dikhianati*. Terjemahan Rafiq Nadezhda. 2010. Yogyakarta: Resist Book.

Young-rae, Cho. 2008. *Pahlawan Buruh Korea: Riwayat Hidup Chun Tae-il*. Jakarta: PMK HKBP.

Yunus, Muhammad. 2003. *Bank Kaum Miskin*. Terjemahan Irfan Nasution. 2007. Jakarta: Marjin Kiri.

TENTANG PENULIS

Andito Suwignyo, adalah konsultan Labour Education and Development Syndicate (LEADS), pengurus Jala Foundation (lembaga pengelola CSR), pemimpin redaksi jurnal pekerja *LABORA*, Ketua PP Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPMI-KSPSI), penggiat di MAULA Foundation. Aktif di dunia perkaderan mahasiswa, buruh, dan komunitas lintas agama sejak kuliah di IKIP Bandung dan berorganisasi di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam.

e-mail: anditoaja@gmail.com

website: www.anditoaja.wordpress.com